



LAPORAN KINERJA 2022

**Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil dan Kewirausahaan Sosial**



**Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil dan Kewirausahaan Sosial**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
2023



Plt. Direktur PKAT-KS

I Ketut
Supena

KATA PENGANTAR:

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 merupakan komitmen Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program dan kegiatan.

Laporan Kinerja ini berisikan informasi capaian kinerja terkait proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2022.

Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat tersaji informasi yang akurat, relevan, transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang penyelenggaraan Program Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial dalam hal ini Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, Januari 2023

Plt. Direktur PKAT-KS


I Ketut Supena

Daftar Isi

9

BAB I

Pendahuluan

BAB II

Perencanaan Kinerja

25

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

35

BAB IV

Penutup

68

LAMPIRAN

71



Daftar Tabel

	Hal
Tabel 1. Strategi PENA dalam peningkatan kemandirian keluarga miskin dan rentan	19
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PKAT-KS Tahun 2022	29
Tabel 3. Rekap Bantuan Stimulan Pemberdayaan untuk rintisan/pengembangan usaha	51
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Capaian Output dengan Target berdasarkan DIPA dan Perjanjian Kinerja	53
Tabel 5. Perubahan Aspek dan Indikator Kinerja	58
Tabel 6. Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	60
Tabel 7. Rekapitulasi Bansos Pemberdayaan KAT Tahun 2022	65
Tabel 8. Rekapitulasi Realisasi Bansos Pemberdayaan KAT Tahun 2022	65
Tabel 9. Rekapitulasi Realisasi Bantuan Hunian Tetap (Huntap)	66
Tabel 10. Rekapitulasi Realisasi Anggaran PENA	66
Tabel 11. Rekapitulasi Bantuan PENA	66

Daftar Gambar

	Hal
Gambar 1. Tiga Elemen Kunci Pemberdayaan	9
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat PKAT (Permensos 20 tahun 2015)	12
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat PKAT-KS (Permensos 1 tahun 2022)	13
Gambar 4. Model Pemberdayaan KAT Berbasis Stakeholder (PKATBest)	14
Gambar 5. Peran LKS dalam Pemberdayaan KAT	17
Gambar 6. Jumlah SDM pelaksana PENA tahun 2022	19
Gambar 7. Komposisi SDM Direktorat PKAT-KS Tahun 2022	20
Gambar 8. Perbandingan capaian bantuan stimulan pemberdayaan KAT tahun 2020-2022	39
Gambar 9. Perbandingan capaian bantuan Balai Sosial tahun 2021-2022	41
Gambar 10. Perbandingan capaian bantuan Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya tahun 2020-2022	42
Gambar 11. Perbandingan capaian bantuan stimulan permukiman sosial tahun 2020-2022	45
Gambar 12. Perbandingan capaian bantuan Isi Hunian Tetap tahun 2021-2022	46
Gambar 13. Jenis Usaha Stimulan Penghidupan Berkelanjutan	50
Gambar 13. Pelaksanaan PENA Tahun 2022	51
Gambar 14. Cluster Usaha Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2022	51
Gambar 15. Bagan Penyaluran Penguatan Usaha dan Penguatan Produksi PENA Tahun 2022	52
Gambar 16. Wilayah Salur PENA Tahun 2022	53
Gambar 17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022	65

Daftar Singkatan

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	: Kelompok Usaha Bersama
LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
OTK	: Organisasi dan Tata Kerja
PENA	: Pahlawan Ekonomi Nusantara
PK	: Perjanjian Kinerja
PKAT	: Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
PM	: Penerima Manfaat
ProKUS	: Program Kewirausahaan Sosial
SK	: Sasaran Kegiatan



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial merupakan laporan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

Laporan kinerja selain untuk mengukur capaian juga bahan evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka pada tahun 2022 Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial mengemban target kinerja dengan **Sasaran Kegiatan** :



1. Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.



2. Meningkatnya pendapatan warga KAT.



3. Terpenuhinya pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial, dan/atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT.



4. Meningkatnya pendapatan KPM Kewirausahaan Sosial secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan usaha.



5. Nilai IKPA Dit.Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial



6. Meningkatnya kepuasan *stakeholders* terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial



Capaian Kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

100%

Persentase (%) Warga KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan,

125%

Persentase (%) Warga KAT yang Meningkatkan Kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial

100%

Persentase (%) warga KAT yang meningkat pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha

93,45%

Persentase (%) KPM Kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha

100%

Persentase (%) KPM Kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya

135,87%

Persentase (%) KPM Kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya

Nilai IKPA
84,47

Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial

Nilai Kepuasan
Stakeholders
78,46

Nilai kepuasan *stakeholders* terhadap layanan Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial

85,17%



Pagu : Rp. 133.785.635.000

Realisasi : Rp. 113.944.166.438

Bab I

Pendahuluan



Latar Belakang



Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi



Aspek Strategis Organisasi



Isu-Isu Strategis



Sistematika Laporan



BAB I

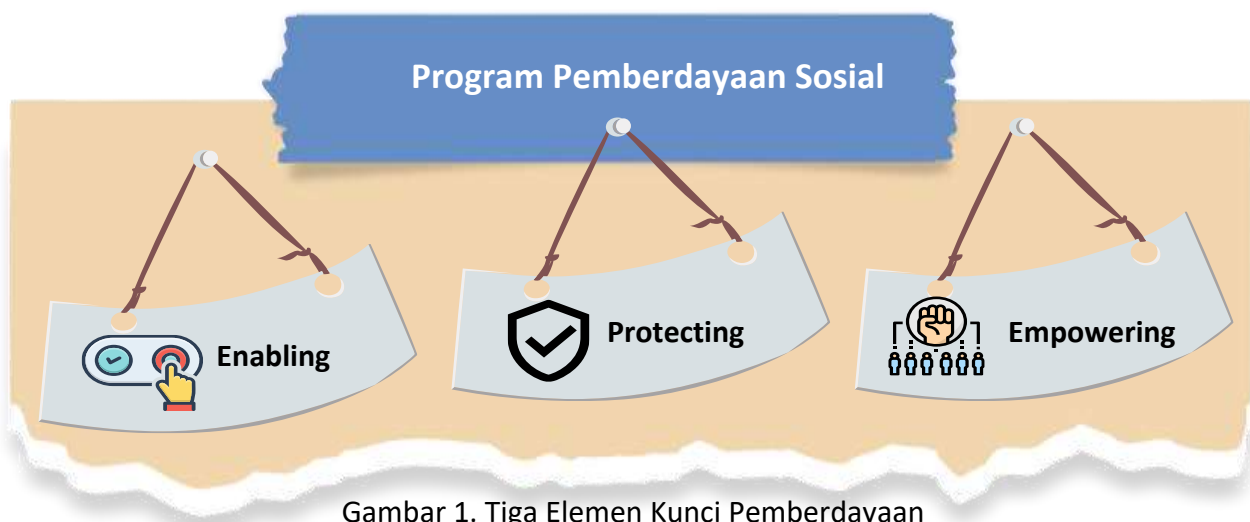
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU 11/2009).

Pemberdayaan sosial adalah konsep pembangunan yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chambers, 1995)¹. Konsep pembangunan dengan model pemberdayaan tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun lebih pada penguatan kapasitas, perluasan partisipasi, peningkatan kemandirian serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Program pemberdayaan, setidaknya melibatkan 3 hal yakni: pertama, *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Ketiga, *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.



Gambar 1. Tiga Elemen Kunci Pemberdayaan

Pemberdayaan sosial lebih menekankan pada proses dan bukan hasil semata. Sebagai sebuah proses yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan, masyarakat tidak lagi dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi menjadi subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Selain itu, pemberdayaan menekankan pada proses untuk

¹ Chambers, Robert (1995) *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES

mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk menentukan kehidupannya serta kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et. al, 1994)².

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial telah menyusun suatu laporan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi



Pada tahun 2022 terjadi perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja kementerian Sosial seiring terbitnya Perpres 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial serta Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Terbitnya permensos tersebut dengan demikian mencabut Permensos Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2022, terjadi perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada satuan kerja eselon II pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Salah satu satuan kerja eselon II yang mengalami perubahan adalah Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang berubah menjadi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial.

Adapun tugas dan fungsi Direktorat pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial sebagai berikut:

Tugas:

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi di bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

(Permensos 20 tahun 2015)

Semula

² Parson, et. al, 1994. *The Integration Of Social Work Practice*, California Wardworth.inc.

Menjadi

Tugas:

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil **dan Kewirausahaan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil **dan kewirausahaan sosial**.

(Permensos 1 tahun 2022)



Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

Semula

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, rujukan dan terminasi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

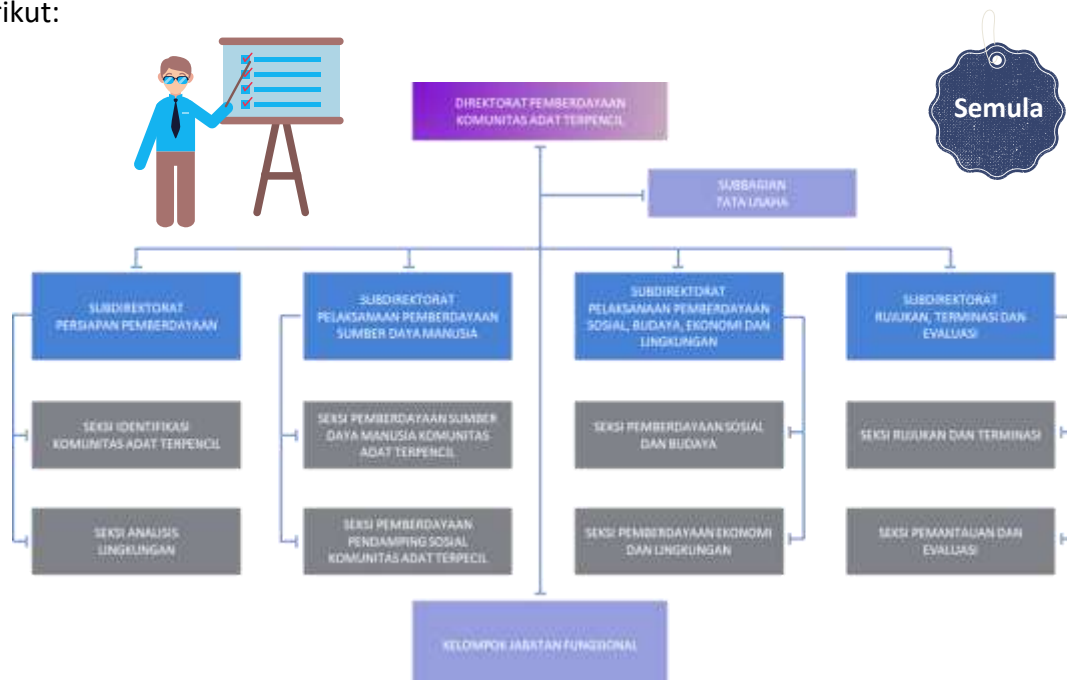
(Permensos 20 tahun 2015)

Menjadi

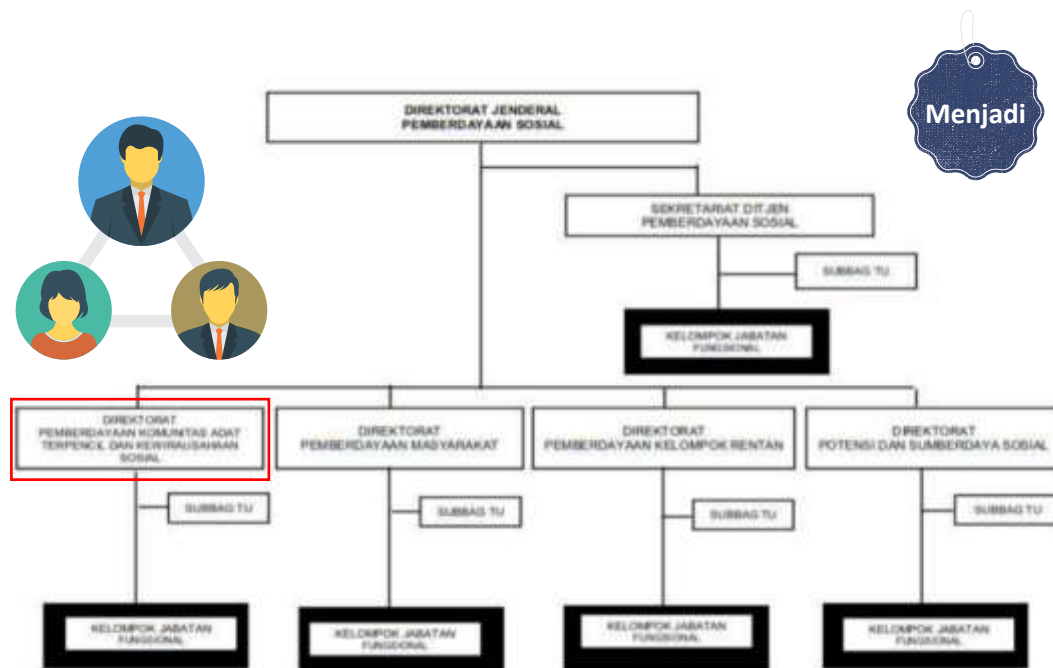
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

(Permensos 1 tahun 2022)

Struktur Organisasi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial sebagai Unit Kerja Eselon II dibawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat PKAT (Permensos 20 tahun 2015)



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat PKAT-KS (Permensos 1 tahun 2022)

C. Aspek Strategis Organisasi

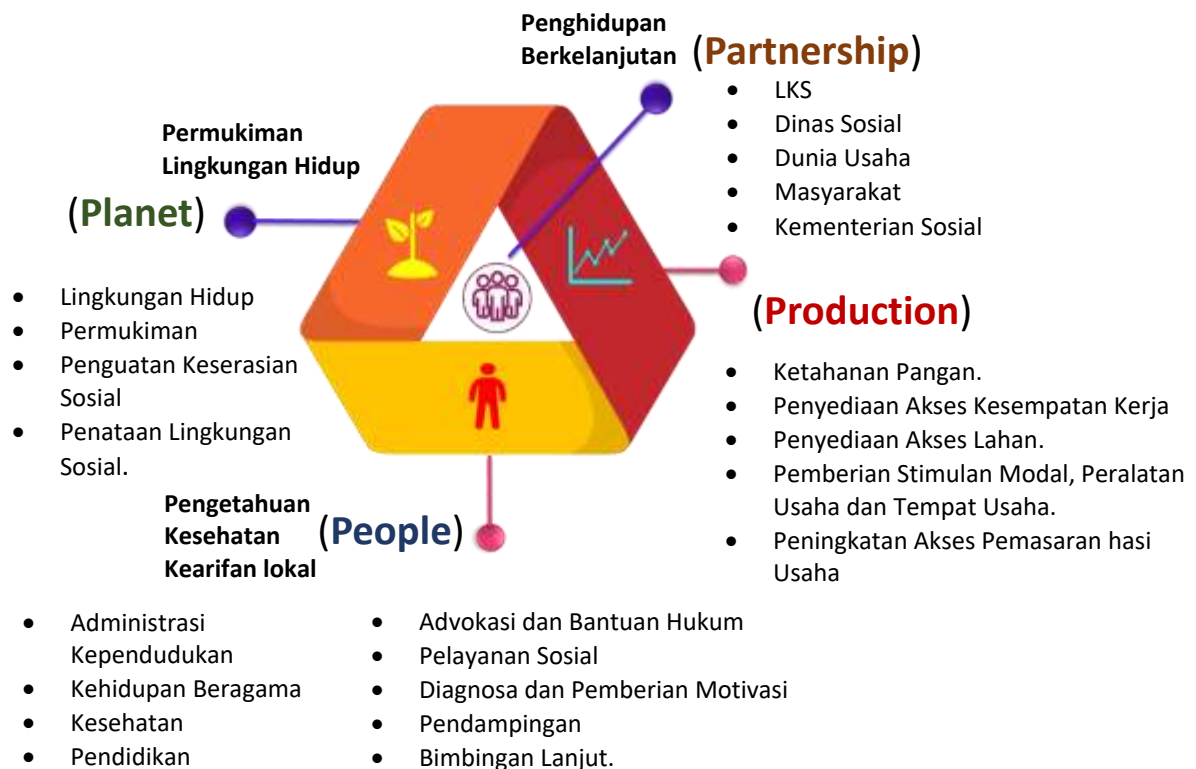


Aspek strategis organisasi merupakan aspek yang menjadi visi, misi, dan tujuan organisasi yang ingin dicapai dan ditempuh melalui berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Pemberdayaan sosial merupakan serangkaian proses peningkatan daya atau kemampuan individu, lembaga, dan masyarakat di mana KAT adalah salah satu target pemberdayaan pada level masyarakat. Pemberdayaan dalam konteks KAT bertujuan agar komunitas ini mampu memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan berdasarkan kebutuhan, aspirasi dan kapasitas mereka.

Pemberdayaan KAT berbasis *Stakeholders* (PKATBest) mengacu pada paradigma Pembangunan Berkelanjutan Alternatif (*Alternative Sustainable Development*) atau PBA. Apa yang diberdayakan meliputi aspek manusia, penghidupan dan lingkungan atau ekosistemnya. Model PKATBest menjadi pendorong untuk memberdayakan orang (*People*), penghidupannya (*Production*) dan lingkungannya (*Planet*). Pemberdayaan dilakukan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar, penguatan dan peningkatan kapasitas sosial (dalam membangun kerja sama, relasi dengan lingkungan sekitar dan akses dengan lingkungan yang lebih luas) dan budaya (memelihara kearifan lokal) dan penguatan kapasitas berusaha dalam bentuk mata pencaharian alternatif.



Gambar 4. Model Pemberdayaan KAT Berbasis Stakeholder (PKATBest)

Model ini juga mendorong aktivasi modal sosial yang ada pada komunitas berupa *trust*, kerekatan sosial, kerja sama atau gotong royong. Pemberdayaan dilakukan dengan membangun sinergi dan menguatkan semangat kolaborasi dari pihak terkait (*stakeholders*). Mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat termasuk juga dukungan dan partisipasi aktif dari dunia usaha.

Pemberdayaan KAT berbasis *Stakeholders* (PKATBest) merupakan model dan strategi pemberdayaan yang bertujuan untuk menguatkan esensi pemberdayaan sekaligus meningkatkan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak (*stakeholders*). Perlibatan LKS/Orsos dalam proses pemberdayaan KAT khususnya dalam pendampingan warga KAT didasarkan pada posisi dan peran LKS/Orsos yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki rekam jejak, kapasitas dan jaringan kelembagaan yang luas yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kemandirian warga KAT.

Dalam melaksanakan pendampingan pemberdayaan terhadap warga KAT LKS menjalankan tugas dan peran sebagai berikut:

1. Menyusun program kegiatan serta mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial di lokasi KAT yang menjadi tuisi dampingannya
2. Mensosialisasikan program pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar dampingan
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui sinergi, advokasi dan hubungan lembaga/masyarakat
4. Melaksanakan sosialisasi dan sinergi lintas sektor serta rencana kerja pendampingan

Strategi Pemberdayaan KAT



01 — Menekankan pada 3 aspek pemberdayaan, yaitu SDM (*people*), Lingkungan (*planet*) dan Usaha (*production*).

Pada konteks pemberdayaan KAT yang berkelanjutan dapat dilihat dari tiga aspek pemberdayaan yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan usaha.



02 — Melibatkan LKS setempat sebagai mitra pendampingan pemberdayaan KAT.

Pendampingan sosial berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan.



03 — Perubahan mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan warga KAT dari Pengadaan Barang dan Jasa ke Bantuan Tunai (*cash transfer*).

Mekanisme penyaluran bantuan sangat menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan.



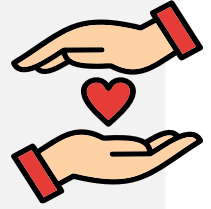
04 — Pembentukan Tim Percepatan Penyaluran Bantuan Tunai Warga KAT (satu orang satu provinsi : SOSP)

Pendampingan, pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan untuk memastikan program berjalan dengan baik sesuai aturan/ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Berbasis Stakeholder Tahun 2022 dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di seluruh lokasi pemberdayaan KAT. Hal ini tertuang dalam Keputusan Direktur Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial Nomor: 345/5.3/PB.05.04/07/2022 tentang Penetapan Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam Pendampingan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2022.

1. Peduli Dhuafa
2. PELMAS BNKP (Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Banua Niha Keriso Protestan)
3. Yayasan Kirekat Indonesia
4. LKSA KAUM (Kaum Abadi Untuk Mentawai)
5. LKS Kasih Ibu
6. Komunitas Emak Sehat
7. Yayasan Anak Pulau Selatpanjang
8. Tulus Hati
9. Mutiara Hati Palangkaraya
10. Gayam Rescue Team
11. LKS Pejuang Subuh
12. Yayasan Cahaya Menara Kasih Sintang
13. LKS LU Al-Tamar
14. Lazismu Hulu Sungai Tengah
15. Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Utara
16. Maritime and Indigineous Culture Research Center
17. Malaqbi Cooperation
18. Global Riset dan Pemberdayaan
19. Aman Toraya
20. LKSA Al-Burhaan
21. Yayasan Oriz Aldzikri Sowite
22. LKSPD Ar-Rohman
23. LKSA Maqidha
24. LKS Fatmawati
25. Yayasan Al-Ishlah Bondowoso
26. Kompas Maluku Tengah
27. LKSA Anthon Kleden
28. Yayasan The Tebings
29. FSPB Indonesia
30. Yayasan Insan Cita Bima
31. LKS Berkah
32. LKSA Hati Nurani Sumba
33. Biro Konsultasi Pengembangan Masyarakat Adat Papua Barat (BIKPEMAP)
34. Yayasan Pengembangan Potensi dan Pendidikan Anak Papua (YP3AP)
35. Yayasan Papua Penuh Kemuliaan Allah
36. Yayasan Bina Karya
37. Immanuel Tugu Karya
38. Forum Remaja Independen Papua
39. Yayasan Abdi Budaya Nusantara (YABN)
40. LKS PAPEDA
41. Yayasan Asmat Maju dan Sejahtera
42. Yayasan Maneta Tanda Tora





Gambar 5. Peran LKS dalam Pemberdayaan KAT

2. Arah Kebijakan Kewirausahaan Sosial



Kewirausahaan Sosial adalah penerapan pendekatan bisnis untuk memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan.

Sejak tahun 2022, Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial melakukan inovasi dengan mentransformasi program pemberdayaan sosial Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) menjadi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) dan pada akhirnya menjadi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

PENA menjadi penyempurnaan terbaru dari program-program sebelumnya. Tidak hanya perubahan nomenklatur yang dilakukan, tetapi perubahan juga terjadi pada *output* dan juga *outcome* yang diharapkan dari program ini. PENA diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan dan dalam jangka panjang akan melepas ketergantungan masyarakat miskin dan rentan terhadap bantuan sosial.

Program PENA tidak menempatkan diri sebagai panacea atau sebuah program yang menyelesaikan semua masalah. PENA terintegrasi dengan berbagai program lain di Kemensos dan juga Kementerian/Lembaga lainnya. Hal ini membuat keberlanjutan program PENA menjadi penting, sebagai salah satu fase dalam penyelesaian masalah dari penerima manfaat. PENA menjadi salah satu *Exit Strategy* dalam pengentasan masalah sosial. Integrasi PENA dengan program lain di Kementerian Sosial dan K/L lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Integrasi Pahlawan Ekonomi Nusantara dengan Program di Kemensos dan Kementerian/Lembaga lainnya

Strategi Pemberdayaan Kewirausahaan Sosial



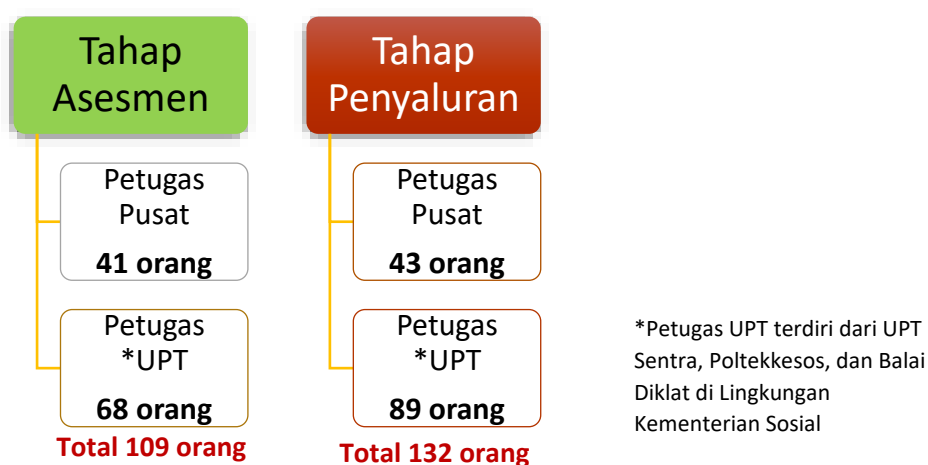
Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan (PKAT-KS) menyadari bahwa pergeseran orientasi dari bantuan sosial (*passive income*) menjadi pemberdayaan (*Active income*) memerlukan berbagai upaya.

Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) mengambil bagian dalam percepatan upaya-upaya tersebut. PENA menjadi program transisi yang membantu KPM bantuan sosial untuk dapat mandiri dan memiliki usaha yang berkelanjutan, sehingga dalam perkembangan usaha KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial dapat menjadi "Pahlawan" dalam meraih kemerdekaan ekonomi bagi dirinya dan juga orang-orang di lingkungan sekitarnya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan peran dan posisi pena dalam membantu meningkatkan kemandirian sosial ekonomi dalam tahapan penanganan yang komprehensif.

Tabel 1
Strategi PENA dalam peningkatan kemandirian keluarga miskin dan rentan

Aspek	Fase Pemulihan Sosial	Fase Transisi (PENA)	Fase Pembangunan
Kondisi Penerima Manfaat	Penerima Manfaat (PM) sedang mengalami resiko sosial atau kedaruratan	PM telah mendapatkan layanan pemulihan sosial, dalam kondisi meningkatkan kemandirian sosial ekonomi.	Fase PM telah memiliki kemampuan untuk mandiri secara sosial ekonomi dan memerlukan eskalasi dan pengembangan usaha lebih besar
Jenis Bantuan	Bantuan sosial Cash Transfer (PKH, Sembako), Kebutuhan dasar lain dan/atau alat bantu sesuai asesmen yang dilaporkan ke Command Center atau Puskesmas-SLRT	Bantuan Dukungan Penguatan Usaha dan Bantuan Penguatan Produksi dalam Pahlawan Ekonomi Nusantara	Program-program untuk pengembangan skala usaha, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
Tujuan	Intervensi krisis dalam kedaruratan PM dan sebagai jaring pengaman sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Meningkatkan kemampuan KPM dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan menyiapkan diri bila nantinya diharapkan untuk dapat lepas dari bantuan sosial	Pengembangan usaha menjadi lebih besar dan masif, usaha dari KPM dapat menjangkau pasar yang lebih luas

Pahlawan Ekonomi Nusantara juga melibatkan partisipasi aktif dari pendamping sosial di lapangan. Pendamping sosial sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam pemberian bantuan dan juga monitoring evaluasi bagi penerima manfaat PENA. Hal ini dimaksudkan agar program PENA dapat terawasi dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi para KPM. Pelaksanaan Kewirausahaan Sosial melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dan Pendamping Sosial. Adapun jumlah SDM yang dikerahkan pada pelaksanaan PENA tahun 2022 dalam tahapan asesmen dan salur sebagai berikut:

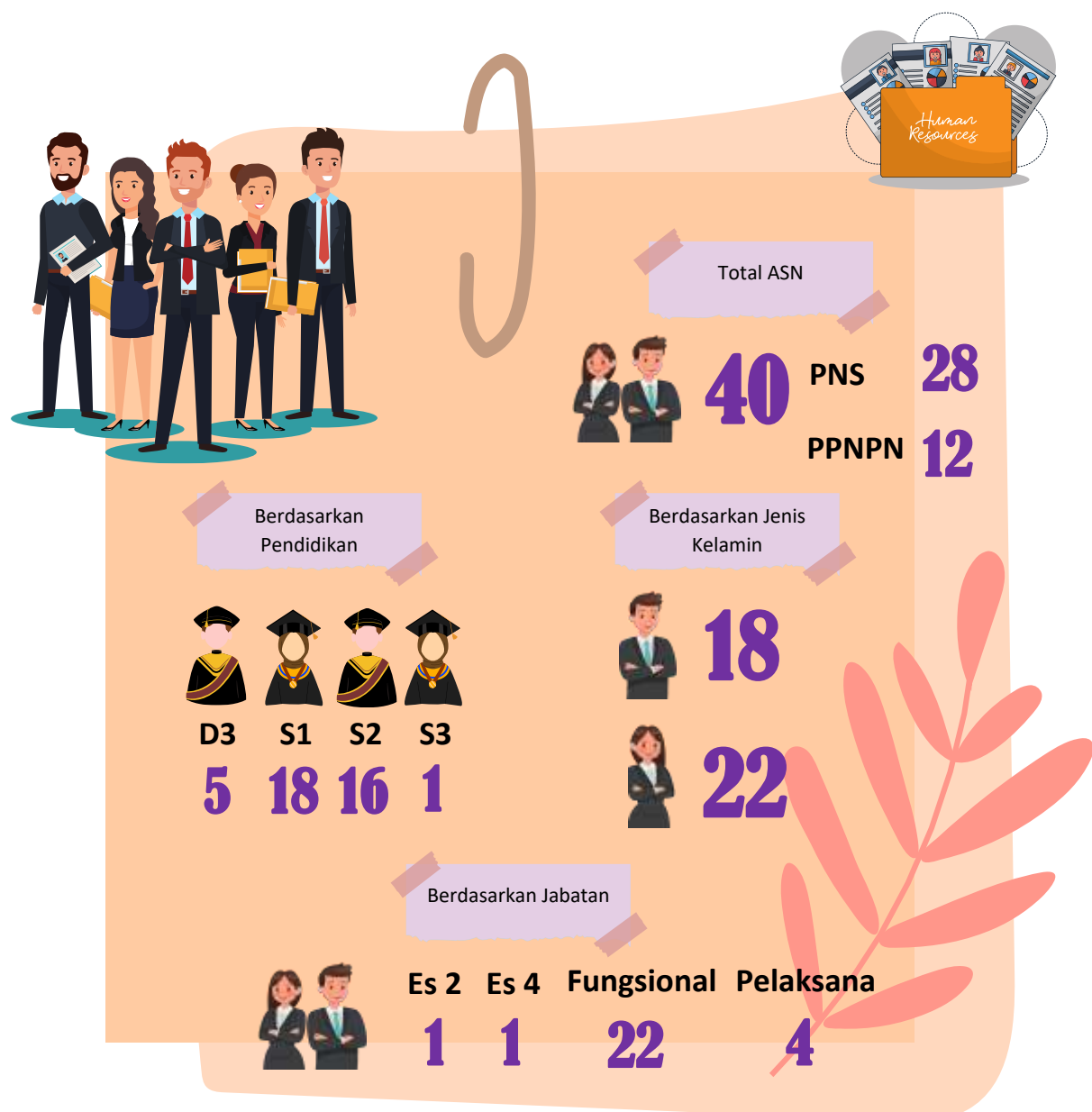


Gambar 6. Jumlah SDM pelaksana PENA tahun 2022

Adapun dalam asesmen dan penyaluran petugas salur pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh pendamping sosial pengampu program PKH dan BPNT. Setiap 10 (sepuluh) KPM dalam pelaksanaan asesmen dan penyaluran rata-rata didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping sosial.

Aspek Kelembagaan dan SDM Organisasi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial untuk mencapai target sesuai Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan.



Gambar 7. SDM Direktorat PKAT-KS Tahun 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Wali Kota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah, maka secara bertahap SDM pada Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial dilakukan reposisi struktur menjadi fungsi, mengalihkan sebagian jabatan struktural menjadi jabatan fungsional pada tataran eselon III dan IV. Hal ini juga sejalan dengan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

D. Isu-Isu Strategis

1

Persoalan KAT tidak semata keterpencilan tetapi juga terkait dengan kemiskinan, HAM, kebutuhan dasar, isu marginalisasi, ketidaksetaraan, keadilan, pemerataan pembangunan (3 T), pendidikan, kesehatan, persoalan tanah (ulayat), degradasi lingkungan hingga persoalan geografis dan resiko keamanan dalam penjangkauan wilayah.

2

Kepemilikan NIK - KTP dan terdaftar dalam DTKS sebagai askes masuk program perlindungan sosial agar mendapat penanganan komprehensif. Umumnya hak sipil warga KAT terabaikan karena tidak memiliki akta kelahiran, NIK - KTP, dan kartu keluarga sebagai dokumen dasar warga negara.

3

Ego sektoral dan kurangnya keterpaduan program, kegiatan dan anggaran antara Pusat dan Daerah serta Dunia Usaha. Komitmen daerah sebagai prasyarat utama dalam pemberian program pemberdayaan KAT ke daerah.

4

Aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang sangat terbatas, hanya sampai pada pusat-pusat pemerintahan desa atau kecamatan sehingga tidak semua warga KAT mampu menjangkaunya.

5

Evaluasi terhadap waktu, jenis dan jumlah dan mekanisme penyaluran bantuan sosial (pokmas /pihak penyedia) serta pola pemberdayaan dan pendampingan yang tepat dan efektif diberikan kepada warga KAT

Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan Kewirausahaan Sosial melalui Pahlawan Ekonomi Nusantara, diantaranya:

1

Mindset untuk berwirausaha yang banyak belum terbentuk di penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini banyak ditemui di beberapa sampel penerima bantuan sosial yang sudah merasa nyaman dengan bantuan yang diterimanya secara periodik. Beberapa KPM juga lebih memilih untuk tidak penerima program PENA karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Hal ini memerlukan pendekatan khusus oleh pendamping sosial di lapangan untuk dapat memberikan motivasi kepada KPM agar mau untuk berwirausaha.



Kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam berwirausaha sosial. Beberapa KPM memiliki kondisi geografis yang menyulitkan untuk berusaha dengan jenis tertentu. Hal ini yang membuat pentingnya asesmen oleh petugas untuk dapat diketahui kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar KPM. Salah satu contohnya ada KPM yang tinggal di wilayah pesisir, kemudian mengajukan untuk mendapatkan bantuan PENA berupa mesin sampan yang dapat digunakan untuk pergi melaut.



Kapasitas pendamping sosial dalam pelaksanaan PENA perlu ditingkatkan. Pendamping sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan program PENA. Kemampuan pendamping untuk melakukan asesmen, membuat proposal, melakukan pembelanjaan, dan membuat pelaporan akhir memerlukan standar yang dapat dipelajari secara mandiri. Hal ini dapat memudahkan pelaksanaan program PENA di tahun-tahun berikutnya.



Perlu pengawasan ekstra dalam penggunaan anggaran agar akuntabel. Berkaitan dengan kapasitas pendamping sosial yang berbeda-beda. Bentuk program PENA yang sebagian porsi anggaran tidak melalui cash transfer, tetapi dengan pengadaan langsung membuat perlu dibuatnya petunjuk dan aturan yang jelas. Monitoring dan evaluasi juga perlu ditingkatkan frekuensinya untuk menghindari resiko terjadinya tindakan *fraud*.

E. Sistematika Laporan



Bab II

Perencanaan Kinerja



Rencana Strategis



Perjanjian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis



Rencana Strategis secara garis besar memuat gambaran umum dan Dasar Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan. Rencana Strategis ini juga menggambarkan keterkaitan antara sasaran program dan sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana besar Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 s/d 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Pemberdayaan Sosial memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024 yang bertujuan:

“Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu”

Sasaran

Strategis (SS)

Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (IKSS)

Persentase (%) fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya

Sasaran

Program (SP)

1. Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar
2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial
3. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi

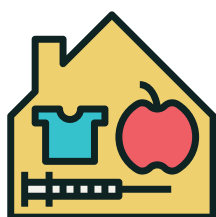
Sasaran Strategis (SS) : Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu



Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) : Persentase (%) fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya dicapai melalui indikator:

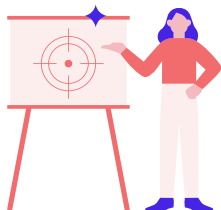
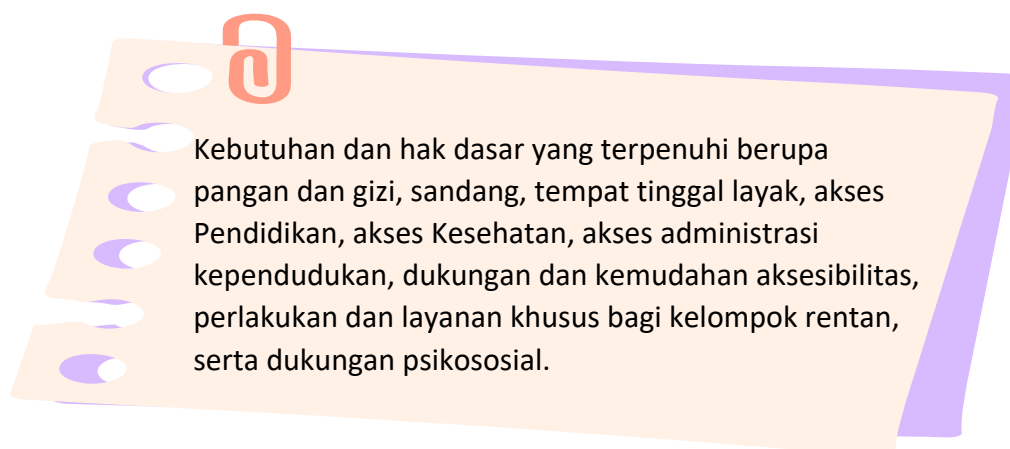


1. Terpenuhinya Kebutuhan dan hak dasar



Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak dari setiap warga yang wajib dipenuhi oleh negara melalui pemberian layanan dasar dan bantuan sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan merupakan upaya untuk membatasi hambatan-hambatan yang menghalangi masyarakat marjinal untuk mengakses layanan dasar untuk memenuhi kebutuhannya agar bertahan hidup sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok masyarakat (Narayan, 2002)³.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat disebut sejahtera/mandiri/berfungsi sosial jika pondasi berupa kebutuhan dan hak dasar sudah terpenuhi.



SP1. Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak dasar



IKP2. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

100%

Sasaran Program (SP) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar dicapai melalui:

³ Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington DC: World Bank.

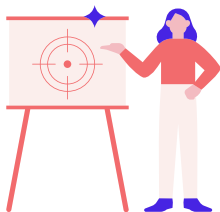
- Sasaran Kegiatan (SK) Terpenuhinya Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan Psikososial dan/atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi Warga KAT.
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT

2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial



Individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat didorong untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan serta berpartisipasi aktif baik berdasarkan perseorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial merupakan suatu upaya untuk meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap peluang ekonomi serta layanan dasar sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh haknya sebagai warga.

Peningkatan kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial adalah mampu melakukan perawatan diri, pengasuhan, melindungi diri dan keluarga dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan seperti kelaparan dan kekerasan, mampu mengaktualisasikan diri dalam lingkungan, serta mampu berpartisipasi sosial.



SP2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sosial



IKP1. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

80%

Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial dicapai melalui:

- Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.

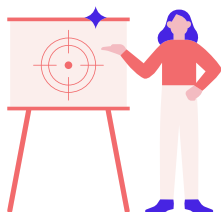
- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.

3. Meningkatnya Kemandirian Sosial-Ekonomi



Kondisi mandiri secara sosial ekonomi/teratasinya masalah dalam kehidupan merupakan tujuan lanjutan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yaitu meningkatnya kemandirian ekonomi. Seseorang tidak lagi bergantung pada bantuan, namun ia sudah mampu meningkatkan kualitas kehidupannya secara mandiri (Pasal 13 UU No. 14 Tahun 2019).

Sebagai tujuan dari pemberdayaan, kemandirian dapat pula dimaknai sebagai kemampuan atau kebebasan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam mengatur dan mengambil keputusan atas sumber daya yang dimiliki agar bisa bebas memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Kemandirian sosial ekonomi adalah kemampuan dalam memiliki pendapatan berkelanjutan atau penghasilan tetap baik melalui akses pekerjaan maupun kewirausahaan sosial.



SP3. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi



IKP1. Persentase (%) penerima manfaat Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

60%

IKP2. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

50%

Sasaran Program (SP) meningkatnya kemandirian sosial ekonomi dicapai melalui:

- Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya pendapatan warga KAT
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha

- Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya pendapatan KPM kewirausahaan sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan Usaha.
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya
 - Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta targetnya untuk tahun 2020-2024, dengan tetap memperhatikan keterkaitan masing-masing tujuan memiliki sasaran program yang pengukurannya melalui Indikator Kinerja untuk mengkonfirmasi tujuan yang akan dicapai pada Renstra Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020-2024.

B. Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial Tahun 2022 memuat sasaran strategis dan Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial sejalan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran ditetapkan maka disusunlah Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan komitmen Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial dengan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Direktorat PKAT-KS Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SK1. Terpenuhinya pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	IKK1.1 Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	100%
SK2. Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	IKK2.1 Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	80%

SK3. Meningkatnya pendapatan warga KAT	IKK3.1	Persentase (%) warga KAT yang meningkat pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha	50%
SK4. Meningkatnya pendapatan KPM kewirausahaan sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan Usaha	IKK4.1	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkatkan keterampilannya dalam mengelola usaha	60%
	IKK4.2	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkatkan akses pemasarannya	60%
	IKK4.3	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya	60%
SK5. Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial	IKK5.1	Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial	90
SK6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	IKK6.1	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	82

Sasaran kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi/lembaga yang mencerminkan kontribusi yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa kegiatan. Untuk mencapai sasaran :

1. Terpenuhinya pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT dicapai melalui indikator kinerja ***"Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT"***. Pemenuhan kebutuhan dasar dipenuhi melalui bantuan stimulan pemberdayaan KAT yang didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan kolektif dan riil warga KAT di lokasi.
2. Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial dicapai melalui indikator ***"Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial"***. Peningkatan tanggungjawab dan peranan sosial warga KAT dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai mitra pendampingan pemberdayaan warga KAT.
3. Meningkatnya pendapatan warga KAT dicapai melalui indikator ***Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha.***

4. Meningkatnya pendapatan KPM kewirausahaan sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan Usaha dicapai melalui 3 (tiga) Indikator: Pertama, ***"Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha"***. Kedua, ***"Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya"***. Ketiga, ***"Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya"***. Peningkatan pendapatan KPM kewirausahaan sosial PENA dilakukan melalui pemberian bantuan penguatan usaha dan penguatan ekonomi PM penerima program PENA.
5. Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial dicapai melalui indikator ***"Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial"***. IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Nilai Ikpa diperoleh dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan
6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial dicapai melalui indikator ***"Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial"***. Kepuasan stakeholder menjadi umpan balik bagi Direktorat PKAT-KS untuk peningkatan kualitas kinerja. Nilai Kepuasan stakeholders diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh *stakeholders* pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial.

Terdapat perubahan Sasaran Kinerja Kegiatan (SKK) berikut Indikator Kinerja Kegiatan implikasi dari perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Tahun 2022 sebagai berikut:

Perubahan Sasaran Kegiatan (SK)

OTK Lama (Dit. PKAT) 2 SK dan 5 Indikator

SK1. Meningkatnya Taraf Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan

- IKK1.1 Persentase Warga KAT yang memiliki tambahan Sumber Mata pencaharian
- IKK1.2 Persentase warga KAT yang memiliki NIK
- IKK1.3 Persentase warga KAT yang diusulkan oleh Pemda untuk didaftarkan di DTKS



OTK Baru (DIT. PKAT-KS) 6 SK dan 8 Indikator

SK3. Meningkatnya Pendapatan warga KAT.

- IKK3.1 Persentase warga KAT yang meningkat pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha

SK5. Nilai IKPA Dit. PKAT-KS

- IKK5.1 Nilai IKPA Direktorat PKAT-KS

SK2. Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

- IKK2.1 Nilai IKPA Direktorat PKAT
- IKK2.2 Nilai SAKIP Dit. PKAT



SK6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial

- IKK6.1 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial



SK1. Terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT

- IKK1.1 Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT

SK2. Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial

- IKK2.1 Persentase (%) warga KAT yang meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial

SK4. Meningkatnya pendapatan KPM kewirausahaan sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan Usaha

- Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha
- Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya
- Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan

Rumusan SK1. Meningkatnya Taraf Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan pada OTK lama (Dit. PKAT) berubah menjadi SK3. Meningkatnya Pendapatan warga KAT pada OTK baru (Dit. PKAT-KS). Perubahan rumusan tersebut mempertajam rumusan sebelumnya yang hanya berfokus pada warga KAT yang memiliki tambahan sumber mata pencaharian (*output*) menjadi hasil (*outcome*) dari pemberian bantuan tersebut.

IKK1.2 Persentase warga KAT yang memiliki NIK dan IKK1.3 Persentase warga KAT yang diusulkan oleh Pemda untuk didaftarkan di DTKS tidak lagi menjadi Indikator Sasaran Kegiatan di OTK baru (Dit. PKAT-KS) karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah menjadi persyaratan wajib dalam pengusulan calon lokasi Pemberdayaan KAT oleh Daerah. Sedangkan pengusulan DTKS menjadi kewenangan Pemda dan tidak terkait langsung kewenangan Direktorat PKAT-KS.

SK2. Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berubah menjadi SK.5 Nilai IKPA Dit. PKAT-KS dan SK.6 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial.

IKK2.1 Nilai IKPA Direktorat PKAT masih menjadi Indikator Sasaran Kegiatan (IKK) pada OTK baru (IKK5.1). Sedangkan IKK2.2 nilai SAKIP Dit. PKAT tidak lagi menjadi IKK pada OTK baru dan berubah menjadi Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial (IKK6.1). Selain itu, terdapat penambahan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai implikasi dari perubahan OTK dan penambahan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) sebagai program baru di Direktorat PKAT-KS.



Bab Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kinerja



Realisasi Anggaran



Kinerja Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres 29/2014).

Kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial selama tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), pelaksanaan agenda prioritas nasional, anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi. Selain itu Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial juga rutin melaksanakan evaluasi internal dalam rangka memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

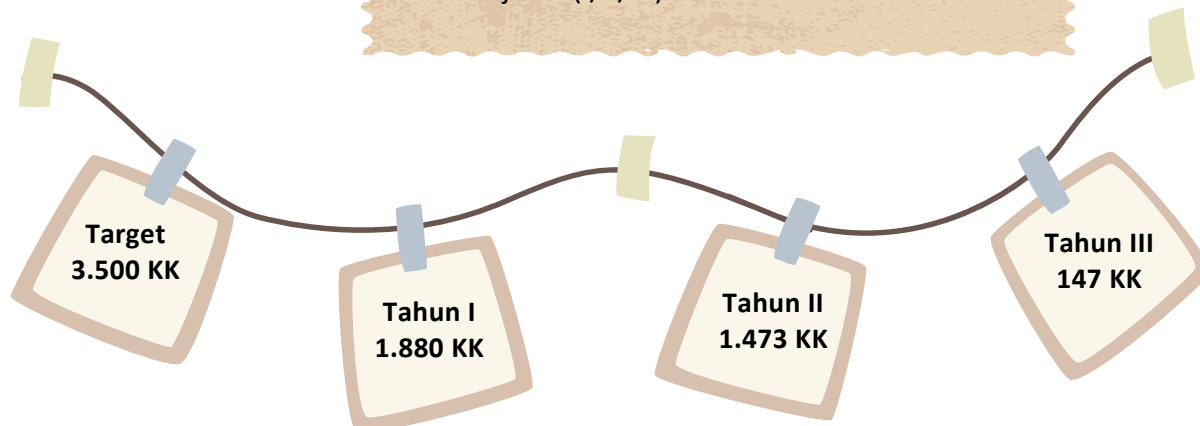
Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial pada tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial tahun 2022 dengan realisasinya.

FORMULASI

$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

n : jumlah warga KAT yang diberikan bantuan stimulan pemberdayaan/bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan/Pendampingan

T : jumlah warga KAT yang diberdayakan tahun berjalan (I/II/III)



FORMULASI

$$\frac{n}{T} \times 100\%$$

n : jumlah PM penerima bantuan penguatan usaha/produksi

T : jumlah target PM penerima program PENA

Target 2022
8.500 PM

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil termasuk ke dalam program Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2020-2024. Target pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam RPJM 2020-2024 sebagai berikut:

Program/Kegiatan/proyek	Indikator	Indikasi Target					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pemberdayaan Bagi Keluarga Komunitas Adat Terpencil	Keluarga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh Pemberdayaan	2.667	3.000	3.500	4.000	4.500	17.667

Penetapan target pemberdayaan komunitas adat terpencil setiap tahun didasarkan pada target Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Surat Edaran Bersama (SEB) serta pembahasan pada forum *Trilateral Meeting* (TM) antara Kementerian Sosial dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Adapun realisasi target pemberdayaan komunitas Adat Terpencil tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan/proyek	Indikator	Indikasi Target					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pemberdayaan Bagi Keluarga Komunitas Adat Terpencil	Keluarga Komunitas Adat Terpencil yang memperoleh Pemberdayaan	2.667	2.500	3.500	-	-	8.667

Jumlah warga KAT yang mendapatkan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2020-2022 sebanyak 8.667. Terdapat selisih target sebanyak 500 KK dari target RPJMN 2020-2024 untuk tahun 2020-2022 sebanyak 9.167 KK. Hal ini disebabkan karena penetapan target warga KAT yang diberdayakan pada tahun 2021 hanya sebanyak 2.500 KK sesuai RKP, SEB dan hasil TM.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat PKAT pada satker lama (Dit. PKAT) berkorelasi dan berkontribusi terhadap capaian kinerja satker baru (Dit. PKAT-KS). Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Kegiatan SK1. Meningkatnya Taraf Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan pada OTK lama, khususnya IKK1.2 Persentase warga KAT yang memiliki NIK telah terealisasi 100% pada OTK lama (Dit. PKAT). Data *By Name By Address (BNBA)* + Nonor Induk Kependudukan (NIK) menjadi prasyarat wajib pengusulan calon lokasi pemberdayaan KAT tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PKAT Nomor 338/5.3/KPTS/07/2022 tentang Penetapan KPM Bantuan Sosial Pemberdayaan KAT Tahun 2022. Sedangkan SK.2 Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial terjadi perubahan rumusan dan terrealisasi pada satker baru (Dit. PKAT-KS) tahun 2022 sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan 1

SK.1 Terpenuhinya pangan, Gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan psikososial dan atau akses Pendidikan, Kesehatan, dan Administrasi Kependudukan bagi warga KAT.

IKK1.1 Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi pangan dan gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan psikososial dan atau akses Pendidikan, Kesehatan, dan Administrasi Kependudukan

Target : 100%

Realisasi : 100%

100%

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, menetapkan kebijakan pemberdayaan sosial terhadap KAT dengan memberikan Bantuan Stimulan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT salah satunya dalam bentuk Bantuan Stimulan Pemukiman, Bantuan Balai Sosial (*Community Center*), Bantuan Sarana Air Bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya, Bantuan Sarana Pendidikan, Bantuan sarana dukungan *Community Center*, Bantuan Usaha Penghidupan Berkelanjutan Warga KAT serta bantuan sosial lainnya sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan warga KAT di lokasi.

Pemberian bantuan sosial pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan satu kesatuan dengan proses pendampingan dan peningkatan kapasitas warga Komunitas Adat Terpencil. Pemberian Bantuan sosial pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Meningkatkan aksesibilitas warga KAT terhadap berbagai layanan sosial dan pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk perbaikan kualitas hidup dan lingkungan warga KAT.
4. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga KAT melalui usaha ekonomi produktif untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan.
5. Meningkatkan sinergi dan kerjasama lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan KAT.

Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT



Bantuan stimulan pemberdayaan KAT diberikan kepada warga yang berada di lokasi pemberdayaan tahun ke I, II dan III tahun anggaran 2022 untuk menstimulasi warga KAT agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.

Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp.5.000.000,-/KK/Lokasi sesuai asesmen kebutuhan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan jaminan hidup, peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman, dan bantuan lainnya sesuai hasil assessment kebutuhan kolektif dan riil warga KAT di lokasi pemberdayaan.



Penyerahan Bantuan Stimulan di Kampung Lules, Kab. Keerom - Papua

Bantuan stimulaan pemberdayaan KAT telah disalurkan kepada 3.500 keluarga KAT di 20 Provinsi, 38 Kabupaten, 61 Kecamatan, 71 Desa, dan 79 Lokasi pemberdayaan KAT dengan capaian sebesar 100%. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga KAT selama proses pemberdayaan dilaksanakan.

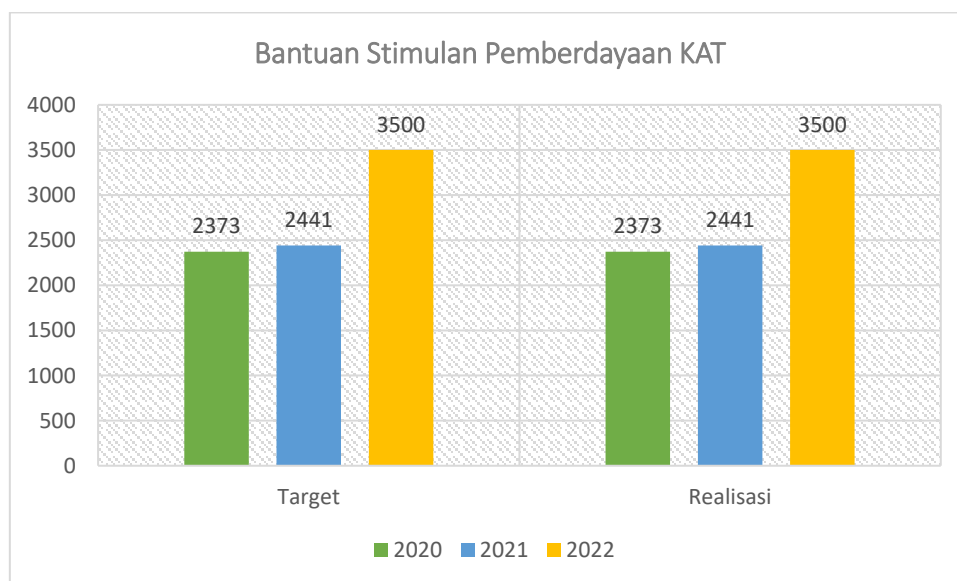


Penyerahan Bantuan Stimulan di
Kampung Maluang, Kab.Berau - Kaltim



Penyerahan Bantuan Stimulan di
Kampung Malacan Timur, Kab. Kepulauan
Mentawai - Sumbar

Gambar 8. Perbandingan capaian bantuan stimulan pemberdayaan KAT tahun 2020-2022



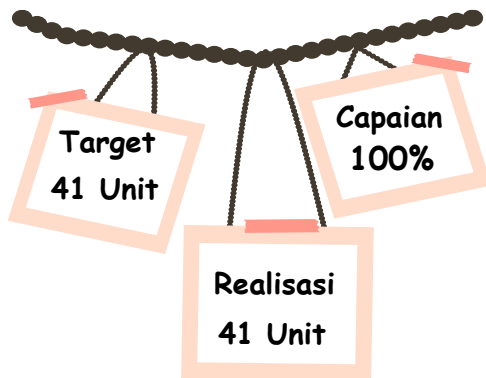
Jumlah bantuan stimulan pemberdayaan KAT (bantuan jaminan hidup) yang diberikan kepada warga KAT pada tahun 2022 sebanyak 3.500 KK. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.059 KK dari total bantuan stimulan pemberdayaan KAT yang diberikan pada tahun 2021 sebanyak 2.441 KK. Jumlah ini juga meningkat sebanyak 1.127 KK jika dibandingkan dengan total bantuan stimulan pemberdayaan KAT yang diberikan pada tahun 2020 sebanyak 2.373 KK. Realisasi capaian bantuan stimulan pemberdayaan KAT tahun 2020-2022 selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%.

Bantuan Balai Sosial (*Community Center*)



Bantuan balai sosial diberikan ke lokasi pemberdayaan tahun I dan II tahun anggaran 2022 sebagai bangunan serbaguna untuk berbagai kegiatan pemberdayaan di lokasi.

Balai sosial di lokasi KAT difungsikan oleh warga KAT sebagai sarana berkumpul, bersosialisasi, berkesenian, pertemuan adat, musyawarah, belajar dan bermain anak serta kegiatan warga lainnya. Besaran bantuan balai sosial sebesar Rp.200.000.000/unit/lokasi.



Balai Sosial KAT di Kampung Bubis,
Kab.Asmat - Papua

Bantuan balai sosial telah disalurkan kepada 41 lokasi pemberdayaan KAT tahun I dengan capaian sebesar 100%. Balai sosial dibangun secara swadaya dengan partisipasi aktif masyarakat.

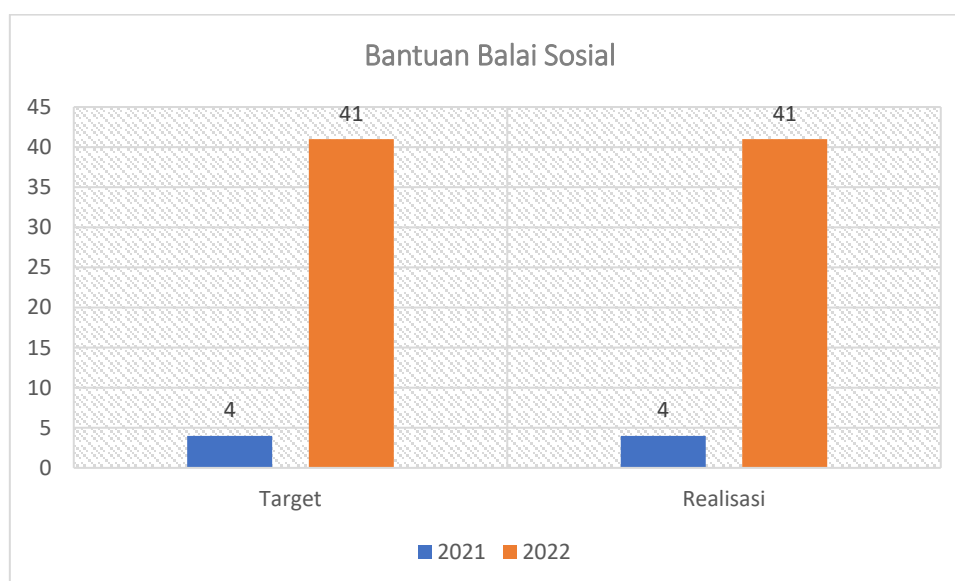


Balai Sosial KAT di Kampung Jengonoi, Kab.
Sintang, Kalimantan Barat



Balai Sosial KAT di Kampung Matakapore,
Kab. Sumba Barat Daya, NTT

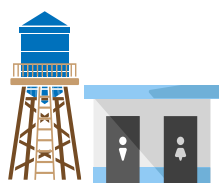
Gambar 9. Perbandingan capaian bantuan Balai Sosial tahun 2021-2022



Jumlah bantuan balai Sosial (*community center*) yang diberikan kepada warga KAT pada tahun 2022 sebanyak 41 unit. Jumlah ini meningkat sebanyak 37 unit dari total bantuan stimulan pemberdayaan KAT yang diberikan pada tahun 2021 sebanyak 4 unit. Pemberian bantuan sosial (*community center*) dimulai pada tahun 2021 dan diperuntukkan untuk lokasi khusus sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat target dan capaian untuk bantuan tersebut. Realisasi capaian bantuan balai Sosial (*community center*) tahun 2021 dan 2022 selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%.

Balai sosial (*community center*) yang dibangun tidak sepenuhnya merupakan pembangunan baru, ada pula bangunan lama yang dilakukan renovasi dan penambahan ornamen (estetika) bangunan seperti di lokasi Mindai dan Pacung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut jumlah balai sosial yang merupakan pembangunan baru sebanyak 40 Unit dan balai sosial lama yang dilakukan renovasi dan penambahan ornamen sebanyak 1 unit sehingga total sebanyak 41 unit.

Bantuan Sarana Air Bersih, MCK dan Sarana Lingkungan Lainnya



Bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya diberikan ke lokasi pemberdayaan tahun I dan II tahun anggaran 2022 diberikan untuk memenuhi kebutuhan warga akan fasilitas air bersih yang layak, sarana MCK bagi warga KAT serta sarana lingkungan lainnya di lokasi.

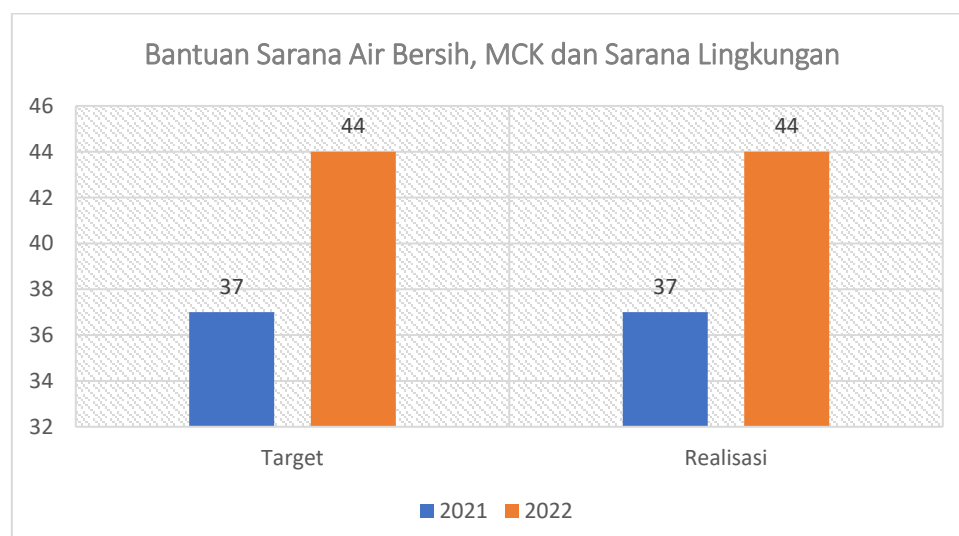
Besaran bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya sebesar Rp.200.000.000/unit.



Bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan telah disalurkan kepada 44 lokasi pemberdayaan tahun I (1 unit/lokasi) dengan capaian sebesar 100%. Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya merupakan kebutuhan penting dan mendasar warga KAT di lokasi. Sama seperti balai sosial, pembangunan Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya dibangun secara swadaya dengan partisipasi aktif masyarakat.



Gambar 10. Perbandingan capaian bantuan Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya tahun 2020-2022

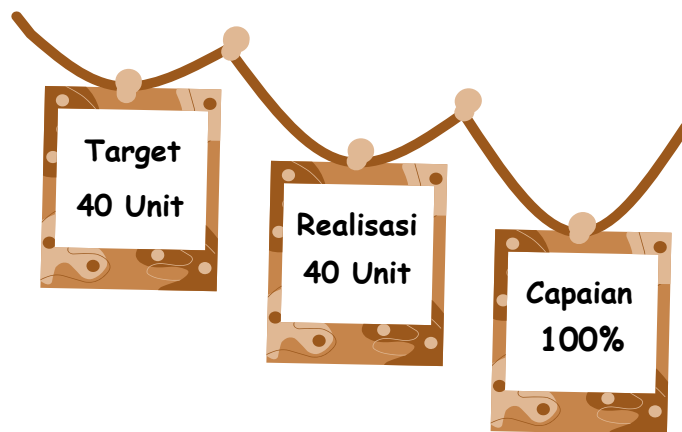


Jumlah bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya yang diberikan kepada warga KAT pada tahun 2022 sebanyak 44 unit. Jumlah ini meningkat sebanyak 7 unit dari total bantuan yang sama yang diberikan pada tahun 2021 sebanyak 37 unit. Bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya dimulai pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat target dan capaian untuk bantuan tersebut. Realisasi capaian bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya tahun 2021 dan 2022 selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%.

Bantuan Sarana Pendidikan



Bantuan sarana pendidikan diberikan ke lokasi pemberdayaan tahun I tahun anggaran 2022 untuk menunjang Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) anak-anak di lokasi. Besaran bantuan sarana pendidikan sebesar Rp.100.000.000/lokasi.



Sarana Pendidikan di Kampung Simasoro,
Kab. Kep. Mentawai - Sumbar

Bantuan sarana pendidikan telah disalurkan kepada 44 lokasi pemberdayaan KAT tahun I (1 unit/lokasi) dengan capaian sebesar 100%. Bantuan sarana pendidikan merupakan bantuan sarana pelengkap balai sosial yang digunakan oleh anak-anak di lokasi KAT untuk bermain dan belajar di lokasi pemberdayaan KAT. Bantuan sarana pendidikan mulai diberikan kepada warga KAT tahun 2022 sehingga tidak ada perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya (2020 dan 2021)



Sarana Pendidikan di Kampung Simasoro,
Kab. Kepulauan Mentawai - Sumbar



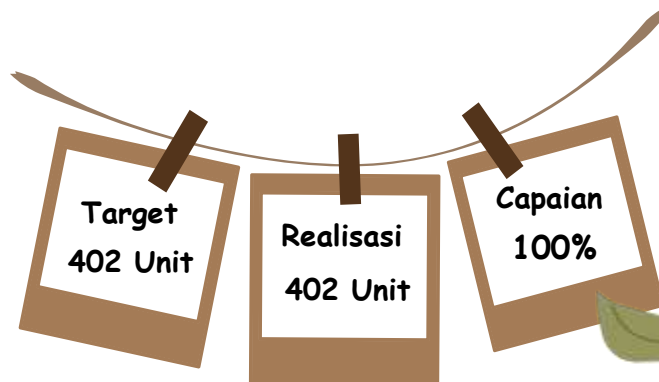
Sarana Pendidikan di Kampung
Kotbesi, Kab. Buru - Maluku

Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial/Peningkatan Kualitas Hunian



Bantuan stimulan pemukiman sosial kepada warga KAT diberikan dalam bentuk uang untuk pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR). Bantuan stimulan pemukiman sosial diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang layak bagi warga KAT.

Indeks Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial Rp.50.000.000/Unit.



Bantuan stimulan pemukiman sosial telah disalurkan kepada 402 KK prioritas di lokasi PKAT Papua dan Papua Barat (1 rumah/KK) dengan capaian sebesar 100%. Sama seperti pembangunan balai sosial dan pembangunan Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya, dibangun secara swadaya dengan partisipasi aktif masyarakat.

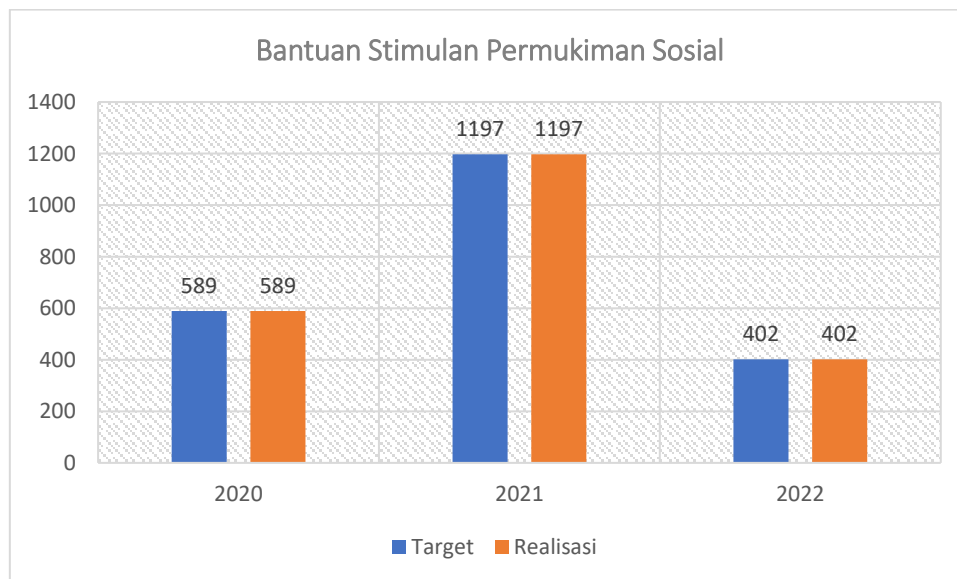


Pembangunan Rumah KAT di Kampung Pagai, Kab. Jayapura - Papua



Pembangunan Rumah KAT di Kampung Iwang, Kab. Jayapura - Papua

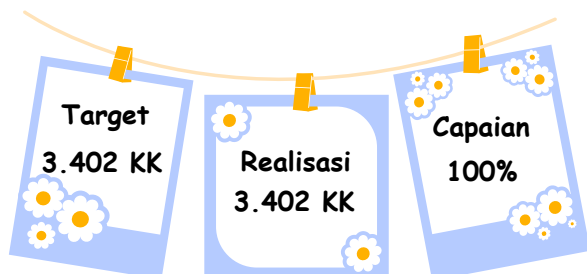
Gambar 11. Perbandingan capaian bantuan stimulan permukiman sosial tahun 2020-2022



Jumlah bantuan stimulan permukiman sosial bagi warga KAT tiap tahun berbeda sesuai dengan hasil assessment kebutuhan serta ketersediaan anggaran. Tahun 2022 jumlah bantuan stimulan permukiman sosial sebanyak 402 unit. Jumlah ini menurun sebanyak 795 unit dari total bantuan yang diberikan pada tahun 2021 sebanyak 1.197 unit dan menurun sebanyak 187 unit dari total bantuan yang sama pada tahun 2020 yakni sebanyak 589 unit. Realisasi capaian bantuan stimulan permukiman sosial tahun 2020-2022 selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%.

Bantuan isi Hunian Tetap (Huntap)

Bantuan isi Hunian Tetap (Huntap) berupa sarana dan prasarana pelengkap *hunian/rumah*. Bantuan ini bertujuan agar warga KAT terpenuhi kebutuhan akan perlengkapan rumah sehingga merasa nyaman dan betah tinggal di rumah. Besaran bantuan isi hunian tetap (huntap) sebesar Rp.2.500.000/KK (termasuk pajak). Bantuan isi hunian tetap (huntap) diberikan kepada 3.402 KK.



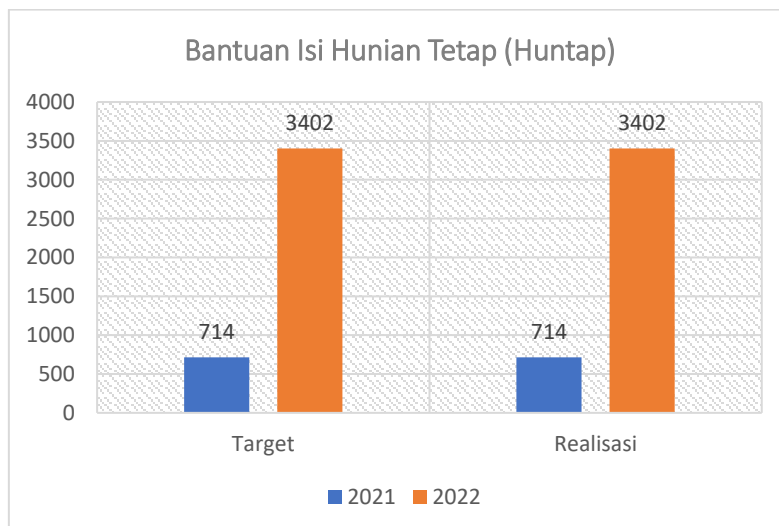


Bantuan Huntap di Kampung Batu Silolangi, Kab. Aceh Tenggara - Aceh



Sarana Huntap di Dusun Hambawang Dilantak, Kab. Balangan - Kalsel

Gambar 12. Perbandingan capaian bantuan Isi Hunian Tetap tahun 2021-2022



Tahun 2022 jumlah Isi hunian tetap (huntap) sebanyak 3.402 KK. Jumlah ini naik sebanyak 2.688 KK dari total bantuan yang diberikan pada tahun 2021 sebanyak 714 KK. Bantuan Isi Hunian Tetap mulai diberikan pada tahun 2021 sehingga tidak terdapat target dan realisasi bantuan tersebut pada tahun 2020. Realisasi capaian bantuan isi hunian Tetap tahun 2021-2022 selalu mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%.



Sasaran Kegiatan 2

SK.2 Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.

IKK2.1 Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.

Target : 80%

Realisasi : 100%

125%



Pelatihan peningkatan kapasitas bertani dan berkebun warga KAT di Kampung Seunong Bakti, Kab. Aceh Jaya - Aceh



Sosialisasi Bansos KAT di Kampung Pagai, Kab. Jayapura - Papua



Asistensi penyaluran Bansos KAT di Kampung Nanga Jengonoi, Kab. Sintang - Kalbar

Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial berkorelasi dengan bantuan yang diberikan serta keterlibatan warga dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh LKS. Perawatan diri berkaitan dengan peningkatan pemahaman warga KAT atas pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta pemanfaatan bantuan sarana air bersih, MCK dan Sarana lingkungan lainnya yang dibangun di lokasi KAT. Sednagkan meningkatnya kemampuan dalam pertisipasi berkaitan dengan keterlibatan warga dalam kegiatan musyawarah, sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan oleh LKS.

Pendampingan warga KAT oleh LKS. Pendampingan Komunitas adat Terpencil telah dilaksanakan di 20 Provinsi, 38 Kabupaten, 61 Kecamatan, 71 Desa, dan 79 Lokasi pemberdayaan KAT dan jumlah warga yang didampingi sebanyak 3.500 KK dengan capaian 100%. Pencapaian yang melebihi target ini disebabkan karena pendampingan yang dilakukan oleh LKS melingkupi seluruh lokasi KAT yang diberdayakan dengan total jumlah warga KAT yang memperoleh pendampingan sebanyak 3.500 KK.

Partisipasi sosial warga tergambar pada saat warga KAT bermusyawarah untuk membentuk kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Kepengurusan ini dibentuk sebagai represntasi warga dalam kegiatan administrasi warga, misalnya pembukaan rekening kelompok untuk penyaluran bantuan, pengusulan bantuan, penyaluran bantuan dan pelaporan terhadap bantuan yang disalurkan.

Perawatan diri warga muncul setelah mendapatkan pendampingan berupa informasi pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan serta dikenalkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Pendampingan juga melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi warga dengan melibatkan petugas kesehatan.

Pencapaian sasaran kinerja berupa Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Warga KAT terlibat langsung dan tanpa paksaan dalam identifikasi kebutuhan serta bentuk intervensi untuk mengatasi kebutuhan tersebut dalam bentuk peningkatan kemampuan dan bantuan sosial.
2. Pembentukan kelompok masyarakat dari dan oleh warga penerima pemberdayaan sosial terhadap pemberdayaan KAT memberi ruang bagi seluruh warga untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat terhadap keadaan yang dialami, selanjutnya secara bersama-sama mencari kemufakatan untuk mendapatkan jalan keluar terhadap kendala, kebutuhan dan kebuntuan yang terjadi.
3. Warga KAT secara langsung terlibat dalam penentuan, pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap pemberdayaan yang dilakukan.
4. Warga menentukan jenis sarana lingkungan berupa sarana kebersihan seperti MCK, pembuatan sumber air bersih, sanitasi lingkungan.
5. Secara aktif warga menyiapkan dan mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengobatan yang difasilitasi oleh LKS pendamping.



Sasaran Kegiatan 3

SK3. Meningkatnya pendapatan warga KAT.

IKK3.1 Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil yang meningkat pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha

Target : 50%

Realisasi : 50%

100%

Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki peran penting dalam mengelola, memanfaatkan dan menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi sumber penghidupan berbasis pada kearifan lokal. Namun demikian, Perubahan tata ruang, konflik agraria dan degradasi lingkungan yang terjadi sangat cepat dan massif di sebagian besar wilayah KAT berimplikasi terhadap pola kehidupan dan penghidupan mereka yang masih tradisional dan bercorak subsisten.

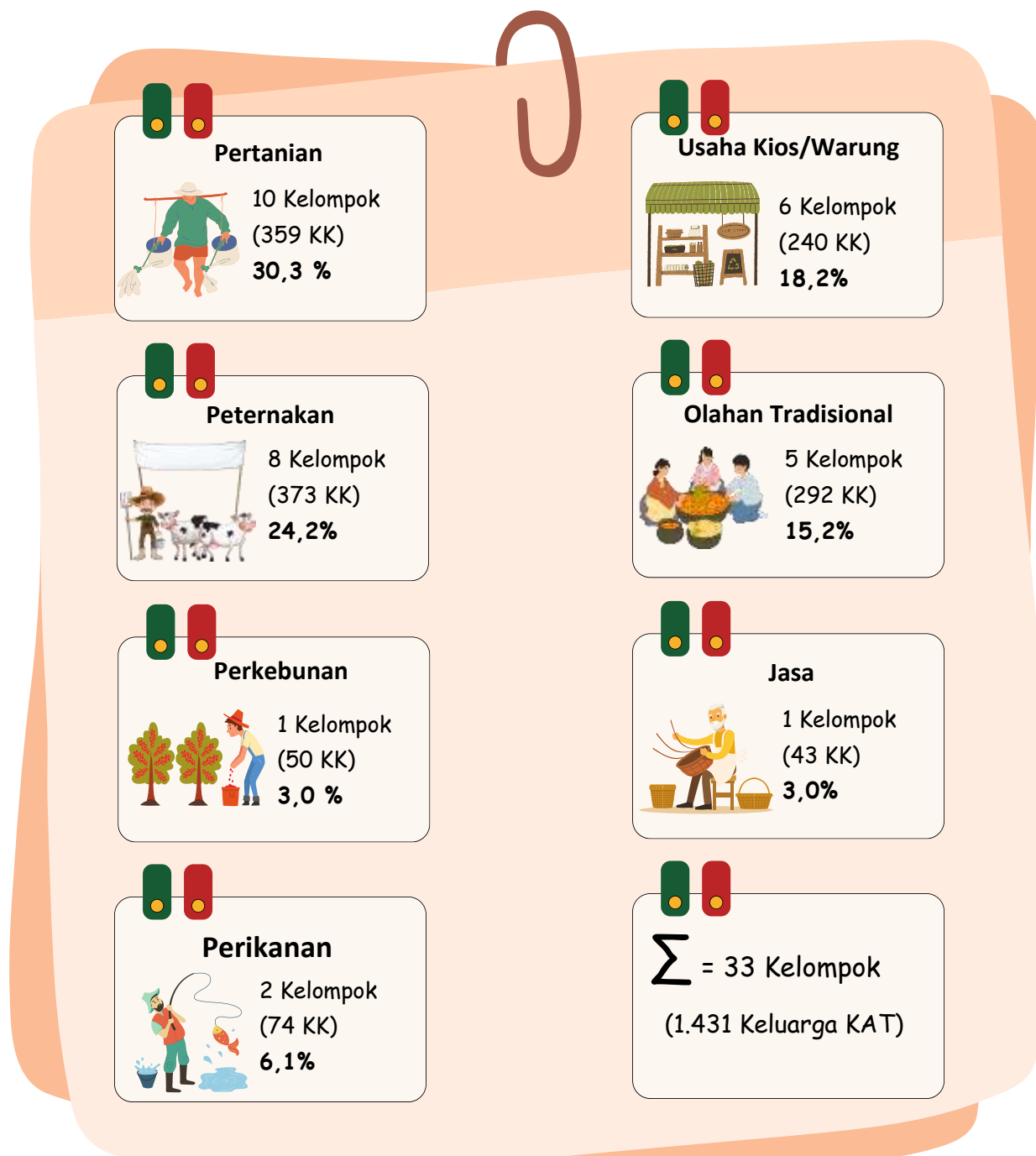


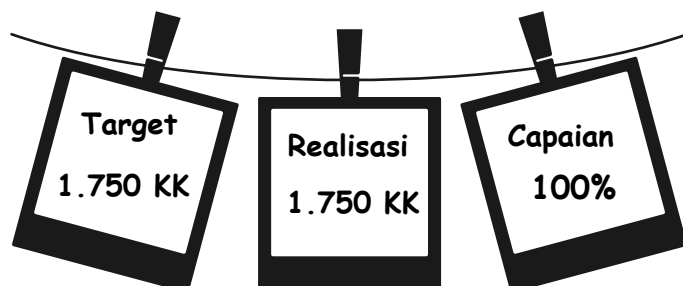
Bantuan sosial berupa bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) merupakan bantuan sosial berbasis kelompok yang diberikan kepada warga KAT untuk mengatasi hambatan dalam keterbatasan modal, pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Bantuan tersebut diberikan agar warga KAT memiliki sumber mata pencaharian alternatif sehingga tidak lagi bergantung dan mengandalkan mata pencaharian tradisional seperti berburu dan meramu yang telah diwariskan secara turun temurun.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra pendamping pemberdayaan KAT, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melakukan asesmen kebutuhan, penggalan potensi, sosialisasi, asistensi, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok KAT agar dapat memanfaatkan bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan yang diberikan sesuai kebutuhan dan potensi usaha yang prospektif dikembangkan di lokasi KAT untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga KAT.

Bantuan stimulan bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan pada tahun 2022 telah disalurkan kepada 33 Kelompok KAT di 33 lokasi Pemberdayaan atau mencakup sebanyak 1.431 KK dengan realisasi capaian sebesar 100%. Adapun jenis usaha bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Gambar 13. Jenis Usaha Stimulan Penghidupan Berkelanjutan





Bantuan Stimulan Penghidupan Berkelanjutan mesin perontok jagung di Dusun Biru, Kabupaten Polman -Sulbar

Selain itu, terdapat 319 KK di yang memanfaatkan bantuan stimulan pemberdayaan KAT untuk peningkatan pendapatan melalui rintisan maupun pengembangan usaha yang dimiliki sehingga total capaian persentase warga Komunitas Adat Terpencil yang meningkat pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha mencapai target sebesar 100%.

Tabel 3. Rekap Bantuan Stimulan Pemberdayaan untuk rintisan/pengembangan usaha

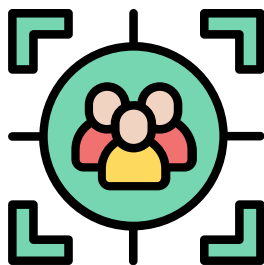
No	PROVINSI	NAMA LOKASI	JUMLAH (KK)	Jenis Usaha Penghidupan Berkelanjutan	Jenis Usaha
1	Kalimantan Barat	Lok. Dukuh Domit Permai Desa Melana Kec. Nanga Sokan Kab Melawi	23	Pembelian sapi (7 ekor sapi) vitamin dan obat-obatan	Peternakan
		Lok. Nanga Jengonoi Desa Nanga Menakon Kec. Ambalau Kab Sintang	35	pembelian kebutuhan ternak ayam (bibit ayam, pakan ayam, vitamin obat dan kandang)	Peternakan
2	Kalimantan Selatan	Lok. Hambawang Dilantak Desa Marajai Kec. Halong Kab. Balangan	54	pembelian kebutuhan untuk berkebun pisang (handsprayer, bibit pisang, pupuk dan obat)	Perkebunan
		Lok Mindai dan Pacung Desa Datar Batung Kec. Hulu Sungai Tengah Kab Hulu Sungai Tengah	27	Pembelian kebutuhan berkebun jagung (bibit jagung pakan, pupuk poska dan urea, obat hama, cangkul, parang, sekop dan alat semprot elektrik)	Perkebunan
3	Nusa Tenggara Barat	Lok. Saranae Desa Laju Kec Langgudu Kab Bima	50	Pembelian peralatan berkebun jagung yaitu mesin tanam jagung)	Perkebunan
		Lok. Ladan Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh Kab. Sumbawa	28	Pembelian kebutuhan berkebun durian (bibit durian, terpal dan parang)	Perkebunan
4	Sulawesi Selatan	Lok. Ta'ba Desa Batu Alu Kec. Sanggala Selatan Kab. Tana Toraja	50	Pembelian bibit jagung dan ternak ayam (46 KK), pembelian bibit jagung dan ternak kambing (4 KK)	Pertanian
		Lok Kassi-kassi dan Parang Labua, Desa Kayu Loe, Ke. Bantaeng Kab. Bantaeng	52	Pembelian kebutuhan untuk bertenak kambing dan berkebun jagung (kambing, bibit jagung, pupuk, racun tumpas plus, dan racun CBA-6)	Peternakan
TOTAL			319		



Bantuan Stimulan Penghidupan
Berkelanjutan mesin konveksi di Kampung
Seunong Bakti, Kab. Jaceh Jaya - Aceh



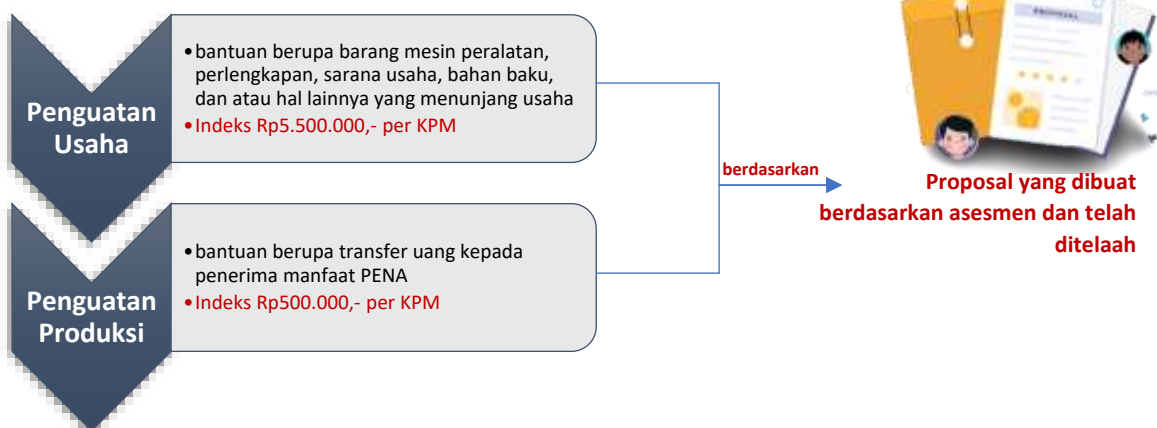
Bantuan Stimulan Penghidupan
Berkelanjutan ketel pengolahan kayu putih
di Kampung Ngade, Kabupaten Buru -



Sasaran Kegiatan 4

SK4. Meningkatnya pendapatan KPM Kewirausahaan Sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan usaha

Kementerian Sosial dalam hal ini Dit PKAT-KS melaksanakan peningkatan kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat melalui PENA. Pahlawan Ekonomi Nusantara adalah kegiatan peningkatan kemampuan berwirausaha fakir miskin dan kelompok rentan melalui pemberian penguatan usaha dan penguatan produksi.



Gambar 14. Pelaksanaan PENA Tahun 2022

Gambar 14 menjelaskan bahwa Indeks rata-rata dalam pemberian bantuan PENA per PM adalah sebesar Rp6.000.000,-. Jenis kewirausahaan yang dijalankan oleh masing-masing PM berbeda sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh PM sebagaimana gambar berikut:



Gambar 15. *Cluster* Usaha Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2022

Gambar 15 menjelaskan bahwa *cluster* PENA terdiri dari makanan, kerajinan, jasa pertanian dan peternakan. Pada tahun 2022, PENA yang dikelola oleh Dit. PKAT-KS telah menyalurkan dukungan pemberdayaan PENA berupa penguatan usaha kepada 4.765 PM atau 56,01% yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian calon PM menolak keluar dari Bantuan Sosial (PKH, BPNT/Sembako, Kombo). Realisasi capaian output tersebut berada pada persentase 93,45% dari target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Capaian Output dengan Target berdasarkan DIPA dan Perjanjian Kinerja

Target berdasarkan DIPA (TD)	Target berdasarkan Perjanjian Kinerja (TPK)	Realisasi Output (RO)	Persentase Realisasi Output pada Target DIPA $(RO/TD)*100$	Persentase Realisasi Output pada Perjanjian Kinerja $(RO/TPK)*100$
8.500 KPM	5.100 KPM	4.765 KPM	56,1%	93,45%

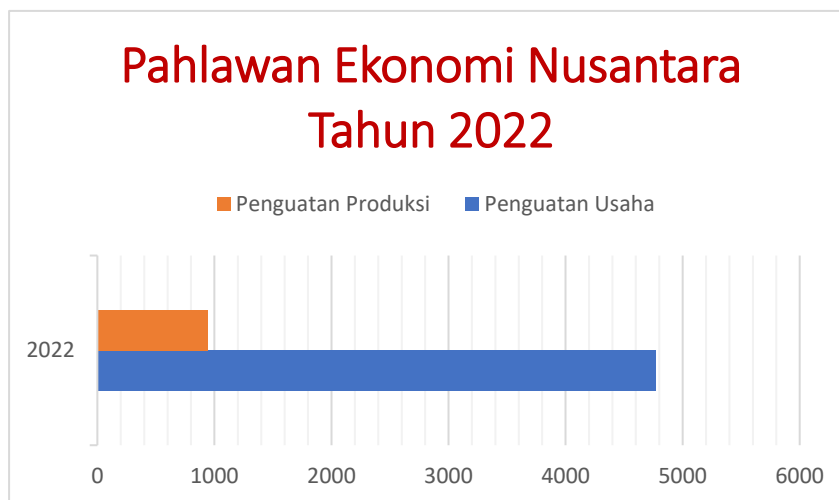


Proses pembelian barang penguatan usaha di Kota Kendari, Sulawesi Tengah



Barang Penguatan Usaha yang akan disalurkan kepada KPM di Kab. Lombok

Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen penguatan usaha dan penguatan produksi pada tahun 2022 juga memiliki realisasinya masing-masing. Penguatan usaha yang terdiri dari belanja barang untuk peralatan dan bahan yang dibelanjakan secara langsung oleh pendamping sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat terealisasi kepada seluruh 4.765 KPM di tahun 2022. Sedangkan untuk penguatan produksi terealisasi kepada 942 KPM sesuai dengan bagan berikut:



Gambar 15. Bagan Penyaluran Penguatan Usaha dan Penguatan Produksi PENA Tahun 2022

Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) pada tahun 2022 juga telah disalurkan di 26 Provinsi dan 145 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan gambar berikut:



Gambar 17. Wilayah Salur PENA Tahun 2022

Gambar 17 merupakan wilayah salur PENA sebanyak 168 Kabupaten/Kota yang tersebar di 11 Provinsi. Program PENA melibatkan berbagai stakeholder internal Kementerian Sosial dalam melakukan asesmen dan penyaluran. Pada lingkup internal Kementerian Sosial Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selaku penanggung jawab program dibantu oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos), Balai Diklat dan Poltek Kessos.

Kerjasama ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai pada masing-masing satker tersebut diatas dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan program PENA mulai dari proses asesmen sampai proses salur. Kemudian pertanggungjawaban lokasi PENA disesuaikan

dengan masing-masing wilayah Sentra/Sentra Terpadu. Pendamping Sosial dibawah koordinasi Ditjen Linjamsos melakukan pendampingan dalam seluruh rangkaian kegiatan PENA.

Hal ini menunjukkan bahwa di internal Kementerian Sosial sudah menjalankan program-program yang menysasar langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan secara terpadu. Pelibatan berbagai Sumber Daya Manusia (SDM) internal Kementerian Sosial membantu mengurangi resiko terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan program PENA.

Pelibatan *stakeholder* diluar Kementerian Sosial dengan melibatkan Aparat Pemerintahan Daerah mulai dari Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan/Desa>Nama Lain sampai dengan lingkup RT/RW dalam melakukan asesmen dan salur PENA. Dinas Sosial juga membantu melakukan sosialisasi terkait program PENA kepada masing-masing pemangku wilayah di lokasi penyaluran. Hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan program PENA di daerah.

PENA baru disosialisasikan di akhir Tahun 2022 telah berhasil meraih sukses yang masif. Awal kegiatan dilakukan dengan pertemuan daring melalui media *Zoom Meeting* dengan petugas sentra dan juga pendamping sosial yang mendampingi PM. Sosialisasi juga dilakukan oleh petugas salur pusat kepada Dinas Sosial pada masing-masing wilayah dengan melibatkan pendamping sosial. Pada pelaksanaan asesmen, Dinas Sosial, pendamping sosial, dan petugas sentra membantu memberikan penjelasan kepada para calon PM PENA.

Sosialisasi terhadap calon PM untuk menerima atau menolak PENA yang dilakukan secara masif, masih menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Hal ini adanya ketakutan dari calon PM terhadap penerimaan bantuan sosial akan dihentikan. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan respon cepat dari petugas yang turun langsung ke lokasi dan hadir pada saat penyaluran PENA dan melakukan klarifikasi kepada masyarakat.

IKK4.1 Persentase (%) KPM Kewirausahaan Sosial PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha

Target : 60%

Realisasi : 56,07%

93,45%

KPM yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha adalah PM yang mendapatkan pendampingan usaha dari pendamping sosial, sehingga usahanya dapat dikelola lebih baik dibandingkan sebelum mendapatkan PENA.

Kriteria keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan ini sebagai berikut:

- ✓ PM yang memiliki rintisan usaha kecil diperkuat dengan PENA
- ✓ PM mendapatkan pendampingan usaha dari pendamping sosial terkait keberlangsungan usaha

- ✓ PM meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha
- ✓ Usaha yang dikelola lebih baik dibandingkan sebelum mendapat pemberdayaan melalui pendampingan PENA
- ✓ PM memiliki Pendapatan berkelanjutan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada bantuan sosial.

Data Penyaluran PENA tahun 2022 sebanyak 4.765 PM atau 56,06 % dari 8.500 PM.

IKK4.2 Persentase (%) KPM Kewirausahaan Sosial PENA yang meningkat akses pemasarannya.

Target : 60%

Realisasi : 60%

100 %

KPM yang meningkat akses pemasarannya adalah PM PENA yang sudah terhubung dengan lembaga pemasaran. Selain itu, KPM yang meningkat akses pemasarannya merupakan PM yang memiliki jangkauan pemasaran lebih luas dibandingkan sebelum menerima PENA.

Kriteria Keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan ini sebagai berikut :

- ✓ KPM memiliki Pendapatan berkelanjutan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa mengandalkan bantuan sosial.
- ✓ KPM memiliki akses terhadap lembaga pemasaran.

Dari data penyaluran PENA tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa 60% KPM dapat menjangkau Lembaga Pemasaran, sehingga capaian kinerja PM PENA yang meningkat akses pemasarannya sebesar 100%.



Penyaluran Bantuan PENA di Kabupaten Temanggung – Jawa Tengah



Penyaluran Bantuan PENA di Kota Sibolga – Sumut

IKK4.3 Persentase (%) KPM Kewirausahaan Sosial PENA yang dapat mempertahankan usahanya.

Target : 60%
Realisasi : 81,52%

135,87%

KPM yang dapat mempertahankan usahanya adalah KPM PENA yang usahanya masih bertahan setelah melewati sampai dengan tahun pertama pendampingan.

Kriteria keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan ini sebagai berikut:

- ✓ KPM mampu mempertahankan usaha sampai dengan tahun pertama
- ✓ KPM memiliki pendapatan berkelanjutan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

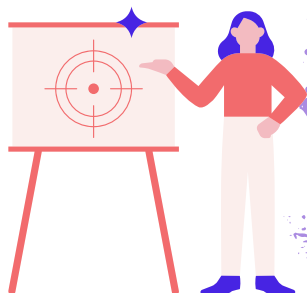
Data KPM yang mampu mempertahankan usahanya sampai dengan satu tahun sebanyak 81,52 %.



Penyaluran Bantuan PENA di Kab.
Lombok Tengah – NTB



Penyaluran Bantuan PENA di Kab.
Bulukumba – Sulsel



Sasaran Kegiatan 5

SK5. Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial

IKK5.1 Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial

Target : 90

Realisasi : 84,47

93,85%

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada TA 2022 telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Fokus sebelumnya terdapat pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian *output*. Tujuannya agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk *outcome* perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022.

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, dan penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun perubahan aspek dan indikator kinerja serta tatacara penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perubahan Aspek dan Indikator Kinerja

IKPA 2021	IKPA 2022
4 (empat) Aspek	3 (tiga) Aspek
1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%)	1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%)	2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%)	3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)	
13 (Tigabelas) Indikator Kinerja:	8 (delapan) Indikator Kinerja:
1. Revisi DIPA (5%)	1. Revisi DIPA (10%)

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) | 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) |
| 3. Pagu Minus (5%) | 3. Data Kontrak (10%) |
| 4. Data Kontrak (10%) | 4. Penyelesaian Tagihan (10%) |
| 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) | 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) |
| 6. LPJ Bendahara (5%) | 6. Dispensasi SPM (5%) |
| 7. Dispensasi SPM (5%) | 7. Penyerapan Anggaran (20%) |
| 8. Penyerapan Anggaran (15%) | 8. Capaian Output (25%) |
| 9. Capaian Output (17%) | |
| 10. Penyelesaian Tagihan (10%) | |
| 11. Retur SP2D (5%) | |
| 12. Pengembalian SPM (5%) | |
| 13. Perencanaan Kas (5%) | |

Sumber : <https://djp.kemenkeu.go.id>

Data pada tabel di atas menjelaskan perubahan aspek dan indikator kinerja dengan jumlah aspek dan indikator yang berkurang dengan bobot masing-masing aspek dan indikator yang meningkat.

Nilai IKPA Dit. PKAT-KS pada tahun 2022 merujuk pada nilai IKPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Hal ini disebabkan karena kebijakan satu DIPA pada unit kerja eselon I dan tidak ada lagi DIPA pada satuan kerja eselon II. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial pada tahun 2022 pada periode yang berakhir pada bulan Desember 2022 adalah sebesar 84,47. Nilai ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 90 atau hanya mencapai 93,85%. Restrukturisasi program dan anggaran sebagai implikasi dari perubahan OTK Kementerian Sosial serta perubahan kebijakan terkait pelaksanaan program/kegiatan, cut off anggaran yang berimplikasi pada pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, penyerapan anggaran, capaian output serta deviasi halaman III DIPA berpengaruh terhadap pencapaian nilai IKPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.



Sasaran Kegiatan 6

SK6. Meningkatnya kepuasan *stakeholders* terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial

IKK5.1 Nilai kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial

Target : 82
Realisasi : 78,48

95,7%

Tabel 6. Nilai Kepuasan Stakeholders terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial

No	Program	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat
1	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	3.09	77.14	Baik
2	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	3.18	79.50	Baik
3	Izin Tanda Daftar LKS Berskala Nasional	2.98	74.49	Cukup
4	Layanan Badan Usaha/CSR Kesejahteraan Sosial	2.86	71.43	Cukup
5	Layanan Bansos Sembako	3.19	79.78	Baik
6	Layanan BMN	3.86	96.43	Sangat Baik
7	Layanan Calon Penerima Satyalencana Kebaktian Sosial	3.11	77.68	Baik
8	Layanan Calon Perintis Kemerdekaan dan Usulan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan	3.21	80.36	Baik
9	Layanan Kearsipan	3.00	75.00	Cukup
10	Layanan Kehumasan	3.00	75.00	Cukup
11	Layanan Kesekretariatan Lainnya	2.86	71.43	Cukup
12	Layanan Komunitas Adat Terpencil	3.09	77.22	Baik
13	Layanan Pengusulan Calon Pahlawan Nasional	2.43	60.71	Kurang
14	Layanan Pilar-pilar Sosial	2.99	74.71	Cukup
15	Layanan Puskesmas/SLRT	2.95	73.79	Cukup
16	Layanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)	2.98	74.45	Cukup
17	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.13	78.30	Baik
18	Pelayanan Hukum	3.54	88.46	Sangat Baik
19	Perbendaharaan (Pelaksanaan dan Pengelolaan)	2.98	74.48	Cukup
20	Layanan Kewirausahaan Sosial (Pahlawan Ekonomi)	3.19	79.70	Baik

Nilai Kepuasan *Stakeholders* terhadap layanan Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial tahun 2022 sebesar 78,48 (Baik). Nilai ini merupakan penjumlahan dari Nilai Layanan Pemberdayaan KAT sebesar 77,22 (Baik) dan nilai Layanan Kewirausahaan Sosial sebesar 79,70 (Baik).

Jenis Layanan	Jumlah Responden	Pembobotan	Jumlah	%	Predikat
Pemberdayaan KAT	427	1319	1708	77,22	Baik
Kewirausahaan Sosial	1330	4240	5320	79,70	Baik

Unsur penilaian layanan meliputi: Sarana dan prasarana, Keramahan dan kesopanan, kompetensi, kecepatan, kemudahan, prosedur layanan, dan kesesuaian.

Analisis Capaian Kinerja

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil



Capaian kinerja pemberdayaan KAT khususnya terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial telah menysar kepada 3.500 target Keluarga KAT yang diberdayakan pada tahun 2022 atau mencapai target 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bantuan sosial pemberdayaan KAT melalui mekanisme *cash transfer* ke rekening pokmas untuk kemudian dilakukan transfer dan pembelanjaan di toko penyedia berikut penyaluran ke warga telah terlaksana di seluruh lokasi pemberdayaan KAT.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dengan mekanisme *cash transfer* meningkat seiring meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial pemberdayaan KAT.

Untuk melihat sejauhmana *outcome* dari bantuan sosial yang telah diberikan tersebut khususnya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan serta survei/kajian atas pencapaian hasil program pemberdayaan khususnya bantuan sosial yang telah disalurkan. Hal ini dilakukan agar bantuan sosial tidak hanya pada tataran penyaluran (*output*) tetapi harus juga pada tataran pemanfaatan (*outcome*) dan tataran dampak (*impact*) dari bantuan sosial terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga Komunitas Adat Terpencil.

Kewirausahaan Sosial

Sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022, maka analisis Capaian Kinerja PENA untuk 3 (tiga) sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. 93,45% KPM Kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan usaha yang dilakukan oleh Pendamping Sosial. Kegiatan diawali dengan pemberian motivasi dan sosialisasi kepada calon Penerima Manfaat PENA. Tujuan kegiatan agar PM PENA dapat meningkat keterampilan dalam berusaha dan terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diterimanya. Hasil yang dicapai/*outcome* kegiatan sebagai berikut: terlaksananya kegiatan pendampingan usaha; dengan indikator kinerja PM PENA dapat melaksanakan usahanya selaras dengan pendampingan yang diberikan oleh Pendamping Sosial meliputi pemberian motivasi dan sosialisasi PENA, penataan lingkungan usaha, dan penguatan produksi, yang pada akhirnya 93,45% meningkatnya keterampilan PM PENA dalam mengelola usaha.

2. 100% KPM Kewirausahaan PENA yang meningkat akses pemasarannya.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut meliputi pendampingan usaha yang dilakukan oleh Pendamping Sosial yang diawali dengan Pemetaan dan Asesmen Usaha calon PM PENA. Tujuan kegiatan agar PM PENA dapat menjalin kerjasama dan akses terbuka untuk usahanya dengan melibatkan Sentra/Sentra Terpadu dan Balai Diklat dalam melakukan asesmen kepada PM PENA. Hasil yang dicapai/*outcome* kegiatan sebagai berikut: terlaksananya kegiatan pemetaan dan asesmen kepada PM PENA agar teridentifikasi minat, bakat dan potensi Penerima PENA dan tersedia akses pemasaran bagi mereka; dengan indikator kinerja PM PENA dapat meningkat akses pemasaran usaha atau produksinya, yang pada akhirnya 100% PM PENA meningkat akses pemasarannya.

3. 135,87% KPM Kewirausahaan PENA yang dapat mempertahankan usahanya.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling tinggi pencapaiannya karena PM PENA memerlukan dukungan usaha dan penguatan produksi untuk mempertahankan usahanya.

Sebanyak 135,87% PM PENA dapat mempertahankan usahanya dengan kegiatan yang diawali dengan pemberian dukungan usaha sebesar Rp. 5.500.000,- per PM dan dukungan produksi sebesar Rp 500.000,- per PM. Tujuan kegiatan agar PM PENA dapat mengembangkan usahanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan diharapkan mandiri dan lepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Hasil yang dicapai/*outcome* kegiatan sebagai berikut: terlaksananya kegiatan pemberian dukungan usaha dan penguatan produksi; dengan indikator kinerja PM PENA dapat mempertahankan usahanya dan mengembangkan jenis produksinya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil



Sumberdaya yang digunakan dalam pemberdayaan KAT terdiri atas anggaran dan sumberdaya manusia pelaksana pemberdayaan baik di pusat dan daerah. Perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial dari menggunakan pihak penyedia menjadi *cash transfer* ke rekening pokmas telah meningkatkan kecepatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sekaligus efektifitas dan efisiensinya.

Peran penanggungjawab (*Person in charge*) pusat pada masing-masing lokasi untuk pendampingan dan pengawalan dilaksanakan mulai dari tahap administratif sampai dengan pertanggungjawaban sangat membantu dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pemberdayaan KAT.

Kewirausahaan Sosial

Penggunaan sumberdaya untuk mendukung kegiatan PENA terutama sumberdaya manusia dilakukan seefektif mungkin dengan melibatkan pihak internal lingkup Unit Teknis di lingkungan Kementerian Sosial RI dan eksternal meliputi Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian BAPPENAS, BRIN, Kementerian Keuangan, Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan/Desa>Nama Lain sampai dengan RT.RW.

Pelibatan tersebut dimulai dari penyusunan instrumen, petunjuk teknis sampai dengan kegiatan pemetaan, asesmen dan penyaluran PENA.

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil



Dinas Sosial Kabupaten berperan penting dalam pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan KAT, khususnya pada tataran pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di masing-masing lokasi serta memastikan bantuan sosial diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh warga KAT untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kapasitas dan kemandirian.

Dinas Sosial juga berperan penting dalam menjaring sinergi dan kerjasama lintas sektor khususnya program/kegiatan lintas OPD lingkup Kabupaten. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra pendampingan pemberdayaan KAT sebagai garda terdepan

pendampingan dan pengawalan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial oleh warga KAT di Lokasi. LKS ini pula yang menjadi mata dan telinga untuk menyerap aspirasi, permasalahan, serta berbagai aktivitas/kegiatan pendampingan lainnya serta terutama dalam pengawalan penyaluran bantuan sosial mulai dari tahap persiapan (penyusunan KAK, RAB, pembuatan rekening, dll), pelaksanaan penyaluran sampai dengan dokumentasi dan pertanggungjawaban.

Kewirausahaan Sosial



Keberhasilan Program PENA tidak terlepas dari adanya dukungan dari semua pihak yang masing-masing mempunyai peran penting dalam mengawal PENA dari proses awal sampai dengan akhir pelaksanaannya, beberapa point penting keberhasilan PENA adalah sebagai berikut :

1. Dukungan data

Data calon penerima PENA didukung sepenuhnya dari Direktorat Jaminan Sosial terkait dengan data Penerima PKH dan RST dan dari Direktorat Pemberdayaan kelompok Rentan terkait dengan data Penerima BPNT/sembako.

Data yang diperoleh dari direktorat teknis tersebut kemudian diproses lebih lanjut oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) untuk menjadi data calon penerima PENA yang menjadi sasaran untuk Asesmen sampai dengan proses penyaluran PENA.

2. Tim Kerja PENA

Tim kerja PENA cukup komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen SDM yang ada pada kementerian sosial, Tim PENA Pusat Dit PKAT & KS sementara untuk koordinator wilayah pelaksanaan PENA dibantu oleh Sentra/Sentra Terpadu/Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dan sebagai pendamping sosial lapangan adalah para Pendamping Program Keluarga Harapan.

Tim kerja ini melakukan proses Pelaksanaan PENA dari mulai Asesmen, Penyusunan Proposal, Revisi Proposal, Pra Kondisi Penerimaan Bantuan Sosial, Penyaluran sampai dengan melakukan monitoring dan evaluasi PENA.

3. Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menyambut baik kehadiran PENA dengan antusias mengingat program ini sangat penting menunjang pemberdayaan masyarakat di daerahnya untuk dapat memulai dan mengembangkan usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan bisa sepenuhnya tidak tergantung lagi pada bantuan sosial.

B. Realisasi Anggaran

6276 Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil



Belanja Barang

Pagu :
21,452,059,000

Realisasi :
20,617,433,938

96,11%



Bansos

Pagu :
59,625,000,000

Realisasi :
59,585,000,000

99,93%

98,92%

6883 Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial



Belanja Barang

Pagu :
48,458,576,000

Realisasi :
33,270,732,500

68,66%



Bansos

Pagu :
4,250,000,000

Realisasi :
471,000,000

11,08%

64,02%

Total Realisasi Anggaran



Belanja Barang

Pagu :
69,910,635,000

Realisasi :
53,888,166,438

77,08%



Bansos

Pagu :
63,875,000,000

Realisasi :
60,056,000,000

94,02%

85,17%

Gambar 17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022



Tabel 7. Rekapitulasi Bansos Pemberdayaan KAT Tahun 2022

DETAIL BANSOS	JUMLAH	INDEKS	ANGGARAN
- Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	3,500 KK	5.000.000	17.500.000.000
- Bantuan Balai Sosial	41 Lokasi	200.000.000	8.200.000.000
- Bantuan sarana air bersih dan MCK	44 Lokasi	200.000.000	8.800.000.000
- Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan	40 Lokasi	100.000.000	4.000.000.000
- Bantuan Stimulan Penghidupan Berkelanjutan	37 Kelompok	25.000.000	875.000.000
- Bantuan Stimulan Permukiman Sosial	402 KK	50.000.000	20.150.000.000
- Bantuan Sarana Dukungan Community Center	11 Lokasi	100.000.000	1.100.000.000
TOTAL			60.625.000.000

Tabel 8. Rekapitulasi Realisasi Bansos Pemberdayaan KAT Tahun 2022

DETAIL BANSOS	JUMLAH	INDEKS	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA (Rp.)	REALISASI TARGET	SISA TARGET
- Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	3.500 KK	5.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	100,00	-	3.500 KK	-
- Bantuan Balai Sosial	41 Lokasi	200.000.000	8.200.000.000	8.120.000.000	99,76	20.000.000	41 Unit/Lokasi	-
- Bantuan sarana air bersih dan MCK	44 Lokasi	200.000.000	8.800.000.000	8.780.000.000	99,76	20.000.000	44 Unit/Lokasi	-
- Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan	40 Lokasi	100.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00	-	40 Unit/Lokasi	-
- Bantuan Stimulan Penghidupan Berkelanjutan	37 Klp	25.000.000	925.000.000	925.000.000	100,00	-	37 Kelompok	-
- Bantuan Stimulan Permukiman Sosial	402 KK	50.000.000	20.100.000.000	20.100.000.000	100,00	-	402 Unit/KK	-
- Bantuan Sarana Dukungan Community Center	11 Lokasi	100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	100,00	-	11 Lokasi	-
TOTAL			60.625.000.000	60.525.000.000	99,84	40.000.000*		

Tabel 9. Rekapitulasi Realisasi Bantuan Hunian Tetap (Huntap)

DETAIL BANTUAN	JUMLAH	INDEKS	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA (Rp.)	REALISASI TARGET	SISA TARGET
- Bantuan isi Hunian Tetap	3.402 KK	2.500.000	8.505.000.000	8.505.000.000	100,00	-	3.402 KK	-

Ket:

*Bantuan sarana dukungan *community center* sebesar Rp.1.000.000.000 (10 Unit@Rp.100.000.000) telah terrealisasi pada DIPA OTK Lama.

*Anggaran Bansos pada DIPA OTK Baru sebesar Rp.59.625.000.000 (60.625.000.000-1.000.000.000)

*Sisa anggaran bantuan sosial yang tidak terrealisasi sebesar Rp. 40.000.000 (upah tukang pembangunan sarana lingkungan yang tidak disalurkan karena *force majeure* (konflik sosial) di Kabupaten Dogiyai, Papua)

* Bantuan Isi Hunian Tetap disalurkan kepada 3.402 KK (Kecuali KAT di Kabupaten Dogiyai sebanyak 98 KK)

Tabel 10. Rekapitulasi Realisasi Anggaran PENA

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Safeguarding:			
- Pemetaan	372.450.000	352.460.000	94,63%
- Sosialisasi	686.838.000	660.374.890	96,15%
- Asesmen	4.349.294.000	4.184.004.930	96,20%
- Penyaluran Bantuan PENA	2.969.800.000	2.678.565.000	90,19%
- Koordinasi Lintas Sektor	383.340.000	298.638.269	77,90%

Tabel 11. Rekapitulasi Bantuan PENA

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Penguatan Usaha	46.750.000.000	26.213.000.000	56,43%
Penguatan Produksi	4.250.000.000	471.000.000	11,08%



Bab **IV** Penutup



Kesimpulan



Rencana Tindak Lanjut

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial selama tahun 2022. Pencapaian Direktorat Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial secara umum telah memperlihatkan pencapaian target sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dan ditindaklanjuti dari pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan



1. Secara umum pencapaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan KAT telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan capaian sasaran kegiatan diatas 90% untuk Pemberdayaan KAT dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
2. Capaian kinerja sasaran kegiatan dicapai melalui masing-masing indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persentase (%) Warga KAT yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar
- b. Persentase (%) Warga KAT yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial
- c. Persentase (%) Penerima Manfaat Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya
- d. Persentase (%) Warga KAT yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya
- e. Nilai IKPA Dit.Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial
- f. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial

3. Pelaksanaan PENA tahun 2022 meskipun merupakan program baru di Kementerian Sosial namun mendapatkan sambutan yang cukup baik dari Pemerintah Daerah, para

Pendamping Sosial dan PM PENA untuk melakukan rintisan dan pengembangan usaha agar tidak mempunyai ketergantungan yang besar terhadap bantuan sosial.

Kendala PENA

1. Sebagian besar KPM Bansos menolak PENA karena bbrp hal, diantaranya masih mempunyai balita dan anak sekolah, belum siap berusaha, tidak tahu mau usaha apa, dilarang suami, dsb.
2. Waktu yg terbatas dalam pelaksanaan PENA, sehingga jumlah jangkauan KPM dan lokasi tidak maksimal.
3. Penyaluran penguatan produksi mengalami hambatan krn terbatasnya tanggal waktu pengajuan anggaran.
4. Adanya potongan pajak dari Belanja Penguatan Usaha yg masuk dlm Akun 52, tidak semua masyarakat dan toko memahami, sehingga mengalami hambatan dalam pembelian barang dan pertanggung jawaban.

Upaya Pemecahan masalah PENA:

1. Memaksimalkan KPM yang bersedia menerima PENA dengan memberikan motivasi dan pendampingan.
2. Memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menjadi contoh dan dapat menarik anggota masyarakat lainnya.
3. Memaksimalkan pengajuan sesuai dengan waktu yang diberikan, walaupun tidak semua KPM menerima bantuan penguatan produksi dan akan dicoba diajukan Kembali tahun 2023.
4. Memberikan surat tertulis mengenai keterangan pajak kepada pihak yang berkepentingan.

B. Rencana Tindak Lanjut



1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan KAT sehingga dapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi;
2. Pelaksanaan pemberdayaan KAT ke depan akan dilakukan secara kolaboratif antara Dit. Pemberdayaan KAT dengan pemda dan LKS/Orsos di daerah sebagai salah satu langkah percepatan pemberdayaan;
3. Lebih selektif dalam memilih LKS pendamping KAT untuk mengawal, memfasilitasi pokmas dalam mengoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan bantuan stimulan pembangunan rumah/BBR dan bantuan stimulan lainnya (jadup, bibit, peralatan kerja dan peralatan rumah tangga);
4. Pengembangan konsep *community center* dalam pemberdayaan KAT agar dapat memperluas jangkauan layanan sosial.

5. Peningkatan kualitas sumber daya pendamping sosial, warga dan petugas pengelola kegiatan KAT melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan langsung; Efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan akan lebih ditingkatkan untuk pencapaian tujuan pemberdayaan.
6. Pelaksanaan sosialisasi kepada semua *stakeholder* PENA masih diperlukan mengingat di lapangan masih ditemui beberapa pihak belum mempunyai *persepsi* yang sama tentang substansi PENA.
7. Akuntabilitas pelaksanaan penyaluran bantuan peningkatan usaha dan produksi perlu diperbaiki mengingat masih terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan.
8. Penajaman SOP PENA dengan mengakomodir beberapa kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan PENA tahun 2022.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial dengan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 (OTK Baru)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Supena

Jabatan : Plh. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan
Kewirausahaan Sosial

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Edi Suharto

Jabatan : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

Edi Suharto

Pihak Pertama,
Plh. Direktur Pemberdayaan Komunitas
Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial

I Ketut Supena

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
(1)	(2)		(3)
SK1. Terpenuhiya Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan Psikososial dan atau akses Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan bagi Warga KAT	IKK1.1	Persentase (%) Warga KAT yang terpenuhi Pangan dan Gizi, Sandang, Tempat Tinggal, Dukungan Psikososial dan atau akses Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan	100%
SK2. Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	IKK2.1	Persentase (%) Warga KAT yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial	80%
SK3. Meningkatnya pendapatan Warga KAT	IKK3.1	Persentase (%) Warga KAT yang meningkat pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha	50%
SK4. Meningkatnya pendapatan KPM Kewirausahaan Sosial PENA secara berkelanjutan melalui pelaksanaan dan pengembangan usaha	IKK4.1	Persentase (%) KPM Kewirausahaan Sosial PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha	60%
	IKK4.2	Persentase (%) KPM Kewirausahaan Sosial PENA yang meningkat akses pemasarannya	60%
	IKK4.3	Persentase (%) KPM Kewirausahaan Sosial PENA yang dapat mempertahankan usahanya	60%
SK5. Nilai IKPA Dit.Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial	IKK5.1	Nilai IKPA Dit.Pemberdayaan KAT dan Kewirausahaan Sosial	90
SK6. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	IKK6.1	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat PKAT dan Kewirausahaan Sosial	82

Program/Kegiatan	Anggaran	
Program Perlindungan Sosial	Rp	140.539.635.000
6276. Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Rp	81.077.059.000
6883. Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial	Rp	59.462.576.000
<i>Jumlah</i>	Rp	140.539.635.000

Jakarta, Oktober 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Edi Suharto

Pihak Pertama,
Plh. Direktur Pemberdayaan Komunitas
Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial



I Ketut Supena

- Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 (OTK Lama)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Safii Nasution

Jabatan : Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Edi Suharto

Jabatan : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial

Edi Suharto

Pihak Pertama,
Direktur Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil

Muhamad Safii Nasution

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL**

SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (2)		TARGET (3)
SK1. Meningkatnya Taraf Sosial Ekonomi Keluarga Miskin Dan Rentan	IKK1.1	Persentase (%) Warga KAT yang memiliki tambahan sumber mata pencaharian	46,29%
	IKK1.2	Persentase (%) Warga KAT yang memiliki NIK	100%
	IKK1.3	Persentase (%) Warga KAT yang diusulkan oleh Pemda untuk didaftarkan Di DTKS	100%
SK2. Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	IKK2.1	Nilai IKPA Dit. Pemberdayaan KAT	87
	IKK2.2	Nilai SAKIP Dit. Pemberdayaan KAT	81

Program/Kegiatan	Anggaran	
Program Perlindungan Sosial	Rp	81.077.059.000
6276. Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Rp	81.077.059.000
<i>Jumlah</i>	Rp	81.077.059.000

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Edi Suharto

Pihak Pertama,
Direktur Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil



Muhamad Safii Nasution

SK Penetapan KPM Bantuan Sosial Program Pemberdayaan KAT Tahun Anggaran 2022



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
JALAN SALEMBA RAYA No. 28 JAKARTA PUSAT
TELEPON : 3103591 – 3103679 LAMAN : <http://www.kemsos.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
NOMOR : ~~338~~5.3/KPTS/07/2022
TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2022**

DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2022
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Upaya Penanganan FakirMiskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
9. Peraturan Menteri Sosial No 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
10. Peraturan Menteri Sosial No 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 159/HUK/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-027.03.1.440193/2022 Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN ANGGARAN 2022
KESATU	: Mengesahkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	: Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berasal dari usulan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten, dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
KETIGA	: Perbaikan data keluarga penerima manfaat oleh pemerintah daerah dapat dilakukan sepanjang bantuan sosial belum dilakukan penyaluran dengan membuat berita acara perbaikan data dengan tetap memperhatikan kriteria / syarat penerima bantuan sosial Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
KEEMPAT	: Perbaikan data sebagaimana diktum ketiga, tidak merubah / mengganti SK ini, melainkan melalui perbaikan/update data pada lembar lampiran keputusan sesuai dengan berita acara perbaikan data dari pemerintah daerah.
KELIMA	: Jenis bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan tahun pemberdayaan ke I, II dan III, berupa Bantuan Stimulan Pemberdayaan Sosial
KEENAM	: Penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening kelompok setelah keluarga penerima manfaat membentuk kelompok dan menandatangani naskah perjanjian kerja sama.
KETUJUH	: Dalam melaksanakan proses pencairan dan pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana diktum keenam, penerima manfaat sebagai anggota kelompok mendapatkan pendampingan sosial dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ditunjuk, dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten.
KEDELAPAN	: Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 1 Juli 2022

DIREKTUR
PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL DAN
KEMERUSAHAAN SOSIAL



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
2. Inspektur Jenderal Bidang Dayasos
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
5. Ketua LKS Pendamping Program PKAT

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
NOMOR: 338/5.3/KPTS/07/2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN KESATU 2022

NO.	PROVINSI	NAMA LOKASI	JUMLAH (KK)
1	Aceh	Desa Lawe Sekhakut, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara	65
2	Sumatera Utara	Dusun 3 dan Dusun 4, Desa Humenesihenasi dan Fabaliwa Oyo, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara	48
3	Sumatera Selatan	Dusun 7 Desa Tanjung Agung, Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang	51
4	Sumatera Barat	Simasoro, Desa Simasoro, Kec. Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	75
5	Riau	Parit Tiga, Desa Batinsuir, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti	30
6		Dusun III Cemaning, Desa Semukut, Kec. Pulau Merbau, Kab. Kepulauan Meranti	40
7	Kalimantan Tengah	Tumbang Sabetung, Desa Tumbang Sabetung, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan	52
8		Rantau Pandan, Desa Rantau Pandan, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	40
9	Kalimantan Barat	Dukuh baban poring, Desa Melana, Kec. Nanga Sokan, Kab. Melawi	48
10		Dukuh Domit Permai, Desa Melana, Kec. Nanga Sokan, Kab. Melawi	23
11		Dukuh Pako Seman, Desa Keluing Taja, Kec. Nanga Sokan, Kab. Melawi	36
12		Nanga Jengonoi, Desa Nanga Menakon, Kec. Ambalau, Kab. Sintang	35
13	Kalimantan Timur	Maluang, Desa Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	80
14	Kalimantan Selatan	Hambawang Dilantak, Desa Marajai, Kec. Halong, Kab. Balangan	54
15		Mindai dan Pacung, Desa Datar Batung, Kec. Batang Alai Timur, Kab. Hulu Sungai Tengah	27
16	Sulawesi Tenggara	Walepa, Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna	43
17		Terapung, Desa Telaga Baru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton	91

NO.	PROVINSI	NAMA LOKASI	JUMLAH (KK)
18		Marauang, Desa Wasuamba, Kec. Lasalimu, Kab. Buton	41
19	Sulawesi Selatan	Kassi-Kassi dan Parang Labua, Desa Kayu Loc, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng	52
20		Ta'ba, Desa Batu Alu, Kec. Sanggala Selatan, Kab. Tana Toraja	50
21	Gorontalo	Iloheluma, Desa Iloheluma, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara	50
22		Damahu, Desa Zuriati, Kec. Manano, Kab. Gorontalo Utara	54
23	Sulawesi Barat	Tanete, Desa Lenggo, Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar	53
24	Maluku	Darlele, Desa Wapsalit, Kec. Lolong Guba, Kab. Pulau Buru	40
25		Kotbesy, Desa Waclo, Kec. Wacata, Kab. Pulau Buru	50
26	Maluku Utara	Kulojaya, Desa Kulojaya, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah	21
27		Dusun Kayu Banggai, Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan Kab. Pulau Taliabu	18
28		Wayo Koding, Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kepulauan Taliabu	40
29		Wayo Panga, Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kepulauan Taliabu	25
30		Nggoli, Nggoli, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kepulauan Taliabu	40
31	NTT	Matakapore, Desa Matakapore, Kec. Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya	97
32	NTB	Ladan, Desa Baturotok, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa	28
33		Saranae, Desa Laju, Kec. Langgudu, Kab. Bima	50
34	Papua	Soskoteke, Desa Soskoteke, Kec. Kaureh, Kab. Jayapura	17
35		Kwarya, Desa Kwarya, Kec. Yapsi, Kab. Jayapura	31
36		Kamdera, Desa Kamdera, Kec. Demta, Kab. Jayapura	29
37		Bubis, Desa Bubis, Kec. Soator, Kab. Asmat	51
38		Kapayap III, Desa Kapayap III, Kec. Koroway Buluanop, Kab. Asmat	37
39		Pugatadi, Desa Pugatadi, Kec. Kamu Utara, Kab. Dogiyai	55
40		Widimei, Desa Tigi Barat, Kec. Tigi Barat, Kab. Deiyai	35
41	Papua Barat	Syabes, Desa Syabes, Kec. Roon, Kab. Teluk Wondama	78
TOTAL			1.880

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
NOMOR: 338/5.3/KPTS/07/2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN KEDUA 2022

NO.	PROVINSI	NAMA LOKASI	JUMLAH (KK)
1	Aceh	Dusun Seunong Bakti, Desa Gle Putoh, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	43
2	Sumatera Barat	Malacan Timur, Malacan, Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	48
3		Dusun Malacan, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep Mentawai	100
4		Maonai dan Panasalat, Ds. Bubuakenen dan Ds. Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	63
5	Riau	Sukajadi, Desa, Selensen, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir	27
6		Dusun I, Desa Tanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti	25
7		Dusun II, Desa Tanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti.	27
8	Kalimantan Tengah	Dusun Sei Bahinai, Desa Lawang Tamang, Kec. Mandau Telawang, Kab. Kapuas	51
9		Dusun Teluk Lahung, Desa Masupa Ria, Kec. Mandau Telawang, Kab. Kapuas	57
10		Lokasi Tambelum, Desa Tambelum, Kec. Sungai Babuat, Kab. Murung Raya	51
11	Sulawesi Utara	Laotongang, Laotongang, Kec. Tabukan Selatan, Kab. Kepulauan Sangihe	30
12		Saa'cu dan Siraat, Desa Riung Utara dan Dapihe, Kec. Tampar Amma, Kab. Kepulauan Talaud	60
13	Sulawesi Barat	Tameoro, Desa Besoangin Utara, Kec. Tubbi Taramanu, Kab. Polewali Mandar	42
14		Dusun Biru, Desa Patambana, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar	55
15	Maluku	Sikelem, Desa Ulahahan, Kec. Teluti, Kab. Maluku Tengah	9
16		Waekibo, Desa Waehata, Kec. Waelata, Kab. Buru ,	21
17		Tampai, Desa Waehata, Kec. Waelata, Kab. Buru.	55
18		Ngade, Desa Waeflan, Kec. Waelata, Kab. Buru	50

NO.	PROVINSI	NAMA LOKASI	JUMLAH (KK)
19	Maluku	Waeula, Desa Waimasing, Kec. Waemasa, Kab. Buru Selatan.	49
20	Nusa Tenggara Barat	So Laju, Desa, Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima	30
21		Tambora, Desa Oibura, Kec. Tambora, Kab. Bima.	51
22	Sulawesi Selatan	Dassi - Dassi, Desa, Lembang Talimbangan, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara.	50
23	Papua	Lules, Desa Lules, Kec. Towe, Kab. Keerom	25
24		Wie, Desa Milki, Kec. Towe, Kab. Keerom.	42
25		Atre, Desa Lules, Kec. Towe, Kab. Keerom.	24
26		Onam II, Desa Onam, Desa Kesnar, Kab. Keerom.	24
27		Iwang, Desa Klaisu, Kec. Gresi Selatan, Jayapura.	56
28		Bangai, Desa Bangai, Kec. Gresi Selatan, Kab. Jayapura.	35
29		Aun, Desa Binguin Progo, Kec. Kemtuk, Kab. Jayapura.	42
30		Skory, Desa Skory, Kec. Kemtuk, Kab. Jayapura.	19
31		Pagai, Desa Pagai, Kec. Airu, Kab. Jayapura.	57
32		Gakokebo, Distrik Tigi Barat, Kec. Tigi Barat, Kab. Deiyai	42
33	Papua Barat	Kampung Kurey, Kampung Kurey, Kec. Nikiwar, Kab. Teluk Wondama.	44
34	Maluku Utara	Dusun Pantau Dan Ngong Wayo, Desa Wahe, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu	69
TOTAL			1.473

LAMPIRAN III KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
NOMOR: 338/5.3/KPTS/07/2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR LOKASI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
TAHUN KETIGA 2022

NO.	PROVINSI	NAMA LOKASI	JUMLAH (KK)
1	Sumatera Barat	Maonai dan Panasalat, Ds. Bubuakenen dan Ds. Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	48
2	Papua	Ayak, Desa Ayak, Kec. Korowai Bulmanop, Kabupaten Asmat	35
3		Godide, Desa Godide, Kec. Kammu Utara, Kab. Dogiyai.	43
4		Semografi, Desa Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	21
TOTAL			147

SK Penetapan LKS dalam Pendampingan Warga Komunitas Adat Terpencil Tahun 2022



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430
TELEPON 021-3103591 LAMAN: <http://www.kemsos.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL
NOMOR : *345* /5.3/PB.05.04/07/2022**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)
DALAM PENDAMPINGAN WARGA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
TAHUN 2022**

**DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, mengamanatkan pemberdayaan KAT harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan oleh berbagai pemangku kepentingan Pusat, Daerah, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2022, dipandang perlu menetapkan mitra kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil tentang penetapan lembaga kesejahteraan sosial pendamping warga Komunitas Adat Terpencil Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN KEWIRAUSAAN SOSIAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) DALAM PENDAMPINGAN WARGA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2022. |
| KESATU | : Melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berbasis <i>stakeholder</i> Tahun 2022. |

- KEDUA : Pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Berbasis *Stakeholder* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di seluruh lokasi pemberdayaan KAT.
- KETIGA : Kepada masing-masing LKS sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mendapatkan biaya operasional Lembaga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per LKS per lokasi, ditambah dengan biaya operasional pendampingan sebanyak jumlah KK yang didampingi dengan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per KK.
- KEEMPAT : Penetapan LKS didasarkan atas seleksi dan rekomendasi dari Dinas/Instansi Sosial Provinsi maupun Kabupaten dimana LKS tersebut berkedudukan.
- KELIMA : Penetapan LKS sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Juli 2022

DIREKTUR

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial
3. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
4. Dinas Sosial Provinsi Pelaksana Program PKAT.
5. Dinas Sosial Kabupaten Pelaksana Program PKAT
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

NOMOR : 345 /5.3/PB.05.04/07/2022
TANGGAL : 4 JULI 2022
TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)
DALAM PENDAMPINGAN
WARGA KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) TAHUN 2022

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampingan	Jumlah KK
1	Aceh	Peduli Dhuafa Jl. Samudera No. 56 Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	1 Lok. Dusun Seunong Bakti, Desa Gle Putoh, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	43 KK
			2 Lok. Lae Sekhakut, Desa Sekhakut, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara	65 KK
2	Sumatera Utara	PELMAS BNKP (Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Banua Niha Keriso Protestan) Jl. Soekarno No. 22 Gunung Sitoli, Nias Utara	1 Lok. Dusun 3 dan 4, Desa Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara	48 KK
3	Sumatera Barat	Yayasan Kirekat Indonesia, Jl. Ikan Arwana No. 31 Kota Padang	1 Lok. Malacan Timur, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep.Mentawai	48 KK
			2 Lok. Dusun Malacan, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep.Mentawai	100 KK
		LKSA KAUM (Kaum Abadi Untuk Mentawai), Jalan Raya Tuapeijat KM 1. Dusun Karoniet Desa Tuapeijat, Kec. Sipora Utara	1 Lok. Maonai dan Panasalat II, Desa Pasakiat Talleleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kep.Mentawai	63 KK
			2 Lok. Maonai dan Panasalat I, Desa Pasakiat Talleleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kep.Mentawai	48 KK
			3 Lok. Mauku/Simasoro, Desa Saibi Samunkop, Kec. Siberut Tengah, Kab. Kep. Mentawai	75 KK

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampingan	Jumlah KK
4	Sumatera Selatan	LKS Kasih Ibu Dusun 11 Talang Padang Desa Tanjung Kupang Baru Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang	1 Lok. Dusun VI dan Dusun VII, Desa Tanjung Agung, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang	51 KK
5	Riau	Komunitas Emak Sehat, Jl. Veteran No. 72 Tembilahan	1 Lok. Sukajadi, Desa Selensen, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir	27 KK
		Yayasan Anak Pulau Selatpanjang, Jl. Dorak Gg. Khalifah, Kepulauan Meranti	1 Lok. Dusun I, Desa Tanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti	25 KK
			Lok. Dusun II, Desa Tanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti	27 KK
			2 Lok. Parit Tiga, Desa Batin Suir, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kep. Meranti	30 KK
			3 Lok. Dusun III Cemaning, Desa Semukut, Kec. Pulau Merbau, Kab. Kep. Meranti	40 KK
6	Kalimantan Tengah	Tulus Hati Jln. Pantai Qamara Labat 11 No. 132 Kel. Palrandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangkaraya	1 Lok. Dusun Sei Bahinai, Desa Lawang Tamang, Kec. Mandau Telawang, Kab. Kapuas	51 KK
			2 Lok. Dusun Teluk Lahung, Desa Masupa Ria, Kec. Mandau Telawang, Kab. Kapuas	57 KK
			3 Lok. Tambelum, Desa Tambelum, Kec. Sungai Babuat, Kab. Murung Raya	51 KK
		Mutlari Hati Palangkaraya Jl. Mendawai Komsos No. 24 RT 06 RW 07 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Palangkaraya	1 Lok. Tumbang Sabetung, Desa Tumbang Sabetung, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan	52 KK
			2 Lok. Rantau Pandan, Desa Rantau Pandan, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	40 KK

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampingan		Jumlah KK
7	Kalimantan Timur	Gayam Rescue Team Jalan H Isa II, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redep, Kab. Berau,	1	Lok. Maluang, Desa Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	80 KK
8	Kalimantan Barat	LKS Pejuang Subuh Desa Kelakik, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi	1	Lok. Dukuh Baban Poring, Desa Melana, Kec. Nanga Soka, Kab. Melawi	48 KK
			2	Lok. Dukuh Domit Permai, Desa Melana, Kec. Nanga Soka, Kab. Melawi	23 KK
			3	Lok. Dukuh Pako Seman, Keluing Taja, Kec. Nanga Soka, Kab. Melawi	36 KK
		Yayasan Cahaya Menara Kasih Sintang Jl. Akcaya II Blok B No. 10 Kel. Alai, Kec. Sintang, Kab. Sintang	1	Lok. Dusun Jengonoi, Desa Nanga Menakon, Kec. Ambalau, Kab. Sintang	35 KK
9	Kalimantan Selatan	LKS-LU Al Tamar Jl. Junjung bulih Rt 07/RW 02 Kel. Batu Piring, Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan	1	Lok. Hambalang Dilantik, Desa Marajai, Kec. Halong, Kab. Balangan	54 KK
		LKS Lazismu Hulu Sungai Tengah Jl. Brigjend H. Hasan Basri Komp. PU, Kel. Barabai Selatan, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah	1	Lok. Mindai dan Pacung, Desa Datar Batung, Kec. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Tengah	27 KK
10	Sulawesi Utara	Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Utara , Jl. Raya Mapanget No.1, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara	1	Lok. Laotongang, Laotongang, Kec. Tabukan Selatan, Kab. Kep. Sangihe	30 KK
		Maritime and Indigineous Culture Research Center , Jl. 5 September II No. 24 Lingk. II Malayang I, Manado	1	Lok. Sacu'u dan Siraat, Desa Riung Utara dan Dapihe, Kec. Tampar Amma, Kab. Kep. Talaud	60 KK

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampingan		Jumlah KK
11	Sulawesi Barat	Malaqbi Coorporation, Jl. Gatot Subroto No. Lingkungan Germas Kel. Madatte Kab Polewali Mandar	1	Lok. Tameoro, Desa Besoangin Utara, Kec. Tubbi Taramanu, Kab. Poliwali Mandar	42 KK
			2	Lok. Dusun Bira, Desa Patambana, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar	55 KK
		Global Riset dan Pemberdayaan Jl. Sila-sila Kompleks S.Mengga, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman	1	Lok. Tanete, Desa Lenggo, Kec. Bulu, Kab. Polman	53 KK
12	Sulawesi Selatan	Aman Toraya Jl. Taruna No. 26 Rantepao	1	Lok. Dassi-Dassi, Desa Lembang Talimbangan, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara	50 KK
			2	Lok. Ta'ba, Desa Batu Alu, Kec. Sanggala Selatan, Kab.Tana Toraja	50 KK
		LKSA Al-Burhaan Jl. Permandian Ermes, Desa Londrong Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng	1	Lok.Kassi-Kassi dan Parang Labua, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng	52 KK
13	Sulawesi Tenggara	Yayasan Ortiz Aldzikri Sowite Jl. Tupai, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna		Lok. Walepa, Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna	43 KK
		LKSPD Ar-Rohman Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton		Lok. Dusun Terapung dan Dusun Bone Baru, Desa Talaga Baru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton	91 KK
		LKSA Maqidha Dusun 2 Lasalimu, Desa Lasalimu, Kec. Lasalimu Selatan, Kab. Buton		Lok. Maranuang dan Dusun Hondolu, Desa Wasuamba, Kec. Lasalimu, Kab. Buton	41 KK
14	Gorontalo	LKS Fatmawati Jl. Trans Sulawesi Desa Didingga, Kec. Biau Kab. Gorontalo Utara	1	Lok. Iloheluma, Desa Iloheluma, Kec. Anggrek , Kab. Gorontalo Utara	50 KK
			2	Lok. Damahu, Desa Zuriati, Kec. Manano, Kab. Gorontalo Utara	54 KK

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampungan	Jumlah KK
15	Maluku	Yayasan Al-Ishlah Bondowoso, Desa Waetina Rt.08 Rw.03 Kec. Waeapo Kab. Buru	1 Lok. Darlele, Desa Wapsalit, Kec. Lolong Guba, Kab. Pulau Buru	40 KK
			2 Lok. Kotbesy, Desa Waelo, Kec. Waelata, Kab. Pulau Buru	50 KK
			3 Lok. Ngade, Desa Waeflan, Kec. Waelata, Kab. Buru	50 KK
			4 Lok. Waikebo, Desa Waehata, Kec. Waelata, Kab. Buru	21 KK
			5 Lok. Tumpai Desa Waehata, Kec. Waelata, Kab. Buru	55 KK
		Kompas Maluku Tengah, Jl. Chamar Rt. 14 Kel. Namaelo, Masohi	1 Lok. Sikelem, Desa Ulahahan, Kec. Teluti, Kab. Maluku Tengah	9 KK
		LKSA Anthon Kleden, Jl. Anton Kleden No. 5 Desa Masnana, Kec. Namrole, Buru Selatan	1 Lok. Waeula, Desa Waimasing, Kec. Waemasa, Kab. Buru Selatan	49 KK
16	Maluku Utara	Yayasan The Tebings, Perumahan Griya Majeng Asri Blok B No.1, Kel. Ngade, Kec. Temate Selatan, Kota Temate, Maluku Utara	1 Lok. Dusun Pantau Dan Ngong Wayo, Desa Wahe, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu	69 KK
			2 Lok. Wayo Koding, Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kep. Taliabu	40 KK
			3 Lok. Wayo Panga Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kep. Taliabu	25 KK
			4 Lok. Nggoli, Desa Nggoli, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kep. Taliabu	40 KK
		Yayasan Dina Santo Yosep	Lok. Gamlaha, Desa Gamlaha, Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara	18 KK
		Yayasan The Tebings Perumahan Griya Majeng Asri Blok B No.1, Kel. Ngade, Kec. Temate Selatan, Kota Temate, Maluku Utara	Lok. Kulo Jaya, Desa Kulo Jaya, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah	21 KK

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampingan	Jumlah KK
17	Nusa Tenggara Barat	FSPB Indonesia, Desa Gontar RL01, Rw.03 Kec. Alas Barat, Sumbawa Besar	1 Lok. Dusun Ladan (Bukit Tinggi), Desa Batu Rotok, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa	28 KK
		Yayasan Insan Cita Bima Desa Sondo, Kec. Monta, Kab. Bima	1 Lok. So Pali Na'e, Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima	30 KK
			2 Lok. Sara Na'e, Desa Laju, Kec. Langgudu, Kab. Bima	50 KK
		LKS Berkah Jl. Lintas Woro MAdapangga Rt 001/001 Desa Tonda, Kec. Madapangga, Kab. Bima	1 Lok. Oi Bura, Desa Oi Bura, Kec. Tambora, Kab. Bima	51 KK
18	Nusa Tenggara Timur	LKSA Hati Nurani Sumba Jl. Trans Kodi, Kioloko, Desa Watu Kawula, Kec. Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	1 Lok. Matakapore, Desa Matakapore, Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya	97 KK
19	Papua	Biro Konsultasi Pengembangan Masyarakat Adat Papua Barat (BIKPEMAP), Jl. Kesehatan Abepura, Jayapura	1 Lok. Wie, Desa Milki, Kec. Totwe, Kab. Keerom	42 KK
			2 Lok. Atre, Desa Milki, Kec. Totwe, Kab. Keerom	24 KK
			3 Lok. Lules, Desa Lules, Kec. Totwe, Kab. Keerom	25 KK
			4 Lok. Onam II, Desa Onam, Kec. Kaisenar, Kab. Keerom	24 KK
		Yayasan Pengembangan Potensi dan Pendidikan Anak Papua	1 Lok. Semografi, Desa Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	21 KK
		Yayasan Papua Penuh Kemuliaan Allah, Jl. Raya Sentani Hawai Dunlop No. 178 Sentani, Distrik Sentani Kab. Jayapura	1 Lok. Iwang, Desa Klaisu, Kec. Gresi Selatan, Kab. Jayapura	56 KK
			2 Lok. Sostek, Desa Sostek, Kec. Kaureh, Kab. Jayapura	17 KK
		Yayasan Bina Karya, Jl. Kenanga No. 173 Blok C, RT10/03 Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang Kab Jayapura	1 Lok. Bangai, Desa Bangai, Kec. Gresi Selatan, Kab. Jayapura	35 KK

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampingan		Jumlah KK
		Immanuel Tugu Karya, Jl. Tugu 1 Rw.1/Rt.03 Kei. Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura	1	Lok. Aun, Desa Binguin Progo, Kec. Kemtuk, Kab. Jayapura	42 KK
			2	Lok. Kwarya, Desa Kwarya, Kec. Yapsi, Kab. Jayapura	31 KK
		Forum Remaja Independen Papua, Jl. Yomake Perumahan Tabita No. 1-2D Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura	1	Lok. Skory, Desa Skory, Kec. Kemtuk, Kab. Jayapura	19 KK
			2	Lok. Kamdera, Desa Kamdera, Kec. Demta, Kab. Jayapura	29 KK
		Yayasan Abdi Budaya Nusantara (YABN), Rt.003, Rw.011 Kel. Hinekombe Distrik Sentani Kab Jayapura	1	Lok. Pagai, Desa Pagai, Kec. Airu, Kab. Jayapura	57 KK
		LKS PAPEDA Desa Girmulyo, Kec. Nabire, Kab. Nabire	1	Lok. Gakokebo, Desa Gakokebo, Kec. Tigi Barat, Kab. Deiyai	42 KK
			2	Lok. Widime, Desa Widime, Kec. Tigi Barat, Kab. Deiyai	35 KK
			3	Lok. Godide, Desa Godide, Kec. Kammu Utara, Kab. Dogiyai	43 KK
			4	Lok. Pugatadi I, Desa Pugatadi, Distrik Kamuu Utara, Kab. Dogiyai	55 KK
		Yayasan Asmat Maju dan Sejahtera, Kab. Asmat	1	Lok. Ayak, Desa Ayak, Kec. Korowai Bulmanop, Kab. Asmat	35 KK
			2	Lok. Bubis, Desa Bubis, Kec. Soator, Kab. Asmat	51 KK
			3	Lok. Kapayap III, Desa Kapayap III, Kec. Koroway Buluanop, Kab. Asmat	37 KK

No	Provinsi	Nama LKS	Lokasi Dampingan	Jumlah KK
20	Papua Barat	Yayasan Maneta Tanda Tora , Kampung Isui RT 00/ RW 00 Wasior Kab. Manokwari	1 Lok. Kampung Kurey, Desa Kampung Kurey, Kec. Nikiwar, Kab. Teluk Wondama	44 KK
			2 Lok. Syabes, Desa Syabes, Kec. Roon, Kab. Teluk Wondama	78 KK

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Juli 2022

DIREKTUR
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL DAN KEWIRAUSAHAAN
SOSIAL,


JUENA BR. SITEPU



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Jalan Setiabudi Raya No.28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 <http://pemer.kemensos.go.id>

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR : 618/5.2/KPTS/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL
PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA (PENA)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempertahankan, membangun dan mengembangkan keberdayaan sosial ekonomi dengan memanfaatkan aset, potensi diri, potensi wilayah lokal melalui peran aktif masyarakat yang didukung melalui peran pendamping sosial, perlu upaya transformasi Program Kewirausahaan Sosial menjadi Program Pahlawan Ekonomi Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA- 027.03.1.690556/2022 Tanggal 17 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL PROGRAM PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA (PENA) TAHUN ANGGARAN 2022

- KESATU : Mengesahkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jenis bantuan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai hasil asesmen berupa Bantuan Penguatan Produksi senilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : Oktober 2022

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



✍ EDI SUHARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
2. Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (OTK lama)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Satker : 440193 Sampul Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	027	440193	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	Nilai	100.00	31.00	71.06	92.86	100.00	98.46	100.00	100.00	86.44	100%	86.44
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	3.10	14.21	9.29	10.00	9.85	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	65.50		92.46					100.00			
Disclaimer: Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-6/PB/2022 , indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022																

Nilai IKPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (OTK Baru)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	02703	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Nilai	100.00	46.59	60.00	100.00	97.67	83.12	95.00	99.92	84.47	100%	84.47
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	4.66	12.00	10.00	9.77	8.31	4.75	24.98			
			Nilai Aspek	73.30		87.16					99.92			

Disclaimer:

Sesuai [Peraturan Perbendaharaan PER-6/PR/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Perhitungan Nilai Layanan Direktorat PKAT-KS Tahun 2022

Layanan Komunitas Adat Terpencil

		427	1319	1708	77.22%						
SARPRAS											
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan								
4	Sangat Baik	8	32	244	74.59%	Jumlah Responden	427	0.142857143	61	3.088993	77.22482
3	Baik	44	132			Total Pembobotan	1319	0.142857143	188.4286		
2	Cukup	9	18								
1	Buruk		0			Nilai Interval	3.09				
	JUMLAH	61	182			Nilai Interval Konversi	77.22				

Keramahan & Kesopanan

Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Sopan & Ramah	17	68	244	81.97%
3	Sopan & Ramah	44	132		
2	Kurang Sopan & Ramah		0		
1	Tidak Sopan & Ramah		0		
	JUMLAH	61	200		

Kompetensi

Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Kompeten	9	36	244	76.23%
3	Kompeten	46	138		
2	Kurang Kompeten	6	12		
1	Tidak Kompeten		0		
	JUMLAH	61	186		

Kecepatan

Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Cepat	11	44	244	75.00%
3	Cepat	40	120		
2	Kurang Cepat	9	18		
1	Tidak Cepat	1	1		

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

JUMLAH		61	183		
Kemudahan					
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Mudah	13	52	244	77.05%
3	Mudah	44	132		
2	Kurang Mudah		0		
1	Tidak Mudah	4	4		
JUMLAH		61	188		
Prosedur Pelayanan					
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Mudah	10	40	244	75.00%
3	Mudah	44	132		
2	Kurang Mudah	4	8		
1	Tidak Mudah	3	3		
JUMLAH		61	183		
Kesesuaian					
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Sesuai	16	64	244	80.74%
3	Sesuai	44	132		
2	Kurang Sesuai		0		
1	Tidak Sesuai	1	1		
JUMLAH		61	197		

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

Layanan Kewirausahaan Sosial (Pahlawan Ekonomi)

		1330	4240	5320	79.70%						
SARPRAS											
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan								
4	Sangat Baik	52	208	760	79.08%	Jumlah Responden	1330	0.142857143	190	3.18797	79.69925
3	Baik	119	357			Total Pembobotan	4240	0.142857143	605.7143		
2	Cukup	17	34								
1	Buruk	2	2			Nilai Interval	3.19				
	JUMLAH	190	601			Nilai Interval Konversi	79.70				
Keramahan & Kesopanan											
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan								
4	Sangat Sopan & Ramah	71	284	760	84.34%						
3	Sopan & Ramah	119	357								
2	Kurang Sopan & Ramah		0								
1	Tidak Sopan & Ramah		0								
	JUMLAH	190	641								
Kompetensi											
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan								
4	Sangat Kompeten	52	208	760	80.92%						
3	Kompeten	131	393								
2	Kurang Kompeten	7	14								
1	Tidak Kompeten		0								
	JUMLAH	190	615								
Kecepatan											
Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan								
4	Sangat Cepat	42	168	760	78.82%						
3	Cepat	136	408								
2	Kurang Cepat	11	22								
1	Tidak Cepat	1	1								
	JUMLAH	190	599								
Kemudahan											

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Mudah	37	148	760	77.76%
3	Mudah	145	435		
2	Kurang Mudah		0		
1	Tidak Mudah	8	8		
	JUMLAH	190	591		

Prosedur Pelayanan

Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Mudah	37	148	760	76.97%
3	Mudah	137	411		
2	Kurang Mudah	10	20		
1	Tidak Mudah	6	6		
	JUMLAH	190	585		

Kesesuaian

Bobot	Unsur	Responden	Nilai Pembobotan		
4	Sangat Sesuai	43	172	760	80.00%
3	Sesuai	143	429		
2	Kurang Sesuai	3	6		
1	Tidak Sesuai	1	1		
	JUMLAH	190	608		

- Rekapitulasi Pendamping/Petugas Lapangan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

PROVINSI		NAMA LKS		LOKASI DAMPINGAN		JUMLAH (KK)	JML PENDAMPING	NAMA PENDAMPING	NO. KONTAK (HP)
1	Aceh	1	Peduli Dhuafa	1	Lok. Dusun Seunong Bakti, Desa Gle Putoh, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	43	4	1. Musdar 2. Fakhrurazi 3. Hendra Yudilman 4. Martunis	1. 082175119630 2. 081251142344 3. 085359828351 4. 085361808730
				2	Lok. Lae Sekhakut, Desa Sekhakut, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara	65			
2	Sumatera Utara	2	PELMAS BNKP (Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Banua Niha Keriso Protestan)	3	Lok. Dusun 3 dan 4, Desa Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara	48	5	1. YURISMAN HALAWA 2. BERKAT IMAN JAYA MENDROFA 3. ARDIN YAKIN ZENDRATO 4. YUNISON HULU 5. LILIN SURYANTI ZENDRATO	1. 085372949417 2. 085275076685 3. 0813 72007875 4. 085277972012 5. 082225390946
3	Sumatera Barat	3	Yayasan Kirekat Indonesia	4	Lok. Malacan Timur, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep.Mentawai	48	5	1. Agustinus Dwi Harry Wahyanto 2. Irfan 3. Andesta 4. Buyamin 5. Daud Ari Gunawan	1. 082288483897 2. 082299222370 3. 082237740878 4. 081338873602 5. 081345463350
				5	Lok. Dusun Malacan, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep.Mentawai	100			
		4	LKSA KAUM (Kaum Abadi Untuk Mentawai)	6	Lok. Maonai dan Panasalat II, Desa Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kep.Mentawai	63	5	1. JONAR TAMBA 2. PANCELUS 3. RIKKI WISAM 4. NIKANOR 5. PRASTUTILINDY SUKMANINGSIH	1. 081371558893 2. 081267331118 3. 081268045743 4. 081363195799 5. 081377898437
				7	Lok. Maonai dan Panasalat I, Desa	48			

					Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kab. Kep. Mentawai				
				8	Lok. Mauku/Simasoro, Desa Saibi Samunkop, Kec. Siberut Tengah, Kab. Kep. Mentawai	75			
4	Sumatera Selatan	5	LKS Kasih Ibu	9	Lok. Dusun VI dan Dusun VII, Desa Tanjung Agung, Kec. Ulu Musi, Kab. Empat Lawang	51	4	1. Meliyani 2. Budiman 3. Edo Deriansyah 4. Faizal Suhendra	1. 081369522113 2. 082278646101 3. 081367129297 4. 081367206150

5	Riau	6	Komunitas Emak Sehat	10	Lok. Sukajadi, Desa Selensen, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir	27	4	1. IDRISSEN 2. MUHAMMAD KHAIRUL 3. R. YUNDA DIO PRATAMA 4. ABDUL RAHMAN	1. 082388885880 2. 081367557296 3. 085265749434 4. 082285124455
		7	Yayasan Anak Pulau Selatpanjang	11	Lok. Dusun I, Desa Tanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti	25	4	1. Firdaus 2. Nino Ardi 3. Rudi Kurniawan 4. Muhammad Sabri	1. 081365510027 2. 08536324820 3. 081365510027 4. -
				12	Lok. Dusun II, Desa Tanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu, Kab. Kepulauan Meranti	27			
				13	Lok. Parit Tiga, Desa Batin Suir, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kep. Meranti	30			
				14	Lok. Dusun III Cemaning, Desa Semukut, Kec. Pulau Merbau, Kab. Kep. Meranti	40			
6	Kalimantan Tengah	8	Tulus Hati	15	Lok. Dusun Sei Bahinoi, Desa Lawang Tamang, Kec. Mandau Telawang, Kab. Kapuas	51	6	1. Loting 2. Fatrae Leoussa 3. Anita 4. Okto Berkat Antang 5. Triyokli 6. Juanti	1. 085750839430 2. 081351884027 3. 082255921410 4. 085252759338 5. 085390640893 6. 082350141421
				16	Lok. Dusun Teluk Lahung, Desa Masupa Ria, Kec. Mandau Telawang, Kab. Kapuas	57			
				17	Lok. Tambelum, Desa Tambelum, Kec. Sungai	51			

					Babuat, Kab. Murung Raya				
		9	Mutiara Hati Palangkaraya	18	Lok. Tumbang Sabetung, Desa Tumbang Sabetung, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan	52	4	1. Budiman Sosilo 2. Heni Susana 3. Petrus 4. Liana	1. 082151910957 2. - 3. - 4. -
				19	Lok. Rantau Pandan, Desa Rantau Pandan, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	40			
7	Kalimantan Timur	10	Gayam Rescue Team	20	Lok. Maluang, Desa Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	80	4	1. Agung Adji Pangestu 2. Bayu Dwi Prayoga 3. Firdaus Tri Setya Hanafi 4. Herman Ari Rustaman	1. 082254579869 2. 085249001068 3. 085250569812 4. 081256544968
8	Kalimantan Barat	11	LKS Pejuang Subuh	21	Lok. Dukuh Baban Poring, Desa Melana, Kec. Nanga Soka, Kab. Melawi	48	2	1. Ilham Anshari 2. Dannu Pagar	1. 089693728653 2. 085822239583
				22	Lok. Dukuh Domit Permai, Desa Melana, Kec. Nanga Soka, Kab. Melawi	23			
				23	Lok. Dukuh Pako Seman, Keluing Taja, Kec. Nanga Soka, Kab. Melawi	36			
		12	Yayasan Cahaya Menara Kasih Sintang	24	Lok. Dusun Jengonoi, Desa Nanga Menakon, Kec. Ambalau, Kab. Sintang	35	3	1. Taripar Panjaitan 2. Lastari Kristiani 3. Gregoria Eva	1. 081348700779 2. 085787779659 3. 082155066593

9	Kalimantan Selatan	13	LKS LU Al-Tamar	25	Lok. Hambalang Dilantak, Desa Marajai, Kec. Halong, Kab. Balangan	54	7	1. Tamrin 2. Risalatun Nahdia 3. Marhat 4. Fahruraji 5. Miftahul Janah 6. Akhmad Humaidi 7. Budi Maulana	1. 081253379785 2. 082150139679 3. 081251051322 4. 081349782427 5. 081212315448 6. 08115003847 7. 082155587957
		14	Lazismu Hulu Sungai Tengah	26	Lok. Mindai dan Pacung, Desa Datar Batung, Kec. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Tengah	27	5	1. M Fuad Rahman 2. Erie Norahman 3. Abdul Wahab 4. Rahmatullah 5. Zainal Effendi	1. 081351173297 2. 08115979958 3. 08115019876 4. 08115199252 5. 082157224527
10	Sulawesi Utara	15	Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Utara	27	Lok. Laotongang, Laotongang, Kec. Tabukan Selatan, Kab. Kep. Sangihe	30	4	1. Jance Seke 2. Debby Ellen Banua 3. Janeke Lindayati Garing 4. Christian Liunsanda	1. 081398737706 2. 082378910129 3. 081243976496 4. 081241558057
		16	Maritime and Indigineous Culture Research Center	28	Lok. Sacu'u dan Siraat, Desa Riung Utara dan Dapihe, Kec. Tampan Amma, Kab. Kep. Talaud	60	4	1. Echoristy J. Mamintada 2. Mohamad khairudin 3. Nono S. A Sumampouw 4. Patur Rahman Lahindah	1. 081340830098 2. 085343683804 3. 08115372191 4. 081245250581
11	Sulawesi Barat	17	Malaqbi Coorporation	29	Lok. Tameoro, Desa Besoangin Utara, Kec. Tubbi Taramanu, Kab. Polewali Mandar	42	2	1. ASEP BUDI 2. BAHARUDDIN	1. 082347696076 2. 082287651284
				30	Lok. Dusun Bira, Desa Patambana, Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar	55			
		18	Global Riset dan Pemberdayaan	31	Lok. Tanete, Desa Lenggo, Kec. Bulu, Kab. Polman	53	3	1. Irsyad Mahmud 2. Mas'ud 3. Ardan Jayudi	1. 085398344107 2. 085399235406 3. 085299718418

12	Sulawesi Selatan	19	Aman Toraya	32	Lok. Dassi-Dassi, Desa Lembang Talimbangan, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara	50	17	1. Lidong Sarungallo 2. Sumarre Kanuna' 3. Paranto Palisu Padang 4. Sombolinggi Danduru 5. Yulius Pasorong 6. Lius 7. Marthen Luther Payungallo 8. Tridianus kala Pongmana' 9. Marthius Tandiongan 10. Dominggus Maksil Balalembang 11. Zebulon Dedy 12. Lewaran Rantela'bi' 13. Natalia Evo Wanti Toding 14. Bertha Sorean 15. Andi Rapa' 16. Arpa batara Randa 17. Nura Salusu	1. 0282215261775 2. 085299859474 3. 085243922767 4. 081241657667 5. 082259050743 6. 085396916088 7. 082187060310 8. 082262082419 9. 085396989599 10. 081241395999 11. 081262809571 12. 082188084818 13. 082121474712 14. 082188321022 15. 082187218476 16. 082194920612 17. 081339692937
				33	Lok. Ta'ba, Desa Batu Alu, Kec. Sanggala Selatan, Kab. Tana Toraja	50			
		20	LKSA Al-Burhaan	34	Lok. Kassi-Kassi dan Parang Labua, Desa Kayu Loe, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng	52	2	1. Idayanti 2. M. Risvandiary	1. 082148092156 2. 085298905626
13	Sulawesi Tenggara	21	Yayasan Oriz Aldzikri Sowite	35	Lok. Walepa, Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna	43	5	1. SURIONO 2. WA ODE NURUL MAULIDYA KOILA, 3. WINDRA MAWANI, 4. JOHANNA MARLINA 5. LA ODE ADI MURAD	1. A ODE ADI MURAD, S 2. 082262459243 3. 082291624827 4. 085342198150 5. 085338575391

		22	LKSPD Ar-Rohman	36	Lok. Dusun Terapung dan Dusun Bone Baru, Desa Talaga Baru, Kec. Lasalimu, Kab. Buton	91	5	1. AHMAD NURHALID 2. MUHSAN 3. JUMIANTI 4. JUHARDIN 5. MUHAMMAD HALIL	1. 085242423397 2. 085205414209 3. 082325004245 4. 082141186363 5. 082259274769
		23	LKSA Maqidha	37	Lok. Maranuang dan Dusun Hondolu, Desa Wasuamba, Kec. Lasalimu, Kab. Buton	41	5	1. FARIDAH KA'AB 2. SISWANTO 3. SITI ASRIFATUN 4. SITI ZULAIHA NURLANA 5. AHMAD JULHAM	1. 082213999260 2. 081243251197 3. 082225122038 4. 085396996278 5. 081229406544
14	Gorontalo	24	LKS Fatmawati	38	Lok. Iloheluma, Desa Iloheluma, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara	50	4	1. Suhri Mobilingo 2. Fatmawati Pakaya 3. Emi Husain 4. Ismail Pakaya	1. 082217116069 2. 081281837570 3. 085240323996 4. 081342316007
				39	Lok. Damahu, Desa Zuriati, Kec. Manano, Kab. Gorontalo Utara	54			
15	Maluku	25	Yayasan Al-Ishlah Bondowoso	40	Lok. Darlele, Desa Wapsalit, Kec. Lolong Guba, Kab. Pulau Buru	40	5	1. SETIAWAN 2. SUDIRMAN KAU 3. MAHMUD DAHLAN LATAR 4. AGUS SALIM 5. YOSE RIZAL	1. 082199772212 2. 082198594118 3. 081343436006 4. 081240426682 5. 085298970178
				41	Lok. Kotbesy, Desa Waelo, Kec. Waelata, Kab. Pulau Buru	50			
				42	Lok. Ngade, Desa Waeflan, Kec. Waelata, Kab. Buru	50			
				43	Lok. Waikebo, Desa Waehata, Kec. Waelata, Kab. Buru	21			
				44	Lok. Tumpai Desa Waehata, Kec. Waelata, Kab. Buru	55			

		26	Kompas Maluku Tengah	45	Lok. Sikelem, Desa Ulahahan, Kec. Teluti, Kab. Maluku Tengah	9	3	1. Abdul Azis Latuconsina 2. Diaman 3. Sam Aji Marasabessy	1. 085343054005 2. 081247542831 3. 081292165955
		27	LKSA Anthon Kleden	46	Lok. Waeula, Desa Waimasing, Kec. Waemasa, Kab. Buru Selatan	49	2	1. Arifin Bahta 2. James Phelipus Ulahayanan	1. - 2.
16	Maluku Utara	28	Yayasan The Tebings	47	Kulojaya, Desa Kulojaya, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah	21	6	1. Yoksan Alex Hendra Daly 2. Benyamin Bakaya 3. Linus Walten Garoda 4. Yacob Rette 5. Sumaryono 6. Frans Maedi	1. 082259692199 2. 081355603554 3. 081342989656 4. 082175967799 5. 082189850414 6. 082188302531
				48	Dusun Kayu Banggai, Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan Kab. Pulau Taliabu	18			
				49	Wayo Koding, Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kepulauan Taliabu	40			
				50	Wayo Panga, Desa Pencado, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kepulauan Taliabu	25			
				51	Nggoli, Nggoli, Kec. Taliabu Selatan, Kab. Kepulauan Taliabu	40			
				52	Dusun Pantau Dan Ngong Wayo, Desa Wahe, Kec. Taliabu Utara, Kab. Pulau Taliabu	69			

17	Nusa Tenggara Barat	29	FSPB Indonesia,	53	Lok. Dusun Ladan (Bukit Tinggi) Desa Batu Rotok, Kec. Batu Lanteh, Kab. Sumbawa	28	4	1. Phantao Malano 2. Subarman 3. Desi Sumarni 4. Muhammad Ikhwan Mustafa	1. 085238899805 2. 082339630007 3. 081226055977 4. 081237583094
		30	Yayasan Insan Cita Bima	54	Lok. So Pali Na'e, Desa Lambu, Kec. Lambu, Kab. Bima	30	7	1. Dipati 2. Yahya 3. Imam Al-Gazali 4. Ibrahim 5. Mulyadin 6. Ismail 7. Hidayatullah	1. 085339106001 2. 085333548147 3. 085253219909 4. 082339757222 5. 082339757222 6. 085934936568 7. 08239899747
				55	Lok. Sara Na'e, Desa Laju, Kec. Langgudu, Kab. Bima	50			
		31	LKS Berkah	56	Lok. Oi Bura, Desa Oi Bura, Kec. Tambora, Kab. Bima	51	4	1. Rustam Efendi, 2. Fitriati 3. Muhammad Amrin 4. Sri Rahmawati	1. 085237080003 2. 087756296261 3. 085339116416 4. 082144415115
18	Nusa Tenggara Timur	32	LKSA Hati Nurani Sumba	57	Lok. Matakapore, Desa Matakapore, Kodi Bangedo, Kab. Sumba Barat Daya	97	5	1. Agnes Lali Milla 2. Florianus Tamo Ama 3. Yakobus Ngongo Bili 4. Yuliana Suluh 5. Agustinus Umbu Pati	1. 082111837696 2. 082147391568 3. 082237740878 4. 081338873602 5. 081345463350
19	Papua	33	Biro Konsultasi Pengembangan Masyarakat Adat Papua Barat (BIKPEMAP)	58	Lok. Wie, Desa Milki, Kec. Totwe, Kab. Keerom	42	5	1. Fallen Pangkali 2. Yosepina Lensru 3. Dorus Darko Idji 4. Gerson Runeli 5. Markus Tintop	1. 082398308975 2. 081251955187 3. 082210412132 4. 081250221261 5. -
				59	Lok. Atre, Desa Milki, Kec. Totwe, Kab. Keerom	24			

				60	Lok. Lules, Desa Lules, Kec. Totwe, Kab. Keerom	25			
				61	Lok. Onam II, Desa Onam, Kec. Kaisenar, Kab. Keerom	24			
		34	Yayasan Pengembangan Potensi dan Pendidikan Anak Papua (YP3AP)	62	Lok. Semografi, Desa Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	21	5	1. Harold Rumaikeldi 2. Gres Patrisia Lensru 3. Hesty Sare Saor 4. Monalisa Pangkalina Abuere 5. Roi Eliyer Idji	1. 082244158979 2. 082238068406 3. - 4. 085202951616 5. 085247022065
		35	Yayasan Papua Penuh Kemuliaan Allah	63	Lok. Iwang, Desa Klaisu, Kec. Gresi Selatan, Kab. Jayapura	56	5	1. Jefry Zakharia Yaung 2. Alexander Bemey 3. Onisuis Vokames 4. Tetrin Angela Yaung 5. Paulinus Lensru	1. 081340392398 2. 082225391097 3. 082399144267 4. 082399144267 5. 081248180432
				64	Lok. Sostek, Desa Sostek, Kec. Kaureh, Kab. Jayapura	17			
		36	Yayasan Bina Karya	65	Lok. Bangai, Desa Bangai, Kec. Gresi Selatan, Kab. Jayapura	35	4	1. Ahmadi 2. Aris Hermawan 3. Amari 4. Joko Iriyanto	1. 085254385285 2. 081251086137 3. 081247087306 4. 081344246840
		37	Immanuel Tugu Karya	66	Lok. Aun, Desa Binguin Progo, Kec. Kemtuk, Kab. Jayapura	42	5	1. FREDRIK PERSULESSY 2. MAURITE MARTHEN RUMBINO 3. JHON HURSEPUNY 4. DANIEL KESPO 5. ZAKEUS BEDES	1. 081343008677 2. 081344451041 3. 081344266688 4. 082197589526 5. 082199729224
				67	Lok. Kwarya, Desa Kwarya, Kec. Yapsi, Kab. Jayapura	31			

		38	Forum Remaja Independen Papua	68	Lok. Skory, Desa Skory, Kec. Kemtuk, Kab. Jayapura	19	5	1. Fadhlun Munir Pauspaus 2. Dhita Aprillia Kawahe 3. Abdul Mudanang 4. Sidik Adjie Pangestu 5. Yokbet Meraudje	1. 082238439138 2. 082198871015 3. 081247269597 4. 081344999415 5. 081230305621
				69	Lok. Kamdera, Desa Kamdera, Kec. Demta, Kab. Jayapura	29			
		39	Yayasan Abdi Budaya Nusantara (YABN),	70	Lok. Pagai, Desa Pagai, Kec. Airu, Kab. Jayapura	57	5	1. Raemon Salmon 2. Novy Matulessy 3. Martin Tomatala 4. Alfina Suruan 5. Salmon Nakambi	1. 08124802454 2. 082399150146 3. 081248340824 4. 081284805797 5. 082197917117
		40	LKS PAPEDA	71	Lok. Gakokebo, Desa Gakokebo, Kec. Tigi Barat, Kab. Deiyai	42	5	1. Timotius Joko Supto 2. Rudi D. F Hutagalung 3. Supriyatun 4. Nur Widyawati 5. Yupiter Setya Budi	1. 081240162819 2. 081270667385 3. 081248717170 4. 08128023216 5. 081253071255
				72	Lok. Widime, Desa Widime, Kec. Tigi Barat, Kab. Deiyai	35			
				73	Lok. Godide, Desa Godide, Kec. Kammu Utara, Kab. Dogiyai	43			
				74	Lok. Pugatadi I, Desa Pugatadi, Distrik Kamuu Utara, Kab. Dogiyai	55			
		41	Yayasan Asmat Maju dan Sejahtera	75	Lok. Ayak, Desa Ayak, Kec. Korowai Bulmanop, Kab. Asmat	35	4	1. HAERULLAH BAUSAD 2. ANDI WAHIDAH 3. AHMAD 4. DWI UTOMO	1. 082398148831 2. 082184935576 3. 082398148831 4. 085243478956
				76	Lok. Bubis, Desa Bubis, Kec. Soator, Kab. Asmat	51			
				77	Lok. Kapayap III, Desa Kapayap III, Kec.	37			

					Koroway Buluanop, Kab. Asmat				
20	Papua Barat	42	Yayasan Maneta Tanda Tora	78	Lok. Kampung Kurey, Desa Kampung Kurey, Kec. Nikiwar, Kab. Teluk Wondama	44	5	1. Thobby Elsandro Wosiri 2. Yakobus Indorwai 3. Lambertus Natan Waropen 4. Lady Grace Komsary 5. Anneke R. Morin	1. 082199659071 2. 082214385211 3. 081247574166 4. 085323836577 5. 081240199199
				79	Lok. Syabes, Desa Syabes, Kec. Roon, Kab. Teluk Wondama	78			
						3500	197		

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 1

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KECAMATAN		DESA		LOKASI/DUSUN		KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN		NILAI	TOTAL
1	Aceh	1	Aceh Tenggara	1	Leuser	1	Lawe Sekhakut	1	Batu Silolang	65	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	325,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						785,000,000
		2	Aceh Jaya	2	Panga	2	Desa Gle Putoh	2	Dusun Seunong Bakti	43	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	215,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						240,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						1,025,000,000
2	Sumatera Utara	3	Nias Utara	3	Tugala Oyo	3	Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo	3	Dusun 3 dan Dusun 4	48	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	240,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						700,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						700,000,000
3	Sumatera Selatan	4	Empat Lawang	4	Ulu Musi	4	Tanjung Agung	4	Dusun VI dan Dusun VII	51	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	255,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						715,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						715,000,000
4	Sumatera Barat	5	Kepulauan Mentawai	5	Siberut Tengah	5	Simasoro	5	Simasoro	75	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	375,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Penerangan - Solar Cell	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						835,000,000
				6	Siberut Utara	6	Malacan	6	Malacan Timur	48	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	240,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						265,000,000
								7	Dusun Malacan	100	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	500,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						525,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

				7	Siberut Barat Daya	7	Bubuakenen dan Ds. Pasakiat Taileleu	8	Maonai dan Panasalat II	63	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	315,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						340,000,000
								9	Maonai dan Panasalat I	48	TH 3	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	240,000,000
									TOTAL BANTUAN						240,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						2,205,000,000
5	Riau	6	Kepulauan Meranti	8	Tebing Tinggi	8	Batinsuir	10	Parit Tiga	30	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	150,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						610,000,000
				9	Pulau Merbau	9	Semukut	11	Dusun III Cemaning	40	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	200,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						660,000,000
				10	Tasik Putri Puyu	10	Tanjung Padang	12	Dusun I	25	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	125,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						150,000,000
								13	Dusun II	27	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	135,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						160,000,000
		7	Indragiri Hilir	11	Kemuning	11	Selensen	14	Sukajadi	27	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	135,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						160,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						1,740,000,000
6	Kalimantan Tengah	8	Katingan	12	Katingan Hulu	12	Tumbang Sabetung	15	Tumbang Sabetung	52	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	260,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						720,000,000
				13	Bukit Raya	13	Rantau Pandan	16	Rantau Pandan	40	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	200,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						660,000,000
		9	Kapuas	14	Mandau Telawang	14	Lawang Tamang	17	Dusun Sei Bahinoi	51	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	255,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						280,000,000
						15	Masupa Ria	18	Dusun Teluk Lahung	57	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	285,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
								TOTAL BANTUAN							310,000,000
		10	Murung Raya	15	Sungai Babuat	16	Tambelum	19	Tambelum	51	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	255,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
								TOTAL BANTUAN							280,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							2,250,000,000
7	Kalimantan Barat	11	Melawi	16	Nanga Sokan	17	Melana	20	Dukuh Baban Poring	48	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	240,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
								TOTAL BANTUAN							700,000,000
								21	Dukuh Domit Permai	23	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	115,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
								TOTAL BANTUAN							575,000,000
						18	Keluing Taja	22	Dukuh Pako Seman	36	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	180,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
								TOTAL BANTUAN							640,000,000
		12	Sintang	17	Ambalau	19	Nanga Menakon	23	Dusun Nanga Jengonoi	35	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	175,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
								TOTAL BANTUAN							635,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							2,550,000,000
8	Kalimantan Timur	13	Berau	18	Gunung Tabur	20	Maluang	24	Maluang	80	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	400,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
								TOTAL BANTUAN							860,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							860,000,000
9	Kalimantan Selatan	14	Balangan	19	Halong	21	Marajai	25	Hambawang Dilantak	54	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	270,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
								TOTAL BANTUAN							730,000,000
		15	Hulu Sungai Tengah	20	Batang Alai Timur	22	Datar Batung	26	Mindai dan Pacung	27	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	135,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						595,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						1,325,000,000
11	NTB	17	Bima	22	Langgudu	24	Laju	28	Sara Na'e	50	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	250,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						710,000,000
				23	Lambu	25	Lambu	29	So Pali Na'e Laju	30	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	150,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						175,000,000
				24	Tambora	26	Oibura	30	Oi Bura	51	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	255,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
									TOTAL BANTUAN						280,000,000
		18	Sumbawa	25	Batu Lanteh	27	Batu Rotok	31	Ladan (Bukit Tinggi)	28	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	140,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						600,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						1,765,000,000
12	SULAWESI TENGGARA	20	Buton	27	Lasalimu	29	Telaga Baru	33	Terapung	91	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	455,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						915,000,000
						30	Wasuamba	34	Marauang	41	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	205,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						665,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						1,580,000,000
13	Sulawesi Selatan	21	Bantaeng	28	Bantaeng	31	Kayu Loe	35	Kassi-Kassi dan Parang Labua	52	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	260,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						720,000,000
		22	Tana Toraja	29	Sanggala Selatan	32	Batu alu	36	Ta'ba	50	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	250,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						710,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

		23	Toraja Utara	30	Buntu Pepasan	33	Lembang Talimbangan	37	Dassi-Dassi	50	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	250,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
													TOTAL BANTUAN		275,000,000
													TOTAL BANTUAN PER PROVINSI		1,705,000,000
14	Gorontalo	24	Gorontalo Utara	31	Anggrek	34	Iloheluma	38	Iloheluma	50	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	250,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
													TOTAL BANTUAN		710,000,000
				32	Manano	35	Zuriati	39	Damahu	54	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	270,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
													TOTAL BANTUAN		730,000,000
													TOTAL BANTUAN PER PROVINSI		1,440,000,000
15	Sulawesi Utara	25	Kepulauan Sangihe	33	Tabukan Selatan	36	Laotongang	40	Laotongang	30	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	150,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
													TOTAL BANTUAN		175,000,000
		26	Kepulauan Talaud	34	Tampan Amma	37	Riung Utara dan Dapihe	41	Sa'cu dan Siraat	60	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	300,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
													TOTAL BANTUAN		325,000,000
													TOTAL BANTUAN PER PROVINSI		500,000,000
16	Sulawesi Barat	27	Polewali Mandar	35	Bulo	38	Lenggo	42	Tanete	53	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	265,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
													TOTAL BANTUAN		725,000,000
				36	Tubbi Taramanu	39	Besoangin Utara	43	Tameoro	42	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	210,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
													TOTAL BANTUAN		235,000,000
				37	Bulo	40	Patambana	44	Bira	55	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	275,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
													TOTAL BANTUAN		300,000,000
													TOTAL BANTUAN PER PROVINSI		1,260,000,000
17	Maluku	28	Pulau Buru	38	Lolong Guba	41	Wapsalit	45	Darlele	40	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	200,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
													TOTAL BANTUAN		660,000,000
				39	Waelata	42	Waelo	46	Kotbesy	50	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	250,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

											2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000	
											3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000	
											4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000	
							TOTAL BANTUAN							710,000,000	
					43	Waehata	47	Waekibo	21	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	105,000,000	
											2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000	
							TOTAL BANTUAN							130,000,000	
							48	Tampai	55	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	275,000,000	
											2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000	
							TOTAL BANTUAN							300,000,000	
					44	Waeflan	49	Ngade	50	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	250,000,000	
											2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000	
							TOTAL BANTUAN							275,000,000	
		29	Maluku Tengah	40	Teluti	45	Ulahahan	50	Sikelem	9	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	45,000,000
											2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000	
							TOTAL BANTUAN							70,000,000	
		30	Buru Selatan.	41	Waemasa	46	Waimasing	51	Waeula	49	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	245,000,000
											2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000	
							TOTAL BANTUAN							270,000,000	
							TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							2,415,000,000	
18	Maluku Utara	31	Halmahera Tengah	42	Weda Tengah	47	Kulo Jaya	52	Kulo Jaya	21	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	105,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
							TOTAL BANTUAN							565,000,000	
		32	Kep. Taliabu	43	Taliabu Selatan	48	Pencado	53	Wayo Koding	40	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	200,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
							TOTAL BANTUAN							660,000,000	
							54	Wayo Panga	25	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	125,000,000	
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
							TOTAL BANTUAN							585,000,000	
					49	Nggoli	55	Nggoli	40	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	200,000,000	
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
							TOTAL BANTUAN							660,000,000	
				44	Taliabu Utara	50	Wahe	56	Dusun Pantau Dan Ngong Wayo	69	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	345,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
							TOTAL BANTUAN							370,000,000	

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							2,840,000,000
19	Papua Barat	34	Teluk Wondama	46	Roon	52	Syabes	58	Syabes	78	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	390,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
												5	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	3,510,000,000
								TOTAL BANTUAN							4,360,000,000
				47	Nikiwar	53	Kampung Kurei	59	Kampung Kurei	44	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	220,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
								TOTAL BANTUAN							245,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							4,605,000,000
20	Papua			50	Demta	56	Kamdera	62	Kamdera	29	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	145,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
								TOTAL BANTUAN							605,000,000
						60	Sekori	66	Sekori	19	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	95,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
												3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	855,000,000
								TOTAL BANTUAN							975,000,000
		36	Keerom	54	Totwe	62	Lules	68	Lules	25	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	125,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
												3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	1,125,000,000
								TOTAL BANTUAN							1,275,000,000
						63	Milki	69	Wie	42	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	210,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
												3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	1,890,000,000
								TOTAL BANTUAN							2,125,000,000
								70	Atre	24	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	120,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
												3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	1,080,000,000
								TOTAL BANTUAN							1,225,000,000
				55	Kaisenar	64	Onam	71	Onam II	24	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	120,000,000
												2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	25,000,000	25,000,000
												3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	1,080,000,000
								TOTAL BANTUAN							1,225,000,000
				56	Web	65	Semografi	72	Semografi	21	TH 3	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	105,000,000
								TOTAL BANTUAN							105,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							7,535,000,000
								TOTAL BANTUAN SEMUA PROVINSI							39,015,000,000
20	Provinsi	39	Kabupaten	62	Kecamatan	72	Desa	79	Lokasi		KK				

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 2

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KECAMATAN		DESA		LOKASI/DUSUN		KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN		NILAI	TOTAL
1	Kalimantan Selatan	1	Balangan	1	Halong	1	Marajai	1	Hambawang Dilantak	54	TH 1	1	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
									TOTAL BANTUAN						180,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						180,000,000
2	NTT	2	Sumba Barat Daya	2	Kodi Bangedo	2	Matakapore	2	Matakapore	97	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	485,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						945,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						945,000,000
3	Sulawesi Tenggara	3	Muna	3	Kabawo	3	Wantiworo	3	Walepa	43	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	215,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						675,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						675,000,000
4	Maluku Utara	4	Kep. Taliabu	4	Taliabu Selatan	4	Pencado	4	Kayu Banggai	18	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	90,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						550,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						550,000,000
5	Papua	5	Jayapura	5	Kaureh	5	Sostek	5	Sostek	17	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	85,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000
									TOTAL BANTUAN						545,000,000
				6	Yapsi	6	Kwarya	6	Kwarya	31	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	155,000,000
												2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	180,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	180,000,000
												4	Bantuan Sarpras Pendidikan	100,000,000	100,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

5	Provinsi	8	Kabupaten	16	Kecamatan	17	Desa	17	Lokasi		KK			
---	----------	---	-----------	----	-----------	----	------	----	--------	--	----	--	--	--

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 3

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KECAMATAN		DESA		LOKASI/DUSUN		KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN		NILAI	TOTAL
1	Aceh	1	Aceh Jaya	1	Panga	1	Desa Gle Putoh	1	Dusun Seunong Bakti	43	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	180,000,000	180,000,000
									TOTAL BANTUAN						180,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						180,000,000
2	Sumatera Barat	2	Kepulauan Mentawai	2	Siberut Barat Daya	2	Bubuakenen dan Ds. Pasakiat Tailleleu	2	Maonai dan Panasalat II	63	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	180,000,000	180,000,000
									TOTAL BANTUAN						180,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						180,000,000
3	Riau	3	Kepulauan Meranti	3	Tasik Putri Puyu	3	Tanjung Padang	3	Dusun I	25	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	180,000,000	180,000,000
									TOTAL BANTUAN						180,000,000
		4	Indragiri Hilir	4	Kemuning	4	Selensen	4	Sukajadi	27	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	180,000,000	180,000,000
									TOTAL BANTUAN						180,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						360,000,000
17	Maluku	5	Pulau Buru	5	Waelata	5	Waeflan	5	Ngade	50	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	180,000,000	180,000,000
									TOTAL BANTUAN						180,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						180,000,000
									TOTAL BANTUAN SEMUA PROVINSI						900,000,000
20	Provinsi	39	Kabupaten	62	Kecamatan	72	Desa	79	Lokasi	3500	KK				

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 4

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL					
1	Aceh	1	Aceh Tenggara	1	Leuser	1	Lawe Sekhakut	1	Batu Silolang	65	TH 1	1	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
								2	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK					200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN							40,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							40,000,000
2	Sumatera Utara	2	Nias Utara	2	Tugala Oyo	2	Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo	2	Dusun 3 dan Dusun 4	48	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
								3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK					200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN							40,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							40,000,000
3	Sumatera Selatan	3	Empat Lawang	3	Ulu Musi	3	Tanjung Agung	3	Dusun VI dan Dusun VII	51	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
								3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK					200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN							40,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							40,000,000
4	Sumatera Barat	4	Kepulauan Mentawai	4	Siberut Tengah	4	Simasoro	4	Simasoro	75	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
								3	Bantuan Sarana Penerangan - Solar Cell					200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN							40,000,000
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI							40,000,000
5	Riau	5	Kepulauan Meranti	5	Tebing Tinggi	5	Batinsuir	5	Parit Tiga	30	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
								3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK					200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN							40,000,000
				6	Pulau Merbau	6	Semukut	6	Dusun III Cemaning	40	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

											3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000	
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						80,000,000	
6	Kalimantan Tengah	6	Katingan	7	Katingan Hulu	7	Tumbang Sabetung	7	Tumbang Sabetung	52	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
				8	Bukit Raya	8	Rantau Pandan	8	Rantau Pandan	40	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						80,000,000	
7	Kalimantan Barat	7	Melawi	9	Nanga Sokan	9	Melana	9	Dukuh Baban Poring	48	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
								10	Dukuh Domit Permai	23	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
						10	Keluing Taja	11	Dukuh Pako Seman	36	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
		8	Sintang	10	Ambalau	11	Nanga Menakon	12	Dusun Nanga Jengonoi	35	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						160,000,000	
8	Kalimantan Timur	9	Berau	11	Gunung Tabur	12	Maluang	13	Maluang			2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						40,000,000	
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						40,000,000	
9	Kalimantan Selatan	10	Balangan	12	Halong	13	Marajai	14	Hambawang Dilantak	54	TH 1	3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
								TOTAL BANTUAN						20,000,000	
		11	Hulu Sungai Tengah	13	Batang Alai Timur	14	Datar Batung	15	Mindai dan Pacung	27	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

		31	Keerom	28	Totwe	32	Lules	34	Lules	25	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	125,000,000
									TOTAL BANTUAN						125,000,000
						33	Milki	35	Wie	42	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	210,000,000
									TOTAL BANTUAN						210,000,000
								36	Atre	24	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	120,000,000
									TOTAL BANTUAN						120,000,000
				29	Kaisenar	34	Onam	37	Onam II	24	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	120,000,000
									TOTAL BANTUAN						120,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						710,000,000
									TOTAL BANTUAN SEMUA PROVINSI						2,320,000,000
20	Provinsi	39	Kabupaten	62	Kecamatan	72	Desa	79	Lokasi		KK				

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 5

NO	PROVINSI	KABUPATEN		KECAMATAN		DESA		LOKASI/DUSUN		KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN		NILAI	TOTAL
1	Kalimantan Selatan	1	Balangan	1	Halong	1	Marajai	1	Hambawang Dilantak	54	TH 1	2	Bantuan Community Center (Balai Sosial)	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						20,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						20,000,000
2	NTT	2	Sumba Barat Daya	2	Kodi Bangedo	2	Matakapore	2	Matakapore	97	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						40,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						40,000,000
3	Sulawesi Tenggara	3	Muna	3	Kabawo	3	Wantiworo	3	Walepa	43	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						40,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						40,000,000
4	Maluku Utara	4	Kep. Taliabu	4	Taliabu Selatan	4	Pencado	4	Kayu Banggai	40	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						40,000,000
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						40,000,000
5	Papua	5	Jayapura	5	Kaureh	5	Sostek	5	Sostek	17	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						40,000,000
				6	Yapsi	6	Kwarya	6	Kwarya	31	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						40,000,000
				7	Gresi Selatan	7	Klaisu	7	Iwang	56	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	280,000,000
									TOTAL BANTUAN						280,000,000
						8	Bangai	8	Bangai	35	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	175,000,000
									TOTAL BANTUAN						175,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

				8	Kemtuk	9	Binguin Progo	9	Aun	42	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	210,000,000
									TOTAL BANTUAN						210,000,000
				9	Ainu	10	Pagai	10	Pagai	57	TH 2	3	Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial	50,000,000	285,000,000
									TOTAL BANTUAN						285,000,000
		6	Asmat	10	Soator	11	Bubis	11	Bubis	51	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						40,000,000
				11	Koroway Buluanop	12	Kapayap III	12	Kapayap III	37	TH 1	2	Bantuan Balai Sosial	200,000,000	20,000,000
												3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	200,000,000	20,000,000
									TOTAL BANTUAN						40,000,000
				12	Koroway Buluanop	13	Ayak	13	Ayak	37	TH 3	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	0
									TOTAL BANTUAN						0
		7	Deiyai	13	Tigi Barat	14	Widimei	14	Widimei	35	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	0
									TOTAL BANTUAN						0
				14	Tigi Barat	15	Gakokebo	15	Gakokebo	42	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	5,000,000	0
									TOTAL BANTUAN						0
									TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						1,110,000,000
									TOTAL BANTUAN SEMUA PROVINSI						1,250,000,000
5	Provinsi	8	Kabupaten	16	Kecamatan	17	Desa	17	Lokasi		KK				

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 6

No	Provinsi	Lokasi Pemberdayaan		Jumlah KK	Tahun Pemberdayaan	Bantuan Sarana dan Prasarana Lingkungan
						20,000,000
1	Aceh	1	Lok. Dusun Seunong Bakti, Desa Gle Putoh, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	43	II	20,000,000
2	Sumatera Barat	8	Lok. Maonai dan Panasalat II, Desa Bubuakenen dan Desa Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kep Mentawai	63	II	20,000,000
3	Riau	12	Lok Dusun I DesaTanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti	25	II	20,000,000
4	Riau	14	Lokasi Sukajadi, Desa Selensen, Kec. Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir	27	II	20,000,000
5	Maluku	49	Lok. Ngade Desa Waeflan Kec. Waelata, Kab. Pulau Buru	50	II	20,000,000
				208		100,000,000

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 7

No	Provinsi	Lokasi Pemberdayaan		Jumlah KK	Tahun Pemberdayaan	Bantuan Penghidupan Berkelanjutan
						25,000,000
1	Aceh	1	Lok. Dusun Seunong Bakti, Desa Gle Putoh, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	43	II	25,000,000
2	Sumatera Barat	8	Lok.Lok. Dusun Malacan, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep Mentawai	100	II	25,000,000
3	Riau	14	Lokasi Sukajadi, Desa Selensen, Kec. Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir	27	II	25,000,000
4	Maluku	49	Lok. Ngade Desa Waeflan Kec. Waelata, Kab. Pulau Buru	50	II	25,000,000
				220		100,000,000

Rekapitulasi Penyaluran Bansos PKAT Tahap 8

No	Provinsi	Lokasi Pemberdayaan		Jumlah KK	Tahun Pemberdayaan	JENIS BANSOS & SATUAN HARGA	PAJAK			NETTO
						Bantuan Hunian Tetap	PPN 11%	PPh 22 1,5%	Total Pajak	
						2,500,000	247,748	67,568	315,315	
1	Aceh	1	Lok. Dusun Seunong Bakti, Desa Gle Putoh, Kec. Panga, Kab. Aceh Jaya	43	II	107,500,000	10,653,153	2,905,405	13,558,559	93,941,441
		2	Lok. Batu Siliolang, desa Lawe Serakut, Kec. Leuser, Kab. Aceh Tenggara	65	I	162,500,000	16,103,604	4,391,892	20,495,495	142,004,505
2	Sumatera Utara	3	Lok. Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo Kec Tugala Oyo Kab Nias Utara	48	I	120,000,000	11,891,892	3,243,243	15,135,135	104,864,865
3	Sumatera Selatan	4	Lok. Dusun VI dan Dusun VII Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi , Kab. Empat Lawang	51	I	127,500,000	12,635,135	3,445,946	16,081,081	111,418,919
4	Sumatera Barat	5	Lok. Mauku/Simasoro, Desa Simasoro, Kec. Siberut Tengah, Kab. Kep.Mentawai	75	I	187,500,000	18,581,081	5,067,568	23,648,649	163,851,351
		6	Lok. Dusun Malacan Timur, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep Mentawai	48	II	120,000,000	11,891,892	3,243,243	15,135,135	104,864,865
		7	Lok. Dusun Malacan, Desa Malacan, Kec. Siberut Utara, Kab. Kep Mentawai	100	II	250,000,000	24,774,775	6,756,757	31,531,532	218,468,468
		8	Lok. Maonai dan Panasalat II, Desa Bubuakenen dan Desa Pasakiat Taileleu , Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kep Mentawai	63	II	157,500,000	15,608,108	4,256,757	19,864,865	137,635,135
		9	Lok Maonai dan Panasalat I Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya Kab Kep Mentawai	48	III	120,000,000	11,891,892	3,243,243	15,135,135	104,864,865
5	Riau	10	Lok. Parit Tiga, Desa Batinsuir, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti	30	I	75,000,000	7,432,432	2,027,027	9,459,459	65,540,541
		11	Lok. Dusun III Cemaning, Desa Semukut, Kec.Pulau Merbau , Kab Kepulauan Meranti	40	I	100,000,000	9,909,910	2,702,703	12,612,613	87,387,387
		12	Lok Dusun I DesaTanjung Padang, Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti	25	II	62,500,000	6,193,694	1,689,189	7,882,883	54,617,117
		13	Lok. Dusun II Desa Tanjung Padang Kec. Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti	27	II	67,500,000	6,689,189	1,824,324	8,513,514	58,986,486
		14	Lokasi Sukajadi, Desa Selensen, Kec. Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir	27	II	67,500,000	6,689,189	1,824,324	8,513,514	58,986,486
6	Kalimantan Tengah	15	Lok. Dusun Sei Bahinoi, Desa Lawang Tamang, Kec. Mandau Telawang, Kab.Kapuas	51	II	127,500,000	12,635,135	3,445,946	16,081,081	111,418,919
		16	Lok. Dusun Teluk Lahung, Desa Masupa Ria, Kec. Mandau Telawang, Kab. Kapuas	57	II	142,500,000	14,121,622	3,851,351	17,972,973	124,527,027
		17	Lok. Tambelum, Desa Tambelum, Kec. Sungai Babuat, Kab. Murung Raya	51	II	127,500,000	12,635,135	3,445,946	16,081,081	111,418,919

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

		18	Lok. Tumbang Sabetung Desa tumbang Sabetung Kec. Katingan Hulu Kabupaten Katingan	52	I	130,000,000	12,882,883	3,513,514	16,396,396	113,603,604
		19	Lok. Rantau Pandan Desa Rantau Pandan Kec. Bukit Raya Kab Katingan	40	I	100,000,000	9,909,910	2,702,703	12,612,613	87,387,387
7	Kalimantan Timur	20	Lok. Maluang, Desa Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau	80	I	200,000,000	19,819,820	5,405,405	25,225,225	174,774,775
8	Kalimantan Barat	21	Lok. Duku Baban Poring Desa Melana Kec. Nanga Sokan Kab. Melawi	48	I	120,000,000	11,891,892	3,243,243	15,135,135	104,864,865
		22	Lok. Duku Pako Seman Desa Keluing Taja Kec. Nanga Sokan Kab. Melawi	36	I	90,000,000	8,918,919	2,432,432	11,351,351	78,648,649
		23	Lok. Duku Domit Permai Desa Melana Kec. Nanga Sokan Kab Melawi	23	I	57,500,000	5,698,198	1,554,054	7,252,252	50,247,748
		24	Lok. Nanga Jengonoi Desa Nanga Menakon Kec. Ambalau Kab Sintang	35	I	87,500,000	8,671,171	2,364,865	11,036,036	76,463,964
9	Kalimantan Selatan	25	Lok. Hambawang Dilantak Desa Marajai Kec. Halong Kab. Balangan	54	I	135,000,000	13,378,378	3,648,649	17,027,027	117,972,973
		26	Lok Mindai dan Pacung Desa Datar Batung Kec. Hulu Sungai Tengah Kab Hulu Sungai Tengah	27	I	67,500,000	6,689,189	1,824,324	8,513,514	58,986,486
10	Nusa Tenggara Barat	27	Lok. Saranae Desa Laju Kec Langgudu Kab Bima	50	I	125,000,000	12,387,387	3,378,378	15,765,766	109,234,234
		28	Lok. So Pali Na' e Desa Lambu Kec. Lambu Kab Bima	30	II	75,000,000	7,432,432	2,027,027	9,459,459	65,540,541
		29	Lok. Oibura Desa Oibura Kec Tambora Kab.Bima	51	II	127,500,000	12,635,135	3,445,946	16,081,081	111,418,919
		30	Lok. Ladan Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh Kab. Sumbawa	28	I	70,000,000	6,936,937	1,891,892	8,828,829	61,171,171
11	Nusa Tenggara Timur	31	Lok.Matakapore Desa Matakapore Kec. Kodi Bangedo Kab Sumba Barat Daya	97	I	242,500,000	24,031,532	6,554,054	30,585,586	211,914,414
12	Sulawesi Selatan	32	Lok. Dassi-Dassi, Desa Lembang Talimbangan, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara	50	II	125,000,000	12,387,387	3,378,378	15,765,766	109,234,234
		33	Lok. Ta'ba Desa Batu Alu Kec. Sanggala Selatan Kab. Tana Toraja	50	I	125,000,000	12,387,387	3,378,378	15,765,766	109,234,234
		34	Lok Kassi-kassi dan Parang Labua ,Desa Kayu Loe, Ke. Bantaeng Kab. Bantaeng	52	I	130,000,000	12,882,883	3,513,514	16,396,396	113,603,604
13	Sulawesi Tenggara	35	Lok. Walepa Desa Wantiwoke Kec. Kabawo Kab Muna	43	I	107,500,000	10,653,153	2,905,405	13,558,559	93,941,441
		36	Lok Terapung Desa Telaga Baru Kec Lasalima Kab Buton	91	I	227,500,000	22,545,045	6,148,649	28,693,694	198,806,306
		37	Lok Maranuang Desa Wasuamba Kec Lasalima Kab. Buton	41	I	102,500,000	10,157,658	2,770,270	12,927,928	89,572,072
14	Sulawesi Utara	38	Lok. Laotongang, Laotongang, Kec. Tabukan Selatan, Kab. Kep. Sangihe	30	II	75,000,000	7,432,432	2,027,027	9,459,459	65,540,541
		39	Lok. Sacu'u dan Siraat, Desa Riung Utara dan Dapihe, Kec. Tampan Amma, Kab. Kep. Talaud	60	II	150,000,000	14,864,865	4,054,054	18,918,919	131,081,081
15	Gorontalo	40	Lok. Iloheluma Desa Iloheluma Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara	50	I	125,000,000	12,387,387	3,378,378	15,765,766	109,234,234

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

		41	Lok. Damahu Desa Zuriati Kec. Manano Kab Gorontalo Utara	54	I	135,000,000	13,378,378	3,648,649	17,027,027	117,972,973
16	Sulawesi Barat	42	Lok. Tanete Desa Lenggo Kecamatan Bulu Kab Polewali Mandar	53	I	132,500,000	13,130,631	3,581,081	16,711,712	115,788,288
		43	Lok. Tameoro Desa Besoangin Utara Kec. Tubbi Taramanu Kab Polewali Mandar	42	II	105,000,000	10,405,405	2,837,838	13,243,243	91,756,757
		44	Lok. Dusun Bira Desa Patambana Kec. Bulu Kab. Polewali Mandar	55	II	137,500,000	13,626,126	3,716,216	17,342,342	120,157,658
17	Maluku	45	Lok. Darlele, Desa Wapsalit Kec. Lolong Gube Kab. Pulau Buru	40	I	100,000,000	9,909,910	2,702,703	12,612,613	87,387,387
		46	Lok. Kotbesy Desa Waelo Kec Waelata Kab Pulau Buru	50	I	125,000,000	12,387,387	3,378,378	15,765,766	109,234,234
		47	Lok. Waikebo, Desa Waehata Kec Waelata Kab Pulau Buru	21	II	52,500,000	5,202,703	1,418,919	6,621,622	45,878,378
		48	Lok. Tampi, Desa Waehata, Kec. Waelata, Kab. Pulau Buru	55	II	137,500,000	13,626,126	3,716,216	17,342,342	120,157,658
		49	Lok. Ngade Desa Waeflan Kec. Waelata, Kab. Pulau Buru	50	II	125,000,000	12,387,387	3,378,378	15,765,766	109,234,234
		50	Lok. Sikelem , Desa Ulahahan, Kec. Teluti, Kab. Maluku Tengah	9	II	22,500,000	2,229,730	608,108	2,837,838	19,662,162
		51	Lok. Waeula, Desa Waimasing, Kec. Waemasa, Kab. Buru Selatan	49	II	122,500,000	12,139,640	3,310,811	15,450,450	107,049,550
18	Maluku Utara	52	Lok. Kulo Jaya , Desa Kulo Jaya Kec. Weda Tengah , Kab. Halmahera Tengah	21	I	52,500,000	5,202,703	1,418,919	6,621,622	45,878,378
		53	Lok Wayo Koding desa Pencado Kec. Taliabu Selatan Kab. Kep Taliabu	40	I	100,000,000	9,909,910	2,702,703	12,612,613	87,387,387
		54	Lok. Wayo Panga Desa Pencado Kec. Taliabu Kab. Kep Taliabu	25	I	62,500,000	6,193,694	1,689,189	7,882,883	54,617,117
		55	Lok. Dusun Pantau dan ngong Wayo Desa Wahe Kec. Taliabu Utara Kab. Kep. Taliabu	69	II	172,500,000	17,094,595	4,662,162	21,756,757	150,743,243
		56	Lok. Kayu Banggai Desa Pencado Kec. Taliabu Kab. Kep Taliabu	18	I	45,000,000	4,459,459	1,216,216	5,675,676	39,324,324
		57	Lok. Nggoli Desa Enggoli , Kec. Taliabu Selatan , Kab. Kep Taliabu	40	I	100,000,000	9,909,910	2,702,703	12,612,613	87,387,387
19	Papua	58	Lok. Sostek Desa Sostek Kec. Kaureh Kabupaten Jayapura	17	I	42,500,000	4,211,712	1,148,649	5,360,360	37,139,640
		59	Lok. Kwarya Desa Kwarya Kecamatan Yaspi, Kab. Jayapura	31	I	77,500,000	7,680,180	2,094,595	9,774,775	67,725,225
		60	Lok. Kamdera Desa Kamdera, Kec. Demta, Kab. Jayapura	29	I	72,500,000	7,184,685	1,959,459	9,144,144	63,355,856
		61	Lok. Iwang, Desa Klaisu, Kec. Gresi Selatan, Kab. Jayapura	56	II	140,000,000	13,873,874	3,783,784	17,657,658	122,342,342
		62	Lok. Bangai Desa Bangai, Kec. Gresi selatan, Kab. Jayapura	35	II	87,500,000	8,671,171	2,364,865	11,036,036	76,463,964
		63	Lok. Aun Desa Binguin Progo Kec. Kentuk Kab Jayapura	42	II	105,000,000	10,405,405	2,837,838	13,243,243	91,756,757
		64	Lok. Sekory Desa Sekory Kec Kentuk , Kab. Jayapura	19	II	47,500,000	4,707,207	1,283,784	5,990,991	41,509,009
		65	Lok. Pagai Desa Pagai, Kec. Ainu, Kab. Jayapura	57	II	142,500,000	14,121,622	3,851,351	17,972,973	124,527,027
		66	Lok. Lules Desa Lules Kec. Totwe Kab. Keerom	25	II	62,500,000	6,193,694	1,689,189	7,882,883	54,617,117

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

		67	Lok. Wie Desa Milki Kec. Totwe Kab. Keerom	42	II	105,000,000	10,405,405	2,837,838	13,243,243	91,756,757
		68	Lok. Atre, Desa Milki, Kec. Totwe , Kab. Keerom	24	II	60,000,000	5,945,946	1,621,622	7,567,568	52,432,432
		69	Lok. Onam II, Desa Onam, Kec. Kaisenar , Kab. Keerom	24	II	60,000,000	5,945,946	1,621,622	7,567,568	52,432,432
		70	Lok. Semografi Desa Semografi, Kec. Web, Kab. Keerom	21	III	52,500,000	5,202,703	1,418,919	6,621,622	45,878,378
		71	Lok. Bubis, Desa Bubis, Kec. Soator Kab. Asmat	51	I	127,500,000	12,635,135	3,445,946	16,081,081	111,418,919
		72	Lok. Kapayap IIII Desa Kapayap III, Kec. Korowai Bulmanop, Kab. Asmat	37	I	92,500,000	9,166,667	2,500,000	11,666,667	80,833,333
		73	Lok. Ayak Desa Ayak Kec Korowai Bulmanop Kab Asmat	35	III	87,500,000	8,671,171	2,364,865	11,036,036	76,463,964
		74	Lok . Pugatadi I Desa Pugatadi Distrik Kamu Utara Kab. Dogiyai	55	I	-	-	-	-	-
		75	Lok. Widimei, Desa Widimei /kec. Tigi Barat Kab Deiyai	35	I	87,500,000	8,671,171	2,364,865	11,036,036	76,463,964
		76	Lok. Gakokebo, Desa Gakokebo Kec. Tigi Barat Kab. Deiyai	42	I	105,000,000	10,405,405	2,837,838	13,243,243	91,756,757
		77	Lok. Godide Desa Godide Kec. Kammu Utara Kab. Dogiyai	43	III	-	-	-	-	-
20	Papua Barat	78	Lok. Syabes Desa Syabes Kec. Roon Kab Teluk Wondama	78	I	195,000,000	19,324,324	5,270,270	24,594,595	170,405,405
		79	Lok. Kampung Kurey Desa Kampung Kurey Kec. Nikiwar Kab Teluk Wondama	44	II	110,000,000	10,900,901	2,972,973	13,873,874	96,126,126
				3,500		8,505,000,000	842,837,838	229,864,865	1,072,702,703	7,432,297,297

Rekapitulasi Penyaluran BOP LKS Tahap 1

NO	PROVINSI	NAMA LKS		LOKASI DAMPINGAN						KK	NILAI BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN (BOP)	JUMLAH		
				KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN							
1	Aceh	1	PEDULI DHUAFA	1	Aceh Tenggara	1	Leuser	1	Lawe Sekhakut		65	65,000,000	108,000,000	
				2	Aceh Jaya	2	Panga	2	Desa Gle Putoh	1	Dusun Seunong Bakti	43		43,000,000
2	Sumatera Utara	2	LKS PELMAS BNKP	3	Nias Utara	3	Tugala Oyo	3	Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo	3	Dusun 3 dan Dusun 4	48	48,000,000	48,000,000
3	Sumatera Selatan	3	LKS KASIH IBU	4	Empat Lawang	4	Ulu Musi	4	Tanjung Agung	4	Dusun VI dan Dusun VII	51	51,000,000	51,000,000
4	Sumatera Barat	4	LKS KAUM	5	Kepulauan Mentawai	5	Siberut Tengah	5	Simasoro	5	Simasoro	75	75,000,000	186,000,000
						6	Siberut Barat Daya	7	Bubuakenen dan Ds. Pasakiat Taileleu	8	Maonai dan Panasalat II	63	63,000,000	
										9	Maonai dan Panasalat I	48	48,000,000	
		5	YAYASAN KIREKAT INDONESIA			7	Siberut Utara	6	Malacan	6	Malacan Timur	48	48,000,000	148,000,000
										7	Dusun Malacan	100	100,000,000	
5	Riau	6	YAYASAN ANAK SELAT PULAU PANJANG	6	Kepulauan Meranti	8	Tebing Tinggi	8	Batinsuir	10	Parit Tiga	30	30,000,000	122,000,000
						9	Pulau Merbau	9	Semukut	11	Dusun III Cemaning	40	40,000,000	
						10	Tasik Putri Puyu	10	Tanjung Padang	12	Dusun I	25	25,000,000	
										13	Dusun II	27	27,000,000	
		7	KOMUNITAS EMAK SEHAT	7	Indragiri Hilir	11	Kemuning	11	Selensen	14	Sukajadi	27	27,000,000	27,000,000
6	Kalimantan Tengah	8	LKS MUTIARA HATI	8	Katingan	12	Katingan Hulu	12	Tumbang Sabetung	15	Tumbang Sabetung	52	52,000,000	92,000,000
						13	Bukit Raya	13	Rantau Pandan	16	Rantau Pandan	40	40,000,000	
		9	LKS TULUS HATI	9	Kapuas	14	Mandau Telawang	14	Lawang Tamang	17	Dusun Sei Bahinoi	51	51,000,000	159,000,000
								15	Masupa Ria	18	Dusun Teluk Lahung	57	57,000,000	
				10	Murung Raya	15	Sungai Babuat	16	Tambelum	19	Tambelum	51	51,000,000	
7	Kalimantan Barat	10	LKS PEJUANG SUBUH	11	Melawi	16	Nanga Sokan	17	Melana	20	Dukuh Baban Poring	48	48,000,000	107,000,000
										21	Dukuh Domit Permai	23	23,000,000	
								18	Keluing Taja	22	Dukuh Pako Seman	36	36,000,000	
		11	YAYASAN MENARA CAHAYA KASIH SINTANG	12	Sintang	17	Ambalau	19	Nanga Menakon	23	Dusun Nanga Jengonoi	35	35,000,000	35,000,000
8	Kalimantan Timur	12	GAYAM RESCUE TEAM	13	Berau	18	Gunung Tabur	20	Maluang	24	Maluang	80	80,000,000	80,000,000
9	Kalimantan Selatan	13	LKS-LU AL TAMAR	14	Balangan	19	Halong	21	Marajai	25	Hambawang Dilantak	54	54,000,000	54,000,000
		14	LKS LAZISMU HULU SUNGAI TENGAH	15	Hulu Sungai Tengah	20	Batang Alai Timur	22	Datar Batung	26	Mindai dan Pacung	27	27,000,000	27,000,000
11	NTB	16	YAYASAN INSAN CITA BIMA	17	Bima	22	Langgudu	24	Laju	28	Saranae	50	50,000,000	80,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

					23	Lambu	25	Lambu	29	So Pali Na'e Laju	30		30,000,000	
		17	LKS BERKAH		24	Tambora	26	Oibura	30	Oi Bura	51		51,000,000	51,000,000
		18	FSPB INDONESIA	18	Sumbawa	25	Batu Lanteh	27	Baturon	31	Ladan	28	28,000,000	28,000,000
		20	LKSPD AR-ROHMAN	20	Buton	27	Lasalimu	29	Talaga Baru	33	Terapung	41	41,000,000	41,000,000
		21	LKSA MAQIDHA					30	Wasuamba	34	Maranuang	91	91,000,000	91,000,000
13	Sulawesi Selatan	22	LKSA AL-BURHAN	21	Bantaeng	28	Bantaeng	31	Kayu Loe	35	Kassi-Kassi dan Parang Labua	52	52,000,000	52,000,000
		23	AMAN TORAYA	22	Tana Toraja	29	Sanggala Selatan	32	Batu alu	36	Ta'ba	50	50,000,000	100,000,000
				23	Toraja Utara	30	Buntu Pepasan	33	Lembang Talimbangan	37	Dassi-Dassi	50	50,000,000	
14	Gorontalo	24	LKS FATMAWATI	24	Gorontalo Utara	31	Anggrek	34	Iloheluma	38	Iloheluma	50	50,000,000	104,000,000
						32	Manano	35	Zuriati	39	Damahu	54	54,000,000	
15	Sulawesi Utara	25	YAYASAN PENDIDIKAN RAKYAT SULAWESI UTARA	25	Kepulauan Sangihe	33	Tabukan Selatan	36	Laotongang	40	Laotongang	30	30,000,000	30,000,000
		26	MARITIME AND INDIGENOUS CULTURE RESEARCH CENTER	26	Kepulauan Talaud	34	Tampam Amma	37	Riung Utara dan Dapihe	41	Sa'cu dan Siraat	60	60,000,000	60,000,000
16	Sulawesi Barat	27	GLOBAL RISET DAN PEMBERDAYAAN		Polewali Mandar	35	Bulo	38	Lenggo	42	Tanete	53	53,000,000	53,000,000
		28	MALAQBI CORPORATION			36	Tubbi Taramanu	39	Besoangin Utara	43	Tameoro	42	42,000,000	97,000,000
						37	Bulo	40	Patambana	44	Bira	55	55,000,000	
17	Maluku	29	YAYASAN AL-ISHLAH BONDOWOSO	28	Pulau Buru	38	Lolong Guba	41	Wapsalit	45	Darlele	40	40,000,000	216,000,000
						39	Waelata	42	Waelo	46	Kotbesy	50	50,000,000	
								43	Waehata	47	Waekibo	21	21,000,000	
										48	Tampai	55	55,000,000	
								44	Waeflan	49	Ngade	50	50,000,000	
		30	KOMPAS MASOHI	29	Maluku Tengah	40	Teluti	45	Ulahahan	50	Sikelem	9	9,000,000	9,000,000
		31	YAYASAN ANTHON KLEDEN	30	Buru Selatan.	41	Waemasa	46	Waimasing	51	Waeula	49	49,000,000	49,000,000
18	Maluku Utara	32	YAYASAN THE TEBINGS	31	Halmahera Tengah	42	Weda Tengah	47	Kulo Jaya	52	Kulo Jaya	21	21,000,000	195,000,000
				32	Kep. Taliabu	43	Taliabu Selatan	48	Pencado	53	Wayo Koding	40	40,000,000	
										54	Wayo Panga	25	25,000,000	
								49	Nggoli	55	Nggoli	40	40,000,000	
						44	Taliabu Utara	50	Wahe	56	Dusun Pantau Dan Ngong Wayo	69	69,000,000	
19	Papua Barat	34	YAYASAN MANETA TANDA TORA	34	Teluk Wondama	46	Roon	52	Syabes	58	Syabes	78	78,000,000	122,000,000
						47	Nikiwar	53	Kampung Kurei	59	Kampung Kurei	44	44,000,000	
		38	FORUM REMAJA INDEPENDEN PAPUA					60	Sekori	66	Sekori	19	19,000,000	48,000,000
						52	Demta	56	Kamdera	62	Kamdera	29	29,000,000	
		40	BIKPEMAP	36	Keerom	54	Totwe	62	Lules	68	Lules	25	25,000,000	115,000,000
								63	Milki	69	Wie	42	42,000,000	
								70	Atre	71	Atre	24	24,000,000	
						55	Kaisenar	64	Onam	71	Onam II	24	24,000,000	

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

		41	YP3AP			56	Web	65	Semografi	72	Semografi	21	21,000,000	21,000,000
											TOTAL BOP		Rp 2,806,000,000	
											TOTAL BANTUAN PER PROVINSI			
20	Provinsi	43	LKS	39	Kabupaten	62	Kecamatan	72	Desa	79	Lokasi	2806		

Rekapitulasi Penyaluran BOP LKS Tahap 2

NO	PROVINSI	NAMA LKS		LOKASI DAMPINGAN						KK	NILAI BIAYA OPERASIONAL PENDAMPINGAN (BOP)	TOTAL			
					KABUPATEN		KECAMATAN		DESA					LOKASI/DUSUN	
1	NTT	1	LKSA HATI NURANI SUMBA	1	Sumba Barat Daya	1	Kodi Bangedo	1	Matakapore	1	Matakapore	97	97,000,000	97,000,000	
2	Sulawesi Tenggara	2	YAYASAN ORIZ ALDZIKRI SOWITE	2	Muna	2	Kabawo	2	Wantiworo	2	Walepa	43	43,000,000	43,000,000	
3		3	YAYASAN THE TEBINGS	3	Kep. Taliabu	3	Taliabu Selatan	3	Pencado	3	Dusun Banggai	18	18,000,000	18,000,000	
4	Papua	4	YAYASAN PAPUA PENUH KEMULIAAN ALLAH	4	Jayapura	4	Kaureh	4	Sostek	4	Sostek	17	17,000,000	73,000,000	
						5	Gresi Selatan	5	Klaisu	5	Iwang	56	56,000,000		
		5	YAYASAN BINA KARYA					6	Bangai	6	Bangai	35	35,000,000		35,000,000
		6	IMANUEL TUGU KARYA			7	Yapsi	7	Kwarya	7	Kwarya	31	31,000,000		73,000,000
						8	Kemtuk	8	Binguin Progo	8	Aun	42	42,000,000		
		7	YAYASAN ABDI BUDAYA NUSANTARA			9	Airu	9	Pagai	9	Pagai	57	57,000,000	57,000,000	
		8	YAYASAN ASMAT MAJU SEJAHTERA	5	Asmat	10	Soator	10	Bubis	10	Bubis	51	51,000,000	123,000,000	
						11	Koroway Buluanop	11	Kapayap III	11	Kapayap III	37	37,000,000		
								12	Ayak	12	Ayak	35	35,000,000		
		9	LKS PAPEDA	6	Dogiyai	12	Kammu Utara	13	Pugatadi	13	Pugatadi I	55	55,000,000	175,000,000	
						13	Kammu Utara	14	Godide	14	Godide	43	43,000,000		
				7	Deiyai	14	Tigi Barat	15	Widimei	15	Widimei	35	35,000,000		
						15	Tigi Barat	16	Gakokebo	16	Gakokebo	42	42,000,000		
											TOTAL BOP		694,000,000		
											TOTAL BANTUAN PER PROVINSI				
20	Provinsi	43	LKS	39	Kabupaten	62	Kecamatan	72	Desa	79	Lokasi	3500			

Rekapitulasi Penyaluran BOL LKS

NO	PROVINSI	NAMA LKS		LOKASI DAMPINGAN						KK	NILAI BIAYA OPERASIONAL LEMBAGA (BOL)	JUMLAH		
					KABUPATEN		KECAMATAN		DESA					LOKASI/DUSUN
1	Aceh	1	PEDULI DHUAFA	1	Aceh Tenggara	1	Leuser	1	Lawe Sekhakut	65	20,000,000	40,000,000		
				2	Aceh Jaya	2	Panga	2	Desa Gle Putoh	43	20,000,000			
2	Sumatera Utara	2	LKS PELMAS BNKP	3	Nias Utara	3	Tugala Oyo	3	Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo	48	20,000,000	20,000,000		
3	Sumatera Selatan	3	LKS KASIH IBU	4	Empat Lawang	4	Ulu Musi	4	Tanjung Agung	51	20,000,000	20,000,000		
4	Sumatera Barat	4	LKS KAUM	5	Kepulauan Mentawai	5	Siberut Tengah	5	Simasoro	75	20,000,000	60,000,000		
						6	Siberut Barat Daya	7	Bubuakenen dan Ds. Pasakiat Taileleu	63	20,000,000			
								9	Maonai dan Panasalat I	48	20,000,000			
		5	YAYASAN KIREKAT INDONESIA			7	Siberut Utara	6	Malacan	48	20,000,000			
								7	Dusun Malacan	100	20,000,000	80,000,000		
5	Riau	6	YAYASAN ANAK SELAT PULAU PANJANG	6	Kepulauan Meranti	8	Tebing Tinggi	8	Batinsuir	30	20,000,000			
						9	Pulau Merbau	9	Semukut	40	20,000,000			
						10	Tasik Putri Puyu	10	Tanjung Padang	25	20,000,000			
								13	Dusun II	27	20,000,000			
		7	KOMUNITAS EMAK SEHAT	7	Indragiri Hilir	11	Kemuning	11	Selensen	27	20,000,000	20,000,000		
6	Kalimantan Tengah	8	LKS MUTIARA HATI	8	Katingan	12	Katingan Hulu	12	Tumbang Sabetung	52	20,000,000	40,000,000		
						13	Bukit Raya	13	Rantau Pandan	40	20,000,000			
		9	LKS TULUS HATI	9	Kapuas	14	Mandau Telawang	14	Lawang Tamang	51	20,000,000	60,000,000		
								15	Masupa Ria	57	20,000,000			
				10	Murung Raya	15	Sungai Babuat	16	Tambelum	51	20,000,000			
7	Kalimantan Barat	10	LKS PEJUANG SUBUH	11	Melawi	16	Nanga Sokan	17	Melana	48	20,000,000	60,000,000		
										21	Dukuh Domit Permai		23	20,000,000
								18	Keluing Taja	36	20,000,000			
		11	YAYASAN MENARA CAHAYA KASIH SINTANG	12	Sintang	17	Ambalau	19	Nanga Menakon	35	20,000,000	20,000,000		
8	Kalimantan Timur	12	GAYAM RESCUE TEAM	13	Berau	18	Gunung Tabur	20	Maluang	80	20,000,000	20,000,000		
9	Kalimantan Selatan	13	LKS-LU AL TAMAR	14	Balangan	19	Halong	21	Marajai	54	20,000,000	20,000,000		
		14	LKS LAZISMU HULU SUNGAI TENGAH	15	Hulu Sungai Tengah	20	Batang Alai Timur	22	Datar Batung	27	20,000,000			
								26	Mindai dan Pacung		20,000,000	20,000,000		

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

10	NTT	15	LKSA HATI NURANI SUMBA	16	Sumba Barat Daya	21	Kodi Bangedo	23	Matakapore	27	Matakapore	97	20,000,000	20,000,000
11	NTB	16	YAYASAN INSAN CITA BIMA	17	Bima	22	Langgudu	24	Laju	28	Saranae	50	20,000,000	40,000,000
						23	Lambu	25	Lambu	29	So Pali Na'e Laju	30	20,000,000	
		17	LKS BERKAH			24	Tambora	26	Oibura	30	Oi Bura	51	20,000,000	20,000,000
		18	FSPB INDONESIA	18	Sumbawa	25	Batu Lanteh	27	Baturoton	31	Ladan	28	20,000,000	20,000,000
12	Sulawesi Tenggara	19	YAYASAN ORIZ ALDZIKRI SOWITE	19	Muna	26	Kabawo	28	Wantiworo	32	Walepa	43	20,000,000	20,000,000
		20	LKSPD AR-ROHMAN	20	Buton	27	Lasalimu	29	Talaga Baru	33	Terapung	41	20,000,000	20,000,000
		21	LKSA MAQIDHA					30	Wasuamba	34	Maranuung	91	20,000,000	20,000,000
13	Sulawesi Selatan	22	LKSA AL-BURHAN	21	Bantaeng	28	Bantaeng	31	Kayu Loe	35	Kassi-Kassi dan Parang Labua	52	20,000,000	20,000,000
		23	AMAN TORAYA	22	Tana Toraja	29	Sanggala Selatan	32	Batu alu	36	Ta'ba	50	20,000,000	40,000,000
				23	Toraja Utara	30	Buntu Pepasan	33	Lembang Talimbangan	37	Dassi-Dassi	50	20,000,000	
14	Gorontalo	24	LKS FATMAWATI	24	Gorontalo Utara	31	Anggrek	34	Iloheluma	38	Iloheluma	50	20,000,000	40,000,000
						32	Manano	35	Zuriati	39	Damahu	54	20,000,000	
15	Sulawesi Utara	25	YAYASAN PENDIDIKAN RAKYAT SULAWESI UTARA	25	Kepulauan Sangihe	33	Tabukan Selatan	36	Laotongang	40	Laotongang	30	20,000,000	20,000,000
		26	MARITIME AND INDIGINEOUS CULTURE RESEARCH CENTER	26	Kepulauan Talaud	34	Tampan Amma	37	Riung Utara dan Dapihe	41	Sa'cu dan Siraat	60	20,000,000	20,000,000
16	Sulawesi Barat	27	GLOBAL RISET DAN PEMBERDAYAAN	27	Polewali Mandar	35	Bulo	38	Lenggo	42	Tanete	53	20,000,000	20,000,000
		28	MALAQBI COORPORATION			36	Tubbi Taramanu	39	Besoangin Utara	43	Tameoro	42	20,000,000	40,000,000
						37	Bulo	40	Patambana	44	Bira	55	20,000,000	
17	Maluku	29	YAYASAN AL-ISHLAH BONDOWOSO	28	Pulau Buru	38	Lolong Guba	41	Wapsalit	45	Darlele	40	20,000,000	100,000,000
						39	Waelata	42	Waelo	46	Kotbesy	50	20,000,000	
								43	Waehata	47	Waekibo	21	20,000,000	
										48	Tampai	55	20,000,000	
								44	Waeflan	49	Ngade	50	20,000,000	
		30	KOMPAS MASOHI	29	Maluku Tengah	40	Teluti	45	Ulahahan	50	Sikelem	9	20,000,000	20,000,000
		31	YAYASAN ANTHON KLEDEN	30	Buru Selatan.	41	Waemasa	46	Waimasing	51	Waeula	49	20,000,000	20,000,000
18	Maluku Utara	32	YAYASAN THE TEBINGS	31	Halmahera Tengah	42	Weda Tengah	47	Kulo Jaya	52	Kulo Jaya	21	20,000,000	120,000,000
				32	Kep. Taliabu	43	Taliabu Selatan	48	Pencado	53	Wayo Koding	40	20,000,000	
										54	Wayo Panga	25	20,000,000	
								49	Nggoli	55	Nggoli	40	20,000,000	
								50	Pencado	56	Kayu Banggai	18	20,000,000	
						44	Taliabu Utara	51	Wahe	57	Dusun Pantau Dan Ngong Wayo	69	20,000,000	
19	Papua Barat	34	YAYASAN MANETA TANDA TORA	34	Teluk Wondama	46	Roon	52	Syabes	58	Syabes	78	20,000,000	40,000,000

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

						47	Nikiwar	53	Kampung Kurei	59	Kampung Kurei	44	20,000,000	
20	Papua	35	YAYASAN PAPUA PENUH KEMULIAAN ALLAH	35	Jayapura	48	Kaureh	54	Sostek	60	Sostek	17	20,000,000	40,000,000
						49	Gresi Selatan	57	Klaisu	63	Iwang	56	20,000,000	
		36	YAYASAN BINA KARYA					58	Bangai	64	Bangai	35	20,000,000	20,000,000
		37	IMANUEL TUGU KARYA			50	Yapsi	55	Kwarya	61	Kwarya	31	20,000,000	40,000,000
						51	Kemtuk	59	Binguin Progo	65	Aun	42	20,000,000	
		38	FORUM REMAJA INDEPENDEN PAPUA					60	Sekori	66	Sekori	19	20,000,000	40,000,000
						52	Demta	56	Kamdera	62	Kamdera	29	20,000,000	
		39	YAYASAN ABDI BUDAYA NUSANTARA			53	Airu	61	Pagai	67	Pagai	57	20,000,000	20,000,000
		40	BIKPEMAP	36	Keerom	54	Totwe	62	Lules	68	Lules	25	20,000,000	80,000,000
								63	Milki	69	Wie	42	20,000,000	
										70	Atre	24	20,000,000	
						55	Kaisenar	64	Onam	71	Onam II	24	20,000,000	
		41	YP3AP			56	Web	65	Semografi	72	Semografi	21	20,000,000	20,000,000
		42	YAYASAN ASMAT MAJU SEJAHTERA	37	Asmat	57	Soator	66	Bubis	73	Bubis	51	20,000,000	60,000,000
						58	Koroway Buluanop	67	Kapayap III	74	Kapayap III	37	20,000,000	
								68	Ayak	75	Ayak	35	20,000,000	
		43	LKS PAPEDA	38	Dogiyai	59	Kammu Utara	69	Pugatadi	76	Pugatadi I	55	20,000,000	80,000,000
						60	Kammu Utara	70	Godide	77	Godide	43	20,000,000	
				39	Deiyai	61	Tigi Barat	71	Widimei	78	Widimei	35	20,000,000	
						62	Tigi Barat	72	Gakokebo	79	Gakokebo	42	20,000,000	
										TOTAL BOL			1,580,000,000	
20	Provinsi	43	LKS	39	Kabupaten	62	Kecamatan	72	Desa	79	Lokasi	3500		

REKAPITULASI PENERIMA PENA TAHUN 2022

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	SENTRA	JUMLAH PRELIST PENAL	ASSESSMENT	PROPOSAL OK	JUMLAH KPM YANG TERSALURKAN				
							BATCH 1&2	RST	RTLH	PKH	TOTAL
1	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	SENTRA ABISEKA	33	33	18	18	-	-	-	18
2	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	SENTRA ABISEKA	44	44	12	12	-	-	-	12
3	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SENTRA ABISEKA	16	-	-	-	-	-	-	-
4	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	SENTRA ABISEKA	35	35	25	19	6	-	-	25
5	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	SENTRA ABISEKA	102	99	74	30	14	21	-	65
6	RIAU	KOTA DUMAI	SENTRA ABISEKA	26	26	5	5	-	-	-	5
7	RIAU	KOTA PEKANBARU	SENTRA ABISEKA	27	27	7	7	-	-	-	7
8	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	SENTRA ABIYOSO	83	84	68	52	-	-	-	52
9	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	SENTRA ALYATAMA	1	1	1	-	1	-	-	1
10	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	SENTRA ALYATAMA	21	12	12	-	-	12	-	12
11	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	SENTRA ALYATAMA	19	15	14	-	-	14	-	14
12	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	SENTRA ALYATAMA	38	37	2	-	2	-	-	2
13	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	SENTRA ALYATAMA	1	1	-	-	-	-	-	-
14	JAMBI	KOTA JAMBI	SENTRA ALYATAMA	18	18	-	-	-	-	-	-
15	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	SENTRA ANTASENA	72	72	42	34	7	-	-	41
16	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	SENTRA ANTASENA	27	27	26	26	-	-	-	26
17	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	SENTRA ANTASENA	148	116	71	71	-	-	-	71
18	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	SENTRA ANTASENA	135	135	88	84	4	-	-	88
19	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	SENTRA ANTASENA	79	53	15	10	5	-	-	15
20	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAAWAH	SENTRA ANTASENA	34	34	16	16	-	-	-	16
21	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	SENTRA ANTASENA	58	50	25	18	-	-	-	18

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

22	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	SENTRA ANTASENA	176	176	53	53	-	-	-	53
23	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	SENTRA ANTASENA	25	15	12	1	3	-	-	4
24	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	SENTRA ANTASENA	69	60	21	14	7	-	-	21
25	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	SENTRA ANTASENA	1	-	-	-	-	-	-	-
26	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	SENTRA ANTASENA	30	30	11	-	-	-	-	-
27	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	SENTRA ANTASENA	96	96	46	46	-	-	-	46
28	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	SENTRA BAHAGIA	66	28	15	15	-	-	-	15
29	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	SENTRA BAHAGIA	58	58	28	28	-	-	-	28
30	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU	SENTRA BAHAGIA	12	7	7	-	-	7	-	7
31	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	SENTRA BAHAGIA	47	47	-	-	-	-	-	-
32	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	SENTRA BAHAGIA	32	32	12	12	-	-	-	12
33	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	SENTRA BAHAGIA	149	131	71	70	1	-	-	71
34	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	SENTRA BAHAGIA	57	36	25	25	-	-	-	25
35	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	SENTRA BAHAGIA	25	25	20	20	-	-	-	20
36	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	SENTRA BAHAGIA	2	-	-	-	-	-	-	-
37	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	SENTRA BAHAGIA	77	77	40	34	-	-	-	34
38	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANG SIANTAR	SENTRA BAHAGIA	73	73	49	49	-	-	-	49
39	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	SENTRA BAHAGIA	40	40	18	18	-	-	-	18
40	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	SENTRA BUDI LUHUR	51	51	46	46	-	-	-	46
41	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	SENTRA BUDI LUHUR	68	66	60	27	-	33	-	60
42	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	SENTRA BUDI LUHUR	28	27	27	-	-	27	-	27
43	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	SENTRA BUDI LUHUR	54	54	46	46	-	-	-	46
44	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	SENTRA BUDI PERKASA	35	35	26	26	-	-	-	26
45	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	SENTRA DARUSSA'ADAH	40	35	35	-	-	35	-	35
46	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	SENTRA DHARMA GUNA	32	30	38	9	-	21	-	30

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

47	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	SENTRA DHARMA GUNA	35	36	59	47	2	10	-	59
48	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	SENTRA DHARMA GUNA	30	24	27	11	-	16	-	27
49	BENGKULU	KOTA BENGKULU	SENTRA DHARMA GUNA	26	26	27	27	-	-	-	27
50	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	SENTRA GALIH PAKUAN	31	31	30	30	-	-	-	30
51	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	SENTRA GALIH PAKUAN	151	126	128	127	-	-	-	127
52	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	SENTRA GALIH PAKUAN	40	40	35	35	-	-	-	35
53	BANTEN	KABUPATEN SERANG	SENTRA GALIH PAKUAN	106	71	34	34	-	-	-	34
54	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	SENTRA GAU MABAJI	29	29	13	13	-	-	-	13
55	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	SENTRA GAU MABAJI	29	29	17	17	-	-	-	17
56	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	SENTRA GAU MABAJI	4	4	-	-	-	-	-	-
57	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	SENTRA HANDAYANI	26	26	20	11	-	-	-	11
58	DKI JAKARTA	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	SENTRA HANDAYANI	25	25	-	-	-	-	-	-
59	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	SENTRA HANDAYANI	18	18	-	-	-	-	-	-
60	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	SENTRA HANDAYANI	21	21	-	-	-	-	-	-
61	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	SENTRA HANDAYANI	58	58	30	30	-	-	-	30
62	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	SENTRA INSYAF	61	50	50	50	-	-	-	50
63	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	SENTRA INSYAF	117	110	13	13	-	-	-	13
64	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	SENTRA INSYAF	164	96	25	25	-	-	-	25
65	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	SENTRA INSYAF	58	25	19	19	-	-	-	19
66	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN	SENTRA INSYAF	50	50	49	49	-	-	-	49
67	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	SENTRA INSYAF	61	61	43	43	-	-	-	43
68	BALI	KABUPATEN BADUNG	SENTRA MAHATMIYA	30	30	22	22	-	-	-	22
69	BALI	KABUPATEN BANGLI	SENTRA MAHATMIYA	26	-	-	-	-	-	-	-
70	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	SENTRA MAHATMIYA	1	1	-	-	-	-	-	-
71	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	SENTRA MAHATMIYA	21	21	17	17	-	-	-	17

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

72	BALI	KABUPATEN BULELENG	SENTRA MAHATMIYA	11	-	-	-	-	-	-	-
73	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	SENTRA MAHATMIYA	95	95	47	46	-	-	-	46
74	BALI	KABUPATEN KARANG ASEM	SENTRA MAHATMIYA	5	5	-	-	-	-	-	-
75	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	SENTRA MAHATMIYA	31	30	29	29	-	-	-	29
76	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	SENTRA MAHATMIYA	126	100	28	28	-	-	-	28
77	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	SENTRA MAHATMIYA	31	31	17	17	-	-	-	17
78	BALI	KABUPATEN TABANAN	SENTRA MAHATMIYA	63	63	23	23	-	-	-	23
79	BALI	KOTA DENPASAR	SENTRA MAHATMIYA	34	34	32	30	-	-	-	30
80	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	SENTRA MARGO LARAS	98	29	14	14	-	-	-	14
81	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	SENTRA MARGO LARAS	61	45	31	31	-	-	-	31
82	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	SENTRA MARGO LARAS	49	49	42	42	-	-	-	42
83	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	SENTRA MARGO LARAS	300	264	91	59	31	-	-	90
84	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	SENTRA MARGO LARAS	23	15	7	3	-	-	-	3
85	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	SENTRA MARGO LARAS	19	12	6	-	6	-	-	6
86	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	SENTRA MARGO LARAS	1	1	1	-	1	-	-	1
87	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBİ	SENTRA MEOHAI	46	46	6	6	-	-	-	6
88	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	SENTRA MEOHAI	29	29	28	28	-	-	-	28
89	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	SENTRA MEOHAI	28	28	16	16	-	-	-	16
90	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	SENTRA GALIH PAKUAN	28	7	-	-	6	-	-	6
91	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	SENTRA MULYA JAYA	51	50	25	25	-	-	-	25
92	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	SENTRA MULYA JAYA	23	23	-	-	-	-	-	-
93	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	SENTRA MULYA JAYA	26	26	23	23	-	-	-	23
94	BANTEN	KOTA TANGERANG	SENTRA MULYA JAYA	58	64	50	44	-	-	-	44
95	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	SENTRA MULYA JAYA	1	1	-	-	-	-	-	-
96	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	SENTRA NIPOTOWE	1	1	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

97	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	SENTRA NIPOTOWE	25	25	34	22	-	-	-	22
98	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	SENTRA NIPOTOWE	2	2	2	-	2	-	-	2
99	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	SENTRA NIPOTOWE	70	70	14	13	-	-	-	13
100	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	SENTRA NIPOTOWE	33	32	19	16	3	-	-	19
101	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	SENTRA NIPOTOWE	36	36	37	37	-	-	-	37
102	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	SENTRA NIPOTOWE	8	8	2	2	-	-	-	2
103	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	SENTRA PANGURANGI	3	3	-	-	-	-	-	-
104	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	SENTRA PANGURANGI	30	30	20	20	-	-	-	20
105	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	SENTRA PANGURANGI	2	2	-	-	-	-	-	-
106	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	SENTRA PANGURANGI	34	34	21	21	-	-	-	21
107	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	SENTRA PANGURANGI	1	1	-	-	-	-	-	-
108	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	SENTRA PANGURANGI	63	32	32	26	6	-	-	32
109	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	SENTRA PANGURANGI	86	86	77	77	-	-	-	79
110	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	SENTRA PARAMITA	17	15	15	-	-	15	-	15
111	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	SENTRA PARAMITA	52	52	50	50	-	-	-	50
112	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	SENTRA PARAMITA	99	99	108	108	-	-	-	108
113	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	SENTRA PARAMITA	229	199	168	114	-	54	-	168
114	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	SENTRA PARAMITA	25	25	10	10	-	-	-	10
115	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	SENTRA PARAMITA	13	13	7	-	-	7	-	7
116	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	SENTRA PHALAMARTA	142	97	55	55	-	-	-	55
117	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	SENTRA PHALAMARTA	78	63	47	47	-	-	-	47
118	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	SENTRA PHALAMARTA	139	90	8	8	-	-	-	8
119	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	SENTRA PHALAMARTA	4	2	1	-	1	-	-	1
120	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	SENTRA PHALAMARTA	30	30	24	24	-	-	-	24
121	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	SENTRA PHALAMARTA	14	14	4	4	-	-	-	4

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

122	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	SENTRA SATRIA	188	138	122	104	-	-	-	104
123	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	SENTRA SATRIA	79	79	49	49	-	-	-	49
124	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	SENTRA SATRIA	27	27	14	14	-	-	-	14
125	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	260	202	-	-	-	-	-	-
126	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	1	1	1	-	1	-	-	1
127	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	297	266	275	275	-	-	-	275
128	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	54	13	2	2	-	-	-	2
129	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	25	25	17	17	-	-	-	17
130	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	25	25	18	19	-	-	-	19
131	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	24	5	5	-	5	-	-	5
132	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	56	-	-	-	-	-	-	-
133	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	6	5	5	-	5	-	-	5
134	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	100	100	62	60	-	-	-	60
135	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO	271	263	163	125	-	38	-	163
136	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	SENTRA TERPADU KARTINI	20	17	17	17	-	-	-	17
137	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	SENTRA TERPADU KARTINI	73	54	34	27	7	-	-	34
138	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	SENTRA TERPADU KARTINI	208	208	21	21	-	-	-	21
139	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	SENTRA TERPADU KARTINI	52	52	24	24	-	-	-	24
140	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	SENTRA TERPADU KARTINI	1	1	1	-	-	-	-	-
141	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	SENTRA TERPADU KARTINI	98	82	73	73	-	-	-	73
142	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	SENTRA TERPADU KARTINI	79	77	57	52	5	-	-	57
143	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	SENTRA TERPADU KARTINI	46	46	30	30	-	-	-	30
144	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	SENTRA TERPADU KARTINI	29	29	21	21	-	-	-	21
145	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	SENTRA TERPADU KARTINI	69	45	22	22	-	-	-	22
146	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	SENTRA TERPADU KARTINI	28	28	5	5	-	-	-	5

Laporan Kinerja Direktorat PKATKS Tahun 2022

147	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	SENTRA TERPADU KARTINI	67	51	37	36	1	-	-	37
148	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR	77	77	21	21	-	-	-	21
149	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR	27	27	19	19	-	-	-	19
150	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR	4	3	3	-	3	-	-	3
151	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR	25	25	25	25	-	-	-	25
152	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR	162	160	64	49	-	-	-	49
153	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR	349	345	101	12	-	-	50	62
154	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR	68	50	47	47	-	-	-	47
155	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	SENTRA TERPADU PROFESOR SOEHARSO	105	78	36	20	-	-	-	20
156	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	SENTRA TERPADU PROFESOR SOEHARSO	28	28	7	7	-	-	-	7
157	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	SENTRA TERPADU PROFESOR SOEHARSO	75	48	45	37	8	-	-	45
158	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	SENTRA TERPADU PROFESOR SOEHARSO	12	12	27	15	12	-	-	27
159	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	SENTRA TUMOU TOU	9	8	7	-	7	-	-	7
160	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	SENTRA TUMOU TOU	167	113	88	87	-	-	-	87
161	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	SENTRA TUMOU TOU	11	2	2	-	2	-	-	2
162	GORONTALO	KOTA GORONTALO	SENTRA TUMOU TOU	126	126	110	110	-	-	-	110
163	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	SENTRA WIRAJAYA	25	25	7	7	-	-	-	7
164	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	SENTRA WIRAJAYA	29	29	28	28	-	-	-	28
165	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	SENTRA WIRAJAYA	45	45	26	24	-	-	-	24
166	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	SENTRA WYATA GUNA	63	47	30	30	-	-	-	30
167	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	SENTRA WYATA GUNA	70	39	5	-	5	-	-	5
168	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	SENTRA WYATA GUNA	37	37	22	22	-	-	-	22
169	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	SENTRA WYATA GUNA	25	25	3	3	-	-	-	3
TOTAL				9,773	8,452	4,954	4,235	169	310	50	4,766

- Survei kepuasan *stakeholders* (LKS) atas program/kegiatan/Layanan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2022

FORM KUESIONER PENILAIAN LAYANAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

A. Petunjuk pengisian kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu membaca setiap butir pertanyaan dengan teliti dan cermat
2. Silakan memilih jawaban yang paling sesuai pada kolom pilihan jawaban dengan membubuhkan tanda (X)
3. Untuk setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu jawaban
4. Semua pertanyaan mohon dijawab tanpa ada satupun yang terlewat

B. Keterangan Jawaban

SB : Sangat Baik	SP : Sangat Puas
B : Baik	P : Puas
CB : Cukup Baik	CP : Cukup Puas
TB : Tidak Baik	TP : Tidak Puas
STB : Sangat Tidak Baik	STP : Sangat Tidak Puas

C. Identitas responden

1. Nama LKS :
2. Nama :
3. Jabatan :
4. Alamat :
5. No. HP :

D. Kuesioner

No	Aspek	Pilihan Jawaban				
		SB	B	CB	TB	STB
1.	Desain/Konsep/Mekanisme Pemberdayaan KAT					
2.	Peraturan/Juklak/Juknis PKAT					
3.	Penyaluran BOP dan BOL					

4.	Penyaluran Bansos					
5.	Monitoring dan Evaluasi					
6.	Dokumentasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban					

No	Aspek	Pilihan Jawaban				
		SP	P	CP	TP	STP
1.	layanan administrasi persuratan/dokumen					
2.	Layanan komunikasi/Konsultasi PIC/Staf					
3.	Layanan pendampingan dan advokasi					
4.	Layanan pertanggungjawaban keuangan/kinerja					

E. Saran

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., Januari 2023

(ttd dan nama jelas)

.....

1	Desain/Konsep/Mekanisme Pemberdayaan KAT	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
		13	12	1	0	0	26
2	Peraturan/Juklak/Juknis PKAT	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
		9	16	1	0	0	26
3	Penyaluran BOP dan BOL	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
		7	15	4	0	0	26
4	Penyaluran Bansos	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
		12	13	1	0	0	26
5	Monitoring dan Evaluasi	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
		12	13	1	0	0	26
6	Dokumentasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	
		8	15	3	0	0	26
1	layanan administrasi persuratan/dokumen	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas	
		12	13	1	0	0	26
2	Layanan komunikasi/Konsultasi PIC/Staf	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas	
		15	9	2	0	0	26
3	Layanan pendampingan dan advokasi	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas	
		11	11	4	0	0	26
4	Layanan pertanggungjawaban keuangan/kinerja	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Tidak Puas	Sangat Tidak Puas	
		9	15	2	0	0	26

